Bisnis Indonesia

NAVIGASI BISNIS TERPERCAYA

Tahun XXXV No. 11801 Terbit 16 halaman

Jumat, 3 April 2020

"Pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa menjadi orang dalam pemantauan [ODP] sehingga harus direncanakan isolasi mandiri."

Presiden Joko Widodo

"Pertimbangan utamanya bahwa orang kalau dilarang, mereka [tetap] mau mudik saja ... sekarang kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik, pasti membawa penyakit."

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan

"... pada awal pekan kemarin, kami mengirimkan surat kepada Bapak Presiden, mengajukan agar dilakukan langkah pembatasan ekstrem. Waktu itu kami mengusulkan karantina wilayah, kemudian kami sudah mendengar keputusan PSBB."

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

"Semua pemudik otomatis masuk kategori ODP. Kemudian, para pemudik ini harus mengisolasi diri di rumah selama 14 hari."

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

"Kepada mereka yang tidak mudik jangan khawatir, khususnya yang di Jakarta, karena hajat hidup akan ada insentif ekonomi dijamin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial dalam bentuk anggaran tunai ataupun pangan."

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

"Biasanya para perantau mudik pada Idulfitri, tetapi untuk tahun ini disarankan pulang ke kampung halamannya saat Iduladha."

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

| PENANGANAN PANDEMI COVID-19 |

PEMERINTAH HARUS TEGAS!

Bisnis, JAKARTA — Upaya pemerintah menangani penyebaran pandemi Covid-19 harus disertai dengan sikap dan kebijakan yang tegas. Konsistensi juga diperlukan agar tidak semakin membingungkan masyarakat.

Anitana W. Puspa, Rayful Mudassir & Dewi A. Zuhriyah
redaksi@bisnis.com

Indikasi ketidaktegasan pemerintah terlihat dari sejumlah hal. *Pertama,* pemerintah ingin memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ketimbang karantina wilayah utamanya di Jakarta.

Namun, hal ini tidak diikuti dengan pelarangan aktivitas masyarakat Ibu Kota ke daerah lain apalagi menjelang momentum Ramadan. Hal ini terlihat dari maraknya gelombang mudik ke sejumlah daerah.

Padahal, Jakarta menjadi episentrum penyebaran virus corona. Setiap orang yang keluar dari wilayah tersebut dapat menjadi pembawa virus dan menularkan kepada masyarakat di daerah tujuan.

Sejauh ini, pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang warga Ibu Kota untuk mudik. Masyarakat hanya sebatas diimbau. Alhasil, gelombang mudik terus terjadi.

Kondisi ini, menurut Sekjen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi, justru akan menjadi masalah baru di kemudian hari, mengingat fasilitas kesehatan di daerah sangat tidak memadai. "Ini justru akan sulit memutus mata rantai Covid-19."

Sikap pemerintah pusat itu juga bertolak belakang dengan pemerintah daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jelas melarang perantau asal Jateng untuk pulang ke kampung halaman.

Kedua, kurang selarasnya koordinasi antara pusat dan daerah yang terlihat dari polemik Surat Edaran (SE) No. 1588/-1.819.611 tentang Penghentian Layanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi [AJAP], dan Pariwisata dari dan ke Jakarta.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 30 Maret mengeluarkan SE tersebut. Namun, pada hari yang sama, Kementerian Perhubungan membatalkan surat itu dengan alasan belum ada kajian dampak ekonomi.

Ketiga, kurang koordinasi antara lembaga terkait dalam merespons kebijakan. Hal tersebut terlihat dari 'polemik' Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) No. 5/2020.

BPTJ mengeluarkan SE itu untuk membatasi transportasi di Jabodetabek. Surat ini sempat beredar dan lantas memicu keresahan di masyarakat. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berdalih, SE ini hanya rekomendasi dari BPTJ.

Menurutnya, untuk melakukan pembatasan maka daerah harus dikategorikan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan.

TAK TEPAT SASARAN

Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati menilai berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejauh ini tidak tepat sasaran. "Sudah ada contoh dari banyak negara yang gagal dan berhasil, tetapi [di Indonesia] solusi dan pertimbangannya *mbulet* ke mana-mana."

Dia mengingatkan pemerintah, saat ini yang dibutuhkan adalah upaya tanggap darurat pengendalian penyebaran Covid-19 yang serentak dan efektif.

"Jika pemerintah memilih strategi *herd immunity,* ini justru menyebabkan pandemi corona berkepanjangan dan tidak ada kepastian waktu. Jika ketidakpastian itu berlangsung cukup lama, ekonomi pasti tidak akan mampu bertahan. Stimulus ekonomi apapun yang disuntikkan akan majal." ***(Aziz Rahardyan/Edi Suwiknyo/Aprianus Doni/Muhamad Wildan/Jaffry P. Prakoso/Azizah Nur Alfi/Rinaldi M. Azka/Peni Widarti/k28/k57/Antara)***

Pencegahan Covid-19 di DKI Jakarta

16 Maret 2020
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi layanan transportasi publik kelolaan pemprov (MRT, LRT, dan Transjakarta) untuk pertama kalinya.

17 Maret 2020
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa agar layanan transportasi publik harus terus berjalan. Akhirnya, Gubernur DKI Jakarta mengganti kebijakan pembatasan jam dan operasional transportasi publik menjadi pembatasan penumpang saja.

2 April 2020
Gubernur DKI Jakarta menyurati Menteri Kesehatan agar Jakarta menyandang status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai PP 21/2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 untuk wilayah Jakarta.

Antisipasi Mudik

19 Maret 2020
Gubernur DKI Jakarta untuk pertama kalinya mengimbau warga Jakarta menunda ke luar kota dan mudik agar penyebaran Covid-19 tak meluas.

30 Maret 2020
– Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran No. 1588/-1.819.611 Tentang Penghentian Layanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), dan Pariwisata. Rencananya SE mulai berlaku pukul 18.00 WIB.

– Kementerian Perhubungan membatalkan pelarangan bus AKAP, AJAP dan pariwisata yang dikeluarkan Dinas Perhubungan DKI dengan alasan belum ada kajian dampak ekonomi serta sesuai arahan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

2 April 2020
Presiden membuka wacana mengganti libur hari raya Idulfitri ke hari lainnya. Langkah ini untuk menekan angka masyarakat mudik di tengah penyebaran Covid-19.

Pembatasan Transportasi

1 April 2020
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran No. SE.5.BPTJ.Tahun 2020 yang merekomendasikan pembatasan moda transportasi di Jabodetabek.

2 April 2020
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Surat Edaran BPJT bukan sebuah keputusan. Adapun, surat edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk melakukan PSBB.

Bisnis/Ilham Nesabana

Selalu Ada Cahaya di Ujung Lorong

Hery Trianto
hery.trianto@bisnis.com

BERANDA

'Saya pernah hampir enam tahun mengajak dosen seuniversitas untuk menggunakan online learning. *Membuat modul pelatihan, merancang kebijakan, menjadi tutor, dan ikut mengembangkan platform-nya.* Full time job. *Hasilnya, mendekati nol besar. Si Corona kurang ajar ini berhasil melakukannya dalam hitungan hari.'*

Kutipan ini saya ambil dari status Facebook Nino Aditomo, teman semasa kuliah yang kini dosen di Surabaya. 'Si Corona kurang ajar' ini memang telah mengubah banyak hal secara cepat, mengancam nyawa manusia, dan membahayakan ekonomi dunia.

Dunia [bisnis] pendidikan dengan cepat mengadopsi *e-learning* demi menjaga jarak sosial para pelajar dan mahasiswa. Dua anak saya yang duduk di bangku SMA dan SMP, bangun pagi dan tanpa mandi sudah di depan laptop mengikuti kelas virtual melalui konferensi video.

Kantor-kantor juga dipaksa mempekerjakan karyawan di rumah. Perilaku bisnis berubah cepat, di samping sejumlah sektor bisnis jatuh berantakan. Sebut saja industri penerbangan, telah kehilangan 60%—80% penumpang sejak wabah ini meledak pada Januari.

Sektor pariwisata tahun ini diprediksi akan memangkas lebih dari 50 juta pekerjaan menyusul langkah isolasi yang dilakukan oleh pendududuk dunia di lebih dari 200 negara. Italia misalnya, industri pariwisata yang berkontribusi terhadap 13% produk domestik bruto, mengalami mati suri.

• Bersambung ▸▸3

Edisi Minggu beredar hari ini

Harga eceran **Rp11.000/eks** Untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia **Rp12.000/eks**

Bisnis Indonesia

Bisnis Indonesia bigmedia

Sertifikat Dewan Pers No: 05/DP-Terverifikasi/K/II/2017

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: **Maria Yuliana Benyamin**

Wakil Pemimpin Redaksi: **Fahmi Achmad, Rahayuningsih**

Redaktur Pelaksana: **Achmad Aris, Diena Lestari, Galih Kurniawan, Hendri T. Asworo, Maftuh Ihsan, Surya Mahendra Saputra, Gajah Kusumo** *(Head of Premium Content & Multimedia),* **Yusuf Waluyo Jati** *(Head of Special Digital Products)*

Manajer Sekretariat Redaksi: *Indyah Sutriningrum*
Manajer Konten: *Abdullah Azzam, Akhirul Anwar, Ana Noviani, Andika Anggoro Wening, Anggara Pernando, Anggi Oktarinda, Annisa Margrit, Annisa Sulistyorini, Bunga Citra Arum, David Eka Issetiabudi, Dika Irawan, Duwi Setiya Ariyanti, Emanuel Berkah Caesario, Fajar Sidik, Firman Wibowo, Fitri Sartina Dewi, Hadijah Alaydrus, Hafiyyan, Hendra Wibawa, Inria Zulfikar, Kahfi, Lucky Leonard Leatemia, Lili Sunardi, M. Rochmad Purboyo, M. Syahran W. Lubis, M. Taufikul Basari, Mia Chitra Dinisari, Moh. Fatkhul Maskur, Nancy Yunita, Novita Sari Simamora, Nurbaiti, Nurul Hidayat, Rio Sandy Pradana, Rivki Maulana, Roni Yunianto, Ropesta Sitorus, Rustam Agus, Saeno, Sri Mas Sari, Stefanus Arief Setiaji, Surya Rianto, Sutarno, Tegar Arif Fadly, Oktaviano Donald Baptista, Wike Dita Herlinda, Yayus Yuswoprihanto, Yustinus Andri Dwi P., Zufrizal.*

Staf Redaksi: *Agne Yasa, Amanda K. Wardhani, Anitana Widya Puspa, Aprianus Doni Tolok, Arif Gunawan, Asteria Desi Kartikasari, Bambang Supriyanto, Dewi Andriani, Dewi Aminatuz Zuhriyah, Dhiany Nadya Utami, Feni Freycinetia Fitriani, Finna Ulia Ulfah, Gloria Fransisca K. Lawi, Iim Fathimah Timorria, Ilman A. Sudarwan, Ipak Ayu Hidayatullah, Jaffry Prabu Prakoso, John A. Oktaveri, Krizia Putri Kinanti, Leo Dwi Jatmiko, Markus Gabriel Noviarizal Fernandez, M. Khadafi, M. Nurhadi Pratomo, M. Richard, Mutiara Nabila, Nindya Aldila, Nirmala Aninda, Ni Putu Eka Wiratmini, Pandu Gumilar, Puput Ady Sukarno, Rahmad Fauzan, Rayfull Mudassir, Reni Lestari, Rinaldi Muhammad Azka, Samdysara Saragih, Thomas Mola, Yanita Petriella, Yudi Supriyanto.*

Fotografer: *Dedi Gunawan, Endang Muchtar.*

Wartawan *Bisnis Indonesia* selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan apapun dari narasumber berkaitan dengan pemberitaan.

PENERBIT: PT Jurnalindo Aksara Grafika
Wisma Bisnis Indonesia Lt 5 - 8, Jl.KH.Mas. Mansyur 12A, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Februari 1986 No: C2-989.HT.01-01-Th 86
Akta Notaris Hobropoerwanto tanggal 11 Juni 1985 No. 6

Presiden Direktur: **Lulu Terianto**
Direktur Produksi & Pemberitaan: **Arif Budisusilo**
Direktur Pemasaran: **Hery Trianto**

DIVISI PEMASARAN & PENJUALAN
General Manager Integrated Marketing Solution: **Indah Swarni Lestari, M. Rheza Adrian**
Manajer Sirkulasi: **Rosmaylinda, Sumarjo**
Manajer Marketing: **Dwi Putra Marwanto, Erlan Imran, Rizki Yuhda Rahardian, Vanie Elsis Mariana**
Manajer Promosi: **Hijrah Rizqianda Saputra**

DIVISI PRODUKSI
General Manager: **Andri Trisuda**
General Manager Bisnis Indonesia Resource Center: **Aprilian Hermawan**
Creative Manager: **Lucky Prima**

ANAK PERUSAHAAN
Navigator Informasi Sibermedia: **Asep Mh. Mulyana** *(Direktur),* **Arnis Wigati** *(General Manager),* **Siska Kartika, Ferdinand S. Kusumo**, **Didit Ahendra** *(Manajer)*
Bisnis Indonesia Gagaskreasitama: **Chamdan Purwoko** *(Direktur),* **Yunan Hilmi**, **Ovie Erlina** *(General Manager),* **Prasektio Nugraha Nagara**, **Retno Widyastuti**, **R. Fitriana** *(Manajer)*
Bisnis Indonesia Konsultan: **Chamdan Purwoko** *(Direktur),* **Donil Beywiyarno** *(General Manager)*

KANTOR PERWAKILAN
Bali: **Feri Kristianto** *(Kepala Perwakilan), Jl. PB Sudirman No. 4 Denpasar, Bali 80114 Telp/Fax. 0361-4746069*
Bandung: **Ashari Purwo AN** *(Kepala Perwakilan), Ajijah, Rachman (Fotografer), Jl. Buah Batu No. 46B Bandung 40261,Telp. 022-7321627, 7321637, 7321698 fax. 022-7321680*
Balikpapan: **Rachmad Subiyanto** *(Kepala Perwakilan), Balikpapan Superblok, Jl. Jend. Sudirman Stal Kuda Blok A/18, Balikpapan,Telp. 0542-7213507 Fax. 0542-7213508*
Medan: **Fitri Agustina** *(Kepala Perwakilan), Azizah Nur Alfi, Kompleks Istana Bisnis Center, Medan Maimun, Jl. Brigjen. Katamso No. 6 Medan,Telp. 061-4554121/4553035 Fax. 061-4553042*
Malang: **A. Faisal Kurniawan** *(Kepala Perwakilan), Pertokoan Sarangan Jl. Sarangan No. 1 A Malang, Telp. 0341-402727, 480630 Fax. 0341-402728*
Makassar: **Amri Nur Rahmat** *(Kepala Perwakilan), Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC Makassar GA-9 No. 16, Makassar, Telp. 0411-8114203 Fax. 0411-8114253*
Manado: **Lukas Hendra T. Meliyanto** *(Kepala Perwakilan), Denis Riantiza Meilanova Blok Mega Profit I F2 No. 27 Kawasan Megamas Manado. e-mail: manado@bisnis.com, Telp. 0431-8802525*
Palembang: **Herdiyan** *(Kepala Perwakilan), Dinda Wulandari, Jl. Basuki Rahmat No. 6 Palembang, Telp. 0711-5611474 Fax. 0711-5611473*
Pekanbaru: **Irsad** *(Kepala Perwakilan), Dwi Nicken Tari, Ruko Royal Platinum No. 89 P Jl. SM Amin, Arengka 2, Pekanbaru, Telp. 0761-8415055(hunting), 0761-8415077 Fax. 0761-8415066*
Semarang: **Farodlilah** *(Kepala Perwakilan), Edi Suwiknyo, Jl. Sompok Baru No. 79 Semarang, Telp. 024-8442852 Fax. 024-8454527*
Surabaya: **A. Faisal Kurniawan** *(Kepala Perwakilan) Miftahul Ulum, Peni Widarti, Jl. Opak No. 1 Surabaya, Telp. 031-5670748 Fax. 031-5675853*

KORAN REGIONAL
Solopos: **Bambang Natur Rahadi** *(Presiden Direktur),* **Suwarmin** *(Direktur Pemasaran),* **Rini Yustiningsih** *(Pemimpin Redaksi) Jl. Adisucipto No. 190, Telp. 0271-724811 Fax. 0271-724833*
Harian Jogja: **Anton Wahyu Prihartono** *(Pemimpin Redaksi) Jl. A.M Sangaji No. 41, Jetis, Jogja, Telp. 0274-583183, Fax. 0274-564440*

EDITORIAL

Pertimbangkan Risiko Sebelum Mudik

Lebaran tahun ini akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Aktivitas mudik yang biasanya diikuti dengan perputaran ekonomi daerah bakal menjadi sepi. Pandemi Covid-19 yang kian masif mengharuskan masyarakat lebih bijak memutuskan untuk pulang ke daerah masing-masing.

Jangan pulang dan membawa virus ke keluarga di kampung. Kampanye itu terus digaungkan oleh berbagai pihak di tengah pergerakan masyarakat ke luar wilayah pusat pandemi. Tak mudah menyadarkan masyarakat akan bahaya virus ini.

Setiap hari kita masih mendengar jumlah pasien positif virus ini terus bertambah signifikan. Data yang disampaikan pemerintah hingga kemarin, terjadi peningkatan kasus baru sebanyak 113 orang sehingga total pasien terkena Covid-19 menjadi 1.790 orang. Sementara jumlah pasien meninggal menjadi 170 orang dan sembuh 112 orang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa kunci menahan laju penyebaran virus corona adalah meminimalisir interaksi secara fisik di antara masyarakat atau dikenal dengan istilah *physical distancing*. Selain harus rajin menjaga kebersihan tangan dengan mencuci menggunakan sabun.

Sederhana tapi sulit dilakukan. Masyarakat kita banyak tak disiplin. Bertemu fisik masih jadi pilihan sebagian orang. Langkah pemerintah meminta masyarakat beraktivitas dari rumah juga belum berjalan maksimal. Alih-alih menjaga jarak 1 meter, yang terlihat malah saling berdesakan saat di keramaian.

Kini, upaya menekan penyebaran virus agar tidak bertambah luas tampaknya akan kian sulit dilakukan ketika pemerintah memilih tidak melarang mudik tetapi hanya mengajak warga agar tidak pulang kampung.

Dalam arahannya pada rapat terbatas di Istana Bogor kemarin, Kamis (2/4), Presiden menyebutkan bahwa pemudik dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan atau ODP.

Status ODP itu mengharuskan setiap warga asal Jabodetabek setiba di kampung halaman melakukan isolasi mandiri. Presiden menyebut pengawasan dan pengendalian di tingkat daerah dari level teratas hingga kelurahan dan desa sudah bergerak untuk mendata pemudik dari Jabodetabek.

Tak hanya menjadikan warga pendatang sebagai ODP, untuk menahan masyarakat agar tidak pulang kampung, pemerintah berjanji akan memberikan bantuan sosial dengan memperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah.

Terlepas janji bantuan sosial yang akan diberikan, pemerintah seharusnya sudah memperhitungkan dampak yang akan muncul bila mudik tidak dilarang. Tak mudah mengawasi orang yang datang ke suatu daerah.

Selain peran perangkat pemerintah daerah dalam memantau warganya, kesadaran tinggi dari masyarakat sangat dibutuhkan terutama melalukan isolasi mandiri. Kita tentunya berharap pandemi Covid-19 tidak meluas seiring dengan semakin tingginya mobilitas masyarakat ke luar daerah.

Kita bisa belajar dari kasus yang terjadi di berbagai negara di belahan dunia. Masifnya penyebaran Covid-19 karena masyarakat di negara tersebut masih berpergian ke luar kota, dan tidak menaatai saran pemerintah.

Kita harus belajar dari China, saat negara itu merayakan tahun baru Imlek di tengah pandemi Covid-19. Budaya pulang kampung di negara itu hampir sama dengan Indonesia. Setiap tahun, perayaan Imlek diikuti dengan pergerakan miliaran orang ke luar daerah.

Namun, tahun ini, aktivitas tersebut terhenti. Pemerintah China dengan tegas melarang penduduk yang berada di zona merah untuk berpergian dan membatasi pergerakan orang di wilayah lainnya. Kebijakan tersebut cukup berhasil dalam memperlambat penularan virus ini.

Meski pemerintah Indonesia berdalih penanganan Covid-19 berbeda di tiap negara, yang harus diutamakan adalah bagaimana mencegah penyebarannya agar tidak meluas. Menjaga jarak fisik antarmanusia, terutama warga yang berada di wilayah pusat pandemi menjadi keharusan.

Kita tentu tidak menginginkan angka yang disebutkan oleh pemerintah bahwa 700.000 masyarakat terancam terinfeksi bakal terjadi. Untuk itu, kesadaran semua pihak agar saling jaga dibutuhkan. ■

OPINI

Meniadakan Angkutan Mudik

Perayaan Idulfitri memang baru akan terjadi pada 24-25 Mei mendatang. Namun masalah penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran sudah harus diputuskan sekarang karena terkait dengan penyiapan armada dan infrastruktur agar mudik dapat berlangsung secara selamat dan aman.

Secara resmi belum ada keputusan dari Presiden, apakah pada Idulfitri nanti boleh mudik atau tidak. Keputusan Presiden tersebut mendesak ditunggu oleh para operator angkutan umum agar mereka dapat berancang-ancang sejak sekarang. Bila memang tak boleh, mereka tidak perlu siap-siap dari sekarang. Yang repot adalah kalau sekarang diputuskan boleh mudik tapi pada hari H sendiri ternyata buruk, tiba-tiba dibatalkan maka seluruh investasi mereka hilang sia-sia.

Meskipun belum ada putusan Presiden tetapi Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi pada 23 Maret lalu telah mengumumkan kepada publik bahwa Program Mudik Gratis Lebaran 2020, baik yang diselenggarakan oleh Kemenhub, BUMN, maupun swasta dibatalkan. Pembatalan ini untuk mengantisipasi merebaknya penyebaran virus corona ke daerah-daerah.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat telah menerencanakan persiapan 1.317 unit bus untuk pelaksanaan Program Mudik Gratis Lebaran 2020, berupa 200 unit bus AKAP berkapasitas 9.000 orang dan 1.117 bus pariwisata berkapasitas angkut 50.625 penumpang. Adapun truk yang disiapkan mencapai 111 unit dan diperkirakan dapat mengangkut 4.000 sepeda motor. Namun karena Program Mudik Gratis tersebut dibatalkan maka proses tendernya otomatis juga batal. Pembatalan itu, sekali lagi, untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena akan terjadi kerumunan massa dalam jumlah banyak di titik pemberangkatan yang tidak terawasi mana penumpang yang sehat dan terinfeksi.

Keputusan Dirjen Perhubungan Darat adalah langkah tepat bila langsung diikuti dengan keputusan Presiden mengenai larangan mudik Lebaran 2020. Sebaliknya, bila Presiden tidak mengeluarkan larangan mudik maka pembatalan program mudik gratis dapat menjadi problema, karena masyarakat akan tetap mudik dan mencari sarana transportasinya sendiri-sendiri. Pada Program Mudik Gratis Lebaran, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 dalam dua hal.

Pertama, memecah titik pemberangkatan agar tidak hanya dari satu titik. *Kedua*, membatasi jumlah penumpang yang diangkut sehingga tempat duduk antarpenumpang, terutama yang tidak sekeluarga dipisahkan atau diberi jarak. Konsekuensinya, tingkat keterisian bus menjadi sedikit. Namun bila masyarakat naik bus AKAP reguler, dapat dipastikan mereka akan duduk berdempetan, sehingga potensi penularan lebih cepat.

Dengan kata lain, tepat tidaknya keputusan Dirjen Perhubungan Darat membatalkan Program Mudik Gratis Lebaran 2020 justru akan dapat menjadi bumerang bagi penyebaran virus corona yang lebih masif bila tidak diikuti larangan untuk mudik Idulfitri. Larangan mudik itu diperlukan agar kebijakan berjalan secara konsisten. Bila tidak ada program mudik Lebaran, berarti musim panen operator bus berganti menjadi paceklik.

Ki Darmaningtyas
Ketua Institut Studi Transportasi

Realitas sosial yang terjadi di masyarakat adalah arus mudik ke kampung halaman sudah berlangsung sejak minggu keempat Maret. Seminggu awal masa isolasi saja, suasana Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia sudah sepi. Banyak pekerjaan konstruksi terhenti, warung makan dan makanan tutup, toko-toko banyak yang tutup, tempat hiburan tutup, hotel minim pengunjung, tempat wisata mati suri, dan tidak ada pekerjaan baru yang dapat menjadi sandaran hidup mereka.

Menghadapi kondisi buruk itu, para pekerja sektor informal memilih cepat mudik ke kampung halaman karena mustahil mereka mampu bertahan hidup dua bulan di ibu kota tanpa penghasilan yang jelas. Arus mudik ini telah menimbulkan persoalan sosial baru berupa resistensi dari warga yang menetap di kampung.

Mudik mereka saat ini tidak terkait lagi dengan tradisi Idulfitri tapi lebih kepada daya tahan hidup mereka di ibu kota. Kebutuhan angkutan mudik gratis itu justru saat ini ketika kaum urban mengalami pemutusan hubungan kerja atau kelesuhan usaha, dan ingin mudik ke kampung halaman.

Agar mudik mereka tidak menjadi media baru penyebaran virus maka ada baiknya bila difasilitasi dengan layanan mudik gratis yang memungkinkan pemerintah melakukan intervensi.

Presiden telah menginstruksikan bahwa perlu ada realokasi anggaran untuk menangani virus dan dampak Covid-19. Artinya, bila dana yang semula dialokasikan untuk Program Mudik Gratis Lebaran 2020 itu kemudian direalokasikan untuk memfasilitasi warga ibu kota yang akan mudik medio April, semestinya tak masalah dan tidak menjadi temuan BPK.

Ini kondisinya darurat sehingga tidak dapat diterapkan kebijakan *business as usual*. Perlu ada terobosan kebijakan yang berkeselamatan.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga **dilengkapi foto terbaru**. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat e-mail **redaksi@bisnis.com.**

SUARA PEMBACA

Bentuk Kepedulian Sosial

Di tengah situasi darurat kesehatan saat ini yang masih menyisakan persoalan keutuhan anak bangsa, ada baiknya masyarakat tetap berpikir secara sehat dan positif.

Karena pada dasarnya menurut saya, masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas sejak lama. Aktivitas yang paling nyata dalam hal ini adalah sikap tolong-menolong, toleransi, dan semangat gotong royong.

Pada intinya dari pengalaman sehari-hari di berbagai kultur masyarakat yang berbeda di Indonesia, rasa atau sikap peduli masyarakat Indonesia bisa dikatakan tetap terjaga.

Biarpun era sudah berbeda, bentuk semangat itu selalu hadir dalam bentuk baru yang mengikuti zamannya. Saat ini, terutama sejak wabah corona merebak di tengah masyarakat, perlahan tumbuh kesadaran komunitas untuk membantu atau peduli terhadap sesama, khususnya untuk mereka yang terdampak.

Banyak sekali kepedulian yang dilakukan perorangan, kelompok, hingga komunitas di tingkat akar rumput yang langsung menjangkau warga masyarakat terdampak. Ada yang menggalang logistik, makanan, hingga kebutuhan hidup lainnya. Saya yakin solidaritas dan bentuk kepedulian sosial ini tidak akan redup. Berbagi untuk sesama adalah sebuah kebahagian.

Riesta Trihartini
Kemayoran Gempol, Jakarta

Percetakan: PT Aksara Grafika Pratama Jl. Rawagelam IV Blok II K, Kav. No. 16B Kawasan Industri Pulogadung Telp. 021-4612348 - Fax 021-4605324

| AKSI KORPORASI DI TENGAH PANDEMI |

RENCANA IPO TETAP MELAJU

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah perusahaan tetap melanjutkan rencana penggalangan dana melalui aksi penawaran umum perdana saham di tengah penanggulangan penyebaran Covid-19 yang membuat sejumlah aktivitas menjadi terbatas.

M. Nurhadi Pratomo
nurhadi.pratomo@bisnis.com

Berdasarkan data yang dihimpun *Bisnis* melalui laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia hingga Kamis (2/4) pukul 17.00, sudah ada tujuh calon emiten baru yang mendaftarkan rencana penawaran umum perdana saham atau *initial public offering* (IPO) pada April 2020. Rencananya, mereka mencatatkan saham perdananya di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pad pekan kedua dan ketiga bulan ini. (*Lihat ilustrasi*)

Karya Bersama Anugerah dan Sejahtera Bintang Abadi Textile akan menjadi dua emiten yang mengawali *listing* di bursa pada April 2020. Keduanya juga akan menerbitkan waran bersamaan dengan eksekusi IPO.

Karya Bersama Anugerah akan melepas sebanyak-banyaknya 2,15 miliar lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp125. Bersamaan dengan penawaran umum perdana saham ini, perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1,72 miliar.

Alhasil, calon emiten baru dari sektor properti itu berpotensi meraup dana segar Rp215 miliar. Adapun, PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.

Selanjutnya, Sejahtera Bintang Abadi Textile juga akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 425 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp105. Perusahaan tekstil itu juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 425 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru yang dikeluarkan dalam rangka IPO.

Sebagai catatan, realisasi IPO kuartal I/2020 menjadi yang terbaik dibandingkan dengan periode yang sama pada rentang 2016—2020. Tercatat, sebanyak 19 perusahaan melantai di bursa dengan total perolehan dana Rp2,87 triliun.

Padahal, indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak dalam tren *bearish* sepanjang kuartal I/2020. Pergerakan indeks tercatat mengalami koreksi 27,95% pada tiga bulan pertama tahun ini akibat ketidakpastian terkait dengan wabah Covid-19.

Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan, bagi calon emiten yang baru mulai mencari investor untuk menyerap saham IPO, saat ini cukup berat karena investor dibayangi kekhawatiran harga saham yang sulit naik cepat.

Selain itu calon emiten baru saat ini juga harus bersaing dengan saham *blue chip* yang harganya sudah terdiskon. Namun dia menilai IPO saat ini tidak akan menjadi masalah apabila calon emiten baru memiliki investor strategis. "Kalau baru cari investor sekarang agak berat," ujarnya, Kamis (2/4/).

Sementara itu, Vice President Research Artha Sekuritas Frederik Rasali mengatakan rencana IPO pada tahun ini lebih menantang meskipun momentum

"Kalau baru cari investor sekarang agak berat.

yang tepat belum terlihat.

"Target dana masih bisa dicapai, terutama bila calon emiten sudah memiliki calon investor yang besar."

Frederik menyarankan agar investor sangat selektif dalam memilih calon emiten baru. Salah satu yang dapat menjadi pertimbangan apakah produk yang dihasilkan masih memiliki permintaan di tengah kondisi saat ini, seperti *healtcare*, *consumer product*, dan agrikultur.

Adapun William Hartanto, Technical Analyst Panin Sekuritas mengatakan penyebaran Covid-19 tidak akan menjadi sentimen negatif untuk calon emiten baru yang akan IPO pada April 2020. 🅱

TAK GENTAR CARI DANA

Ketidakpastian ekonomi dan bisnis sebagai dampak pandemi corona tak menyurutkan strategi korporasi untuk menggalang dana melalui pasar modal. Harapannya tentu saja sahamnya laku keras.

Daftar Emiten Baru Kuartal I/2019

Kode Saham	Dana Hasil IPO
PGJO	Rp12 miliar
CSRA	Rp51 miliar
AMAR	Rp208,8 miliar
INDO	Rp94 miliar
AMOR	Rp211 miliar
TRIN	Rp218,6 miliar
DMND	Rp91,5 miliar
PURA	Rp189 miliar
PTPW	Rp114,16 miliar
IKAN	Rp39,99 miliar
AYLS	Rp25,87 miliar
DADA	Rp218,99 miliar
ASPI	Rp34,65 miliar
BESS	Rp73,5 miliar
ESTA	Rp24 miliar
CARE	Rp1,03 triliun
AMAN	Rp64,35 miliar
SAMF	Rp93 miliar

Daftar Tujuh Calon Emiten Baru yang Sudah Melakukan Pendaftaran di KSEI

Calon Emiten	Masa Penawaran Umum	Tanggal Pencatatan di BEI	Jumlah Saham yang Ditawarkan	Harga Penawaran
PT Karya Bersama Anugerah Tbk.	1 - 2 April 2020	8 April 2020	2.150.000.000	Rp125
PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk	1 - 3 April 2020	8 April 2020	425.000.000	Rp105
PT Cipta Selera Murni Tbk	2 - 3 April 2020	9 April 2020	184.061.500	Rp196
PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk	2 - 7 April 2020	15 April 2020	1.300.000.000	Rp120
PT Bhakti Multi Artha Tbk	2,3 April dan 6-8 April 2020	15 April 2020	2.000.000.000	Rp103
PT Aesler Grup Internasional Tbk	3 April 2020	9 April 2020	250.000.000	Rp 100
PT Cahaya Bintang Medan Tbk	3 - 6 April 2020	9 April 2020	375.000.000	Rp 160

Sumber: *KSEI, diolah* Bisnis/Ilham Nesabana

SPEKTRUM

Rapid vs Massal

Sutarno
sutarno@bisnis.com

Di tengah kebingungan masyarakat akan wabah virus corona atau Covid-19, *rapid test* tiba-tiba menjadi sebuah eforia.

Padahal, tes itu masih masih menjadi perdebatan di kalangan ahli medis. Tindakan yang popular dengan istilah *rapid test* itu menggunakan metoda uji sampel darah untuk melihat antibodi orang terduga tertular corona.

Setelah darah diambil melalui jari tengah atau urat nadi di lipatan lengan, proses pengujian dilakukan dengan meneteskan darah ke dalam alat pembaca untuk menentukan positif atau negatif corona.

Prosesnya mirip seperti alat tes kehamilan yang membaca air seni untuk menentukan apakah hasilnya positif atau negatif hamil.

Hasil negatif corona dari *rapid test* masih belum bisa diartikan benar-benar negatif, karena oleh para ahli diingatkan adanya hasil 'negatif palsu'. Artinya, ketika divonis negatif corona, masih harus dilakukan tes molekular dengan mengambil sampel lendir di hidung dan tenggorokan untuk tes dengan metode PCR (*polymerase chain reaction*).

Jadi, selain *rapid test* sampel darah, ada lagi satu metode tes yang selama ini menjadi rujukan dokter untuk memastikan status pasien, yaitu PCR.

Mengumpulkan spesimen lendir hidung atau tenggorokan relatif lebih mudah dan cepat. Spesimen itu ditempatkan ke dalam alat yang namanya VTM (*viral transport medium*) untuk dikirim ke laboratorium.

Yang menjadi masalah, ada ribuan spesimen harus mengantre untuk diuji satu per satu. Dokter spesialis paru RS Persahabatan Jakarta Erlina Burhan dalam sebuah acara *talk show* di televisi menyebutkan dirinya sudah tujuh hari menunggu hasil tes bagi pasiennya untuk menanti kepastian negatif atau positif corona. "Untuk menyatakan pasien saya sembuh, sudah tujuh hari menunggu hasil tes, tetapi hasilnya belum keluar," katanya.

Tes PCR ini pula yang menjadi rujukan Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto ketika mengumumkan rekapitulasi jumlah pasien positif corona.

Tapi faktanya, untuk sebuah rumah sakit di Jakarta saja harus menunggu hasil tes PCR lebih dari tujuh hari. Bagaimana dengan spesimen pasien dari luar Jakarta, apalagi dari luar Pulau Jawa?

Data pasien positif corona yang dipaparkan Achmad Yurianto hingga Rabu (1/4) menyebutkan ada 1.677 kasus positif. Sebanyak 808 pasien atau 48% dirawat di Jakarta, sedangkan untuk keseluruhan di Pulau Jawa ada 1.416 pasien atau 84% dari total kasus positif secara nasional.

Kalau satu pasien di RS Persahabatan Jakarta saja membutuhkan lebih dari tujuh hari untuk mengetahui hasil tes PCR, bisa kita bayangkan waktu yang dibutuhkan untuk 1.528 kasus positif corona tersebut. Melihat situasi seperti ini, yang paling mendesak dibutuhkan adalah pengujian PCR secara massal dengan memperbanyak laboratorium-nya.

Tinggalkan *rapid test* sampel darah yang menimbulkan eforia sehingga menyebabkan masyarakat meminta test tersebut, bahkan berinisiatif membeli sendiri alatnya secara *online*.

Belajarlah dari Korea Selatan yang mampu melakukan tes PCR secara massal tapi dengan tingkat akurasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara medis.

Mau pilih yang mana, *rapid test* sampel darah atau tes PCR massal?

Selalu Ada Cahaya di Ujung Lorong (Sambungan dari Hal. 1)

Italia bahkan kini menjadi salah satu pusat pendemi wabah karena virus corona (Covid-19), dengan tingkat kematian tertinggi di dunia, jauh melampaui China sebagai asal wabah yang sempat disebut media barat sebagai *The Real Sickman of Asia*. Menyusul negeri pariwisata lain, kini, Spanyol.

Cepatnya penyebaran virus Covid-19, menimbulkan histeria yang tak pernah saya rasakan seumur hidup. Bagi Anda yang tinggal dan bekerja di Jakarta dan sekitarnya mungkin bisa menangkap situasi menyebalkan ini.

Betapa kita kini tak bisa menikmati suasana sepi jalanan pas hari kerja—yang semestinya jadi impian—justru menjadi perasaan mencekam, cemas, karena ketidakpastian di depan mata. Jalanan ramai dan macet di Jakarta adalah tanda dari ekonomi yang bergerak. Ketika itu menghilang, terjadi sebaliknya.

Hingga hari ini, setidaknya 16 negara melakukan penguncian (*lockdown*) yang telah mengisolasi 1,7 miliar manusia alias seperlima penduduk bumi. Indonesia, kendati pemerintahnya tidak mau mengadopsi istilah *lockdown*, tetapi sama saja menderita luka ekonomi.

***

Isolasi ini terang meruntuhkan banyak sektor bisnis, merusak ritme kerja, dan mungkin melahirkan sebuah perilaku bisnis yang sama sekali baru dan belum terbayangkan. Sebut saja betapa *video conference* melalui berbagai platform digital, seperti Zoom, Google Meet, dan Hangout, kini menjadi alat komunikasi efektif dalam menjaga kelangsungan bisnis.

Perilaku baru ini tentu saja menciptakan *opportunity* bisnis. Ini sebenarnya sejalan dengan adagium bisnis kuno: di balik krisis selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Masalahnya tinggal seberapa jeli kita dalam melihatnya?

Soal kejelian membaca peluang bisnis, bolehlah kita belajar pada Grup Lippo. Mengetahui hotel kehilangan banyak tamu saat tagar *#stayathome* menggema, jaringan Hotel Aryaduta milik kelompok usaha ini, menawarkan 'paket isolasi' bagi konsumen yang hendak menjaga jarak dari keluarga maupun kolega.

Ini jelas sebuah kejelian dan satu langkah ke depan di saat hotel lain sedang merutuki gelap karena lagi sepi pengunjung. 'Aryaduta menyediakan pelayanan lengkap yang aman dengan kebersihan terjaga untuk Anda dalam bekerja dan rileks,' demikian promo jaringan hotel itu dalam keterangan persnya.

Aryaduta menjanjikan kontak minimal dengan staf yang sudah dilatih mengikuti protokol kesehatan dari Siloam Hospitals, jaringan rumah sakit yang juga dimiliki Grup Lippo. Tarif isolasi ini ditawarkan mulai Rp850.000 per malam.

Inilah yang saya sebut sebagai intuisi bisnis *genuine*. Lippo juga tak berhenti pada langkah mengonversi hotelnya menjadi tempat isolasi aman bagi seseorang yang ingin memastikan tidak terjangkit Covid-19 dan mencegah diri menjadi *carrier*, tetapi juga mal miliknya menjadi rumah sakit darurat.

Anda juga pasti tahu, sudah hampir sebulan terakhir pusat perbelanjaan kehilangan pengunjung. Sebagian besar bahkan terpaksa tutup untuk turut mendukung program *social distancing*.

Sekali lagi, Lippo hadir dengan aksi mengubah Lippo Plaza Mampang, di Jakarta Selatan menjadi rumah sakit darurat dan tempat isolasi penderita Covid-19. Konversi mal menjadi rumah sakit darurat Covid-19 mungkin yang pertama setelah pemerintah juga mengubah Wisma Atlet Asian Games 2018 di Kemayoran menjadi rumah sakit darurat untuk menghadapi wabah.

Melalui aplikasi *Whatsapp*, saya sempat berbincang dengan Caroline Riady, cucu dari pendiri Lippo Mochtar Riady, yang dipercaya mengelola jaringan Rumah Sakit Siloam. "Ini sebenarnya hasil dorongan Pak James yang melihat kebutuhan makin membeludak dalam dua bulan ke depan. Jadilah mal menjadi ruang *emergency*, [dibangun] dalam dua minggu."

Menurutnya, Lippo Plaza Mampang akan memiliki kapasitas 415 tempat tidur, tetapi untuk tahap awal akan dibuka 180 tempat tidur. Rumah sakit darurat ini akan memafaatkan tenaga medis dari jaringan rumah sakit Siloam. Kebetulan tak jauh dari mal itu, beroperasi Siloam Hospitals Asri.

Dengan dua langkah tersebut, apa analogi kata yang sepadan selain 'kejelian membaca situasi'. Jelas membangun rumah sakit darurat merupakan panggilan kemanusiaan, tetapi bukanlah hal steril dari nilai-nilai bisnis. Ini sah-sah saja.

***

Dengan jumlah penderita yang terus meningkat dan langkah berbagai otoritas di belahan bumi yang makin membatasi mobilitas manusia, maka perekonomian kemungkinan tidak sekadar melambat, tetapi juga berhenti. Pertanyaannya, apakah setelah wabah lewat, pelaku usaha akan memulainya dari nol?

Ketika karyawan dirumahkan, jarak sosial berlaku, lalu pebisnis *wait and see*, lalu mengalami kesulitan arus kas, maka resesi tak terelakkan lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengulas kemungkinan terburuk dari krisis akibat wabah adalah perekonomian Indonesia minus 0,4% tahun ini.

Jelas kita menghadapi ketidakpastian, tetapi bukan berarti tanpa opsi untuk tetap melihat ke depan. Beberapa analis memperkirakan akan lahir *#stayathome* yang akan menjadi titik mula pemulihan.

Bahasa mudahnya, perekonomian akan dipulihkan oleh pelaku ekonomi yang tinggal di rumah. Yuswohadi, praktisi pemasaran yang banyak mempelajari perubahan bisnis digital, menyebut terjadi percepatan adopsi digital produsen-konsumen karena dipaksa wabah Covid-19.

Analisis ini relevan dari pengalaman Nino yang saya tulis pada bagian awal tulisan. *E-learning* adalah sebuah contoh betapa *#stayathome* telah menciptakan perilaku ekonomi baru yang pada situasi normal sulit terwujud.

Meminjam bahasa Yuswohadi, Covid-19 akan menciptakan perubahan perilaku konsumen yang permanen pada gilirannya membentuk *#stayathome economy* pada kenormalan baru. Di tengah wabah, ibu-ibu rumah tangga makin cepat mengadopsi *online shopping*, pelajar mengakrabi *e-learning*, dan generasi rebahan makin konsumtif dengan layanan Netflix, Gofood, dan *game online*.

Dalam situasi ini, jelas saya tak ingin mengajak Anda untuk merutuki gelap karena tentu lebih baik menyalakan lilin. Bahwa ekonomi bisa mundur, terpukul hingga tersungkur adalah benar, tetapi penting untuk menjaga ekspektasi, agar semua yakin bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong. 🅱

| PERMINTAAN ANJLOK |

RODA PABRIK MULAI TERSENDAT

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah industri mengalami penyusutan pasar di tengah pandemi Covid-19 dengan besaran yang beragam. Proses pemulihan setelah pandemi itu berhasil diatasi pun diyakini bakal berjalan lamban.

Andi M. Arief
redaksi@bisnis.com

Gelombang penutupan pabrik sepatu dan sepeda akan dimulai pada pekan ini seiring dengan minimnya permintaan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan sejumlah pabrikan di bawah asosiasi tersebut segera setop produksi.

"Pasar dalam negeri sudah hilang. Minggu ini dan minggu depan, pabrik-pabrik orientasi dalam negeri yang akan 100% [menghentikan produksinya]. Jadi, kami sudah benar-benar [akan] setop produksi untuk pasar domestik," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (2/4).

Firman menyatakan nilai produksi pabrikan berorientasi dalam negeri menopang sekitar 45% dati total nilai produksi alas kaki nasional. Sementara itu, pabrikan berorientasi ekspor menopang sekitar 50%.

Dengan kata lain, hampir separuh pabrikan sepatu di dalam negeri akan merumahkan tenaga kerjanya pada awal kuartal II/2020. Adapun, Firman memprediksi seluruh pabrikan alas kaki menghentikan produksinya pada 1 Juni 2020.

Dia memperkirakan mesin-mesin di pabrikan baru akan menyala sekitar 1 semester sejak masa pemulihan Covid-19 berjalan.

Berhentinya seluruh pabrikan alas kaki pada awal Juni 2020 akan membuat sekitar 800.000 tenaga kerja industri alas kaki akan dirumahkan. Maka dari itu, Firman meminta agar pemerintah mengajak asosiasi dan industriawan dalam penyaluran bantuan sosial pada tenaga kerja. "Yang tahu kondisi [tenaga kerja yang] sebenarnya [adalah] industriawan dan asosiasi."

Ketua Asosiasi Industri Persepedaan (AIPI) Rudiyono menyatakan kapasitas produsi rata-rata pabrikan sepeda saat ini merosot sekitar 40%—70%. Adapun, pada akhir kuartal I/2020 telah ada tiga pabrikan yang menghentikan produksi sama sekali.

"Sekitar 1.000 tenaga kerja dirumahkan. [Pilihan PHK] tergantung perkembangan ke depan, ada perbaikan [pasar] atau tidak? [Tapi,] PHK sudah menjadi salah satu pilihan yang *feasible*," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (1/3).

Rudiyono berujar sebagian pabrikan sudah merencanakan menutup fasilitasnya mulai awal kuartal II/2020.

Dia menambahkan pada umumya permintaan sepeda pada semester I mencapai sekitar 1 juta unit. Namun demikian, lanjutnya, permintaan pada semester I/2020 diperkirakan anjlok sekitar 40% menjadi sekitar 600.000 unit sepeda.

"Kalau terus seperti ini *kan* parah, cuma 40%-50% kegiatan [di pabrikan dari kapasitas terpasang]."

Sementara itu, Indonesia Iron and Steel Association (IISIA) mendata pasar baja nasional saat ini susut sekitar 80%. Wakil Ketua Umum IISIA Ismail Mandry mengatakan bahwa utilitas pabrikan baja nasional tinggal 20%. "Sebagian [besar pabrikan] tidak jalan [proses produksinya]," katanya kepada *Bisnis*, Kamis (4/2).

Penyusutan Pasar Sejumlah Industri*

Industri	Penyusutan (%)
Sepatu	100**
Baja	80
Serat dan Benang	70
Keramik	20
Kaca Lembaran	40
Daging Olahan	10
Kimia Dasar	30

Ket: *sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, **) tidak ada permintaan di dalam negeri

Seperti diketahui, sebuah pabrikan setidaknya harus memiliki utilitas di atas 40% agar tetap bisa membayar beban produksi. Ismail menyatakan sebagian pabrikan masih menjalankan pabrikan walau utilitas di bawah 40% untuk menghindari rugi total.

Adapun, industri lain yang melaporkan adanya penyusutan pasar antara lain keramik, kaca lembaran, dan kimia dasar (*lihat grafis*). Industri tekstil dan produk tekstil sempat melaporkan adanya gangguan permintaan tapi kini sudah mengalihkan sebagian produksi untuk alat pelindung diri serta masker nonmedis.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah sangat serius dalam menangani Covid-19 ini agar industri tidak makin terpuruk. Pekan ini, pihaknya pun aktif menggelar rapat jarak jauh dengan sejumlah pelaku industri untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi saat ini.

> **"Penciptaan iklim usaha yang kondusif juga diprioritaskan. Namun, hal itu perlu dukungan semua *stakeholder*.**

"Jadi, penciptaan iklim usaha yang kondusif juga diprioritaskan. Namun, hal itu perlu dukungan semua *stakeholder*," katanya melalui siaran pers, Kamis (2/4).

Agus menjelaskan pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap *outlook* perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Namun, pengalaman yang dialami China bisa menjadi pembelajaran.

Apalagi saat ini, geliat sektor manufaktur di China mulai kembali bangkit. China mampu menciptakan kesempatan dalam krisis seperti ini. "Artinya jika ekonomi China membaik, akan berpengaruh juga untuk negara lain. Maka dari itu, Indonesia harus bisa menciptakan peluang baru dalam menghadapi kesulitan ini," ujarnya.

Agus berujar pihaknya akan mengusahakan pemberian berbagai stimulus fiskal dan non-fiskal. Menurutnya, hal tersebut merupakan antisipasi banyaknya negara yang melakukan protokol penguncian (*lockdown*) yang memberikan dampak negatif bagi pasar lokal maupun global. *(Ipak Ayu H. Nurcaya)*

WISATA SUNGAI BATANGHARI SEPI

Antara/Wahdi Septiawan

Kapal Tongkang melintas di dekat Jembatan Pedestrian Gentala Arasy yang sepi pengunjung saat pandemi COVID-19, di kawasan Wisata Sungai Batanghari, Jambi, Rabu (1/4). Kawasan wisata andalan Provinsi Jambi yang selalu ramai didatangi warga dan wisatawan tersebut terpantau sepi sejak beberapa hari terakhir seiring mulai dipatuhinya imbauan pemerintah daerah setempat untuk menjaga jarak sosial dan tidak keluar rumah bila tidak mendesak saat pandemi Covid-19.

| MANUFAKTUR TERTEKAN |

Relaksasi Biaya Energi Dinanti

Bisnis, JAKARTA — Di tengah seretnya permintaan pasar, pelaku industri meminta agar pemerintah memberikan stimulus berupa relaksasi biaya energi, baik gas bumi maupun listrik.

Indonesia Iron and Steel Association (IISIA) telah melayangkan surat ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. Isi surat tersebut adalah permohonan peniadaan pemakaian energi minimum selama wabah Covid-19 belum tuntas.

Wakil Ketua Umum IISIA Ismail Mandry meminta kepada dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut untuk meniadakan penggunaan rekening minimum (RM) setidaknya hingga pandemi berakhir atau sekitar 3-4 bulan ke depan. Adapun, penghitungan RM mengasumsikan pabrikan mengonsumsi minimum listrik selama 40 jam.

"Kalau tidak dipakai, harus tetap bayar sejumlah [40 jam pemakaian]. Itu sangat memberatkan," katanya kepada *Bisnis*, Kamis (2/4).

Ismail mendata saat ini pabrikan peleburan baja menerima tarif listrik sekitar US$8 sen-US$9 sen/kWh. Ismail menyatakan kebijakan diskon 30% tarif listrik industri pada tengah malam juga belum akan membantu daya saing *billet* baja lokal. "Tarif listrik di luar US$3 sen-US$4 sen/kWh. Karena *flat base*-nya sekarang pada 2020 dinaikkan, jadi tidak menarik lagi karena [tarif listrik kompetitif] tidak bisa dicapai. Kenapa tidak diturunkan *flat base*-nya supaya kami ikut [mendapatkan manfaat]?"

IISIA mendata pabrikan besi dan baja konstruksi (*long product*) mengonsumsi sekitar 2 miliar kWh listrik per tahun untuk memproduksi 4 juta ton *billet* baja.

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Wirawasta. Dia menyampaikan saat ini ada sebagian pabrikan hulu TPT yang tidak bisa menyalakan mesinnya selama 40 jam. Maka dari itu, dia berharap masuknya PLN sebagai penerima manfaat harga istimewa gas industri dapat ditransmisikan pada tarif listrik bagi industri.

Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut pada pekan ini pihaknya akan menerbitkan beleid turunan dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang harga gas industri. "Sebentar lagi, mudah-mudahan minggu ini, tunggu formalitas," katanya kepada *Bisnis*, Kamis (2/4).

Dalam beleid tersebut, Arifin menjelaskan akan ada satu sektor baru yang akan menikmati insentif harga gas murah tersebut yakni sektor listrik. "[Beleid baru] plus PLN," ungkapnya. *(Andi M.Arief & M. Ridwan)*

| TREN SAAT PEMBATASAN SOSIAL |

KONFERENSI VIDEO, AWAS DATA DILEGO

Imbauan pembatasan interaksi fisik membuat aplikasi konferensi video menjadi primadona bagi nyaris semua kalangan masyarakat untuk tetap menjalin komunikasi di tengah pandemi COVID-19.

Akbar Evandio
redaksi@bisnis.com

Dilansir Statqo Analytics, saat ini penggunaan aplikasi rapat secara daring meningkat setiap pekannya. Hingga pekan keempat Maret, peningkatan yang sangat signifikan diraih oleh aplikasi Zoom dengan kenaikan penggunaan hingga 183%. Namun, hal yang sering kali luput dari perhatian masyarakat adalah faktor keamanan dari aplikasi konferensi video.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan saat ini yang ramai menjadi pembicaraan adalah keamanan Zoom yang berbagi data dengan Facebook.

“Memang ini sedang ramai di dunia. Zoom bahkan juga digugat karena *sharing* data tersebut. Informasi terakhirnya Zoom menganulir Facebook SDK untuk fitur iOS,” jelasnya, Kamis (2/4).

Meski Zoom menyatakan data yang dibagikan melalui iOS hanya mencakup informasi tak penting, kebocoran data diyakini bisa saja terjadi pada sistem operasi lain.

“Apalagi, kalau dipakai untuk sidang kabinet atau panggilan video para menteri yang membahas hal rahasia,” sebut Heru.

Mengutip laporan *The Verge*, Zoom menyatakan layanan panggilan videonya mendukung enkripsi ujung-ke-ujung (*end-to-end encryption*/E2E). Namun, penelitian terbaru The Intercept mengungkapkan hal itu tidak sepenuhnya benar.

The Intercept bertanya kepada juru bicara Zoom apakah konferensi video yang dilakukan pada platformnya dienkripsi E2E dan juru bicara itu mengatakan, “Saat ini, tidak mungkin untuk mengaktifkan enkripsi E2E untuk rapat video Zoom.”

Zoom menggunakan enkripsi TLS, standar yang sama dengan yang digunakan perambah situs jejaring untuk mengamankan situs HTTPS. Dalam praktiknya, data dienkripsi antara pengguna dan *server* Zoom, mirip dengan konten Gmail atau Facebook. Namun, istilah enkripsi E2E biasanya mengacu pada perlindungan konten sepenuhnya di antara pengguna, tanpa akses perusahaan sama sekali, mirip dengan yang dilakukan Whatsapp. Di sisi lain, Zoom tidak menawarkan tingkat enkripsi itu.

Zoom mengklaim tidak menjual data pengguna dalam bentuk apa pun. Namun, ada kemungkinan perusahaan dipaksa menyerahkan rekaman pertemuan jika terjadi proses hukum.

SERING LUPUT

General Manager untuk Asia Tenggara Kaspersky Yeo Siang Tiong mengungkapkan masih banyak hal yang sering luput dari perhatian masyarakat soal keamanan data. Padahal, tanpa disadari, manusia tengah menghadapi fase hidup yang makin terpengaruh oleh dunia dalam jaringan.

Dengan makin banyaknya negara yang melakukan *lockdown*, menurutnya, perusahaan kini menemukan cara untuk menggunakan teknologi demi menjaga kelangsungan bisnis mereka.

“Pelaku kejahatan siber mengetahui tren ini dan mereka bisa memanfaatkan, mengeksploitasi dan menyusup melalui pintu masuk yang berbeda, seperti Wifi, jaringan tanpa enkripsi, penggunaan kata sandi yang lemah, dan izin aplikasi yang buruk atau diabaikan,” jelasnya pada *Bisnis.*

Biasanya, konferensi video direkam sebagai referensi. Tentunya, dengan kemungkinan data rahasia dibahas dalam pertemuan, penting bagi perusahaan untuk melihat bagaimana data mereka disimpan.

Head of Corporate Communication Google Indonesia Jason Tedjasukmana menyebut untuk melindungi informasi pengguna, sebaiknya langkah pertama adalah memiliki *browser* yang aman dan mendukung enkripsi terbaru dan pembaruan keamanan.

“Kami mengenkripsi lalu lintas antara *browser* Anda dan pusat data kami secara otomatis. *Server* Google mendukung metode kerahasiaan untuk membantu melindungi lalu lintas antara pelanggan dan *server* Google agar tidak dicegat dan didekripsi oleh serangan *man-in-the-middle* (MitM),” tuturnya kepada *Bisnis*.

Alfons Tanujaya, pengamat Sekuriti Vaksincom, menambahkan pada prinsipnya risiko konferensi video sama dengan risiko aktivitas lain yang melibatkan transmisi data.

“Data tersebut bisa disadap di tengah jalan atau jika perangkat terinfeksi *malware*, data bisa disadap dari perangkat yang terinfeksi. Selain itu, jika data disimpan, juga rentan untuk disadap. Untuk itu, harus ada perlindungan yang baik atas data tersebut,” jelasnya.

Pengamat teknologi informasi dan komunikasi dari CISSReC Pratama Persadha mengatakan tiap pertemuan secara daring bisa disimpan di komputasi awan. Pengamanan inilah yang dipertanyakan; apakah ada proses enkripsi dan keamanan berlapis, sehingga setiap orang yang masuk ke sistem tidak serta merta bisa melihat, memodifikasi, menggandakan maupun menghapus data?

“Untuk aplikasi yang gratis, biasanya para pengembang mengambil data sebagai konsekuensi pemakaian gratis. Data yang umum dikumpulkan untuk pemetaan demografi seperti jenis ponsel yang dipakai, lokasi *base on IP adress* maupun waktu pemakaian. Seharusnya, isi percakapan dan *file* yang ditransfer tidak dibaca, tetapi itu kita tidak pernah tahu karena mereka adalah pemegang sistem,” jelasnya.

Pada saat seperti inilah Indonesia sangat perlu memiliki undang-undang tegas soal perlindungan data pribadi. Pemerintah pun perlu mewajibkan perusahaan yang mengendalikan dan memproses data harus berbadan hukum Indonesia.

Bila tidak, perlindungan data pribadi masyarakat akan tumpul, terlebih di tengah ketergantungan yang makin tinggi terhadap layanan daring. ■

Perkembangan Jumlah Pengguna Aplikasi Konferensi Video Selama Pembatasan Sosial

Sumber: *Statqo Analytics, 2020* — *BISNIS*/HUSIN PARAPAT

Stimulus Disoal

Bisnis, JAKARTA — Alokasi anggaran Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasionaldinilai tidak akan efektif jika wabah corona belum dikendalikan.

Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan jika wabah tak terkendali, stimulus tidak akan signifikan menyelamatkan industri.

“Kita tidak bisa berharap pemerintah menyelamatkan semua usaha karena pemerintah pun memiliki keterbatasan dana. Prioritas pendanaan harus dikerahkan pada pengendalian wabah dan dampaknya terhadap masyarakat menengah-bawah,” katanya, Kamis (2/4).

Ekonom Indef Bhima Yudhistira berpendapat nilai stimulus itu sangat jauh jika dibandingkan dengan total nilai kredit UMKM yang mencpai Rp1.100 triiun. “Jumlah stimulusnya terlalu kecil.”

(Dewi A. Zuhriyah)

| PENGATURAN TRANSPORTASI JAKARTA |

TARIK-ULUR TANGANI COVID-19

Pemerintah terkesan melakukan tarik-ulur dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona, khususnya terkait dengan pengaturan moda transportasi serta pergerakan kendaraan di DKI Jakarta.

Rinaldi M. Azka, Anitana W. Puspa & Rio Sandy Pradana
redaksi@bisnis.com

Polemik lanjutan itu bermula ketika Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE.5.BPTJ.Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Mengurangi Pergerakan Orang Dari dan Ke Wilayah Jabodetabek Selama Masa Pandemik Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam SE itu, badan di bawah Kementerian Perhubungan itu merekomendasikan pembatasan moda transportasi di Jabodetabek. Surat tersebut memuat berbagai ketentuan seputar pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jabodetabek.

Informasi tersebut langsung ditelan oleh beberapa media daring dan langsung menyimpulkan bahwa pemerintah telah resmi menyetop akses dan angkutan di Jabodetabek.

Sontak, mayoritas masyarakat yang berada di wilayah aglomerasi itu terkejut mengetahui ada pembatasan pergerakan kendaraan secara mendadak tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Kepanikan itu bukan tanpa sebab. Sebelumnya, sempat ada keputusan penghentian layanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antarjemput antarprovinsi (AJAP), bus pariwisata dari dan ke Jakarta yang akan dimulai Senin (30/3) pukul 18.00 WIB untuk mencegah warga Ibu Kota mudik lebih awal. Menjelang detik-detik pelaksanaan, rencana penghentian layanan bus itu dibatalkan Kemenhub dengan alasan belum ada kajian dampak ekonomi.

Kini, kepanikan masyarakat soal pembatasan moda transportasi di Jabodetabek itu juga langsung dipadamkan oleh Kemenhub dan Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi. Melalui juru bicaranya, Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan tidak ada penghentian transportasi di Jabodetabek.

"Jika dicermati isinya maka surat edaran Kepala BPTJ dimaksud lebih pada rekomendasi pembatasan aktivitas transportasi. Jadi, tidak ada penyetopan moda transportasi," jelasnya, Rabu (1/4).

Menurutnya, SE tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Jodi melanjutkan daerah dapat melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam (PSBB) Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk bisa dikategorikan sebagai wilayah PSBB daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan.

Dengan pernyataan itu, daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi jika belum resmi mendapatkan persetujuan Kementerian Kesehatan mengenai status PSBB. Sebaliknya, bagi wilayah di Jabodetabek yang sudah berstatus PSBB, SE itu bisa dijadikan pedoman untuk melakukan pembatasan moda transportasi.

Hal senada juga dibenarkan juru bicara Kemenhub Adita Irawati. "Dengan demikian, jika belum secara resmi mendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status PSBB, suatu daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi," tegasnya.

> **"Tidak masalah jika pemerintah menutup akses angkutan umum antarprovinsi dan itu mudah dilakukan, tetapi pemerintah harus memberikan kompensasi bagi pengusaha angkutan umum ...**

Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahkan menyampaikan kritik atas terbitnya SE dari BPTJ soal pembatasan transportasi umum hingga penutupa sejumlah ruas jalan tol.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan SE BPTJ seharusnya tak perlu diterbitkan karena pembatasan sosial sebetulnya telah diatur oleh PP No. 21/2020 terkhusus mekanisme penetapan terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan.

Syafrin juga menilai kebijakan pembatasan sosial di angkutan umum Jakarta masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Kesehatan.

"Kami menunggu penetapan Menteri Kesehatan karena kan mekanismenya sudah diatur di PP Nomor 21/2020. Karena Gubernur, Wali Kota, Bupati, dapat mengusulkan PSBB itu bisa langsung kepada Menteri Kesehatan," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan bahkan sampai turun tangan menengahi polemik soal SE BPTJ. Dia mengatakan SE itu hanyalah berupa rekomendasi.

"Coba Anda baca dengan cermat itu rekomendasi dari Ibu Polana [Kepala BPTJ], *enggak* ada [kata] diputuskan," kata Luhut melalui telekonferensi seusai rapat dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (2/4).

Untuk dapat dikategorikan sebagai wilayah PSBB, sekali lagi Luhut menyatakan daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan PP No. 21/2020.

Menurutnya, penyebaran berita yang tidak benar oleh media bisa merugikan orang lain. Terlebih, jangan sampai memuat unsur politis. Perilaku elite politik bisa memengaruhi sikap orang lain. Bila masyarakat menerima informasi yang tidak benar, dia menegaskan hal itu bisa berdampak negatif.

"Apalagi yang elite-elite ini, saya imbau betul jangan Anda men-*tweet* berita yang *enggak* benar. Dewasalah sekali-kali, jangan dipolitisasi," kata Luhut lagi.

Terlepas dari polemik yang ditimbulkan SE dari BPTJ, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyatakan pemerintah seharusnya fokus kepada implikasi yang mengiringi pemberlakuan PSBB.

DAMPAK PSBB

"Tidak masalah jika pemerintah menutup akses angkutan umum antarprovinsi dan itu mudah dilakukan, tetapi pemerintah harus memberikan kompensasi bagi pengusaha angkutan umum sebagai wujud negara hadir dan berpihak pada layanan transportasi umum," kata Djoko.

Menurutnya, pemerintah sudah memiliki regulasi untuk terus melestarikan keberadaan transportasi umum di Indonesia. Pemerintah wajib menyediakan angkutan umum, mewajibkan angkutan umum berbadan hukum dan memberikan subsidi.

Dalam Undang-Undang (UU) No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah pusat wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang AKAP serta lintas batas negara. Untuk pemerintah daerah provinsi menjamin tersedianya layanan antarkota dalam provinsi (AKDP), pemda kabupaten/kota dalam wilayah kabupaten/kota.

Pada saat bisnis angkutan umum terimbas Covid-19, dia meminta pemerintah menyiapkan program pemulihan bagi bisnis transportasi umum.

Bisnis bus AKAP, AJAP, taksi reguler, angkutan pariwisata dapat diberikan program bantuan keberlangsungan usahanya. Menurutnya, minimal setiap pekerja mendapat bantuan bulanan setara upah minimum kota (UMK) salama 3 bulan—6 bulan ke depan dengan opsi dapat dievaluasi setiap bulan.

"Jangan sampai nantinya bisnis angkutan umum ini gulung tikar, sebab negaralah yang akan merugi nantinya," ungkapnya.

Saat ini, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Namun, regulasi tersebut tidak berpihak pada pengusaha angkutan umum, sehingga tidak memberikan solusi aman bagi keberlanjutan bisnis transportasi umum.

Seharusnya, Djoko menilai tidak perlu membatasi debitur dengan fasilitas kredit kurang Rp10 miliar yang harus dibantu.

"Yang diminta pengusaha transportasi umum adalah penundaan kewajiban, bukan tidak mau membayar. Hilangkan saja batasan Rp10 miliar itu, jika pemerintah benar-benar berpihak pada bisnis transportasi umum," ujarnya.

Selayaknya, pemerintah dapat melihat perkara di moda darat lebih utuh, bukan sekedar ramai pemberitaan mengenai SE yang bocor tersebut.

Jauh lebih penting menjamin kelangsungan angkutan umum massal agar berkelanjutan di tengah pandemi Covid-19 ketimbang melakukan tarik-ulur kebijakan yang tak jelas hasilnya. ■

| WABAH VIRUS CORONA |

Proyek IKN Baru Tetap Jalan

Bisnis, JAKARTA — Ikatan Ahli Perencana Indonesia menyatakan perencanaan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dipastikan tetap berjalan, meski diterpa pandemi virus corona.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) Andy Simarmata mengatakan bahwa sampai saat ini proses studi dan perencanaan ibu kota negara (IKN) baru terus berjalan.

"Karena *physical distancing* aja jadi survei di lapangan di-*hold* dahulu, tetapi proses pengolahan datanya mungkin terus dilakukan, *enggak* ada masalah itu dari jarak jauh," ungkapnya saat dihubungi *Bisnis*, Kamis (2/4).

Adapun, yang terpaksa tertunda dalam perencanaan IKN baru antara lain dari segi penyusunan aturan legal basisnya.

Andy menyebutkan rancangan undang-undang IKN masih digodok di DPR. Dalam kondisi pandemi *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19), paparnya, pengesahan tidak memungkinkan.

"Yang ditunggu itu Presiden *kan* maunya cepat, terus biasanya ada *groundbreaking*. *Cuma* karena belum ada legal basisnya ya *enggak* bisa mulai. Lalu, DPR *enggak* bisa paripurna dan pengesahan UU IKN. Ini juga berpotensi menghambat," jelasnya.

Awalnya, Andy memberikan legal basis IKN baru seharusnya bisa rampung pada semester pertama tahun ini. Namun, dia memperkirakan pembicaraan lanjutan soal basis dimulai akhir Mei lantaran wabah Covid-19. Jika legal basis sudah selesai dibuat, pemerintah bisa mulai melakukan pembangunan.

"Kalau sudah ada ketetapan hukum baru bisa mulai, misalnya *groundbreaking*, atau pembangunan infrastruktur jalan, atau waduk air, tapi kalau untuk sekarang kayaknya masih belum bisa," kata Andy.

Selain itu, lanjutnya, pengembangan IKN baru juga masih harus menunggu studi dari hasil sayembara aristek dan perencanaan dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) yang nantinya akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

"Masih ada beberapa juga yang belum disusun seperti aturan terkait dengan tata ruangnya juga belum siap. Baru mau disusun tahun ini. Jadi, mungkin paling baru selesai akhir tahun," ujarnya.

Andy memastikan perencanaan pembangunan IKN baru tidak akan disetop kendati ada wabah virus corona. *(Mutiara Nabila)*

| PENANGGULANGAN BENCANA |

Lahan Terbakar Riau 996,58 Ha

Bisnis, PEKANBARU — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mencatat luas lahan yang terbakar selama periode 1 Januari—1 April 2020 di Riau telah mencapai 996,58 hektare (ha).

"Satgas udara maupun satgas darat masih tetap *standby* dan terus melakukan pemadaman di lahan terbakar," kata Edwar Sanger, Kepala BPBD Riau, Kamis (2/4).

Perinciannya, kata Edwar, lahan terbakar di Rokan Hilir seluas 35,7 ha, Dumai 104,85 ha, Bengkalis 262,6 ha, Kepulauan Meranti 38 ha, Siak 165,06 ha, Pekanbaru 13,5 ha, Kampar 19,37 ha, Pelalawan 76,6 ha, Indragiri Hulu 45,25 ha, dan Indragiri Hilir 235,6 ha.

"Kami telah menggerakkan 6 helikopter dan satunya heli Teknologi Modifikasi Cuaca [TMC]. Di antaranya ada heli Bell 412 SP dari KLHK dan Heli Bell 412 EP dari BNPB," jelas Edwar.

Sementara satgas darat, lanjutnya, kini tengah melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di 4 titik di antaranya Bengkalis sebanyak 2 titik, Pelalawan 1 titik, dan Pekanbaru 1 titik.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru menginformasikan bahwa citra satelit mendeteksi sebanyak 28 titik panas atau *hotspot* di Riau pada 31 Maret 2020 pukul 06.00 WIB.

Bibin Sulianto, Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru, mengatakan jumlah *hotspot* di Provinsi Riau tersebut merupakan yang terbanyak di Pulau Sumatra.

"Total *hotspot* di Pulau Sumatra ada 67 titik, yaitu terdiri dari Riau 28 titik panas, Kepulauan Riau 18 titik panas, Sumatra Selatan 15 titik panas, Bangka Belitung 5 titik panas dan Sumatra Utara satu titik panas," kata Bibin di Pekanbaru, Selasa (31/3).

Adapun, sebanyak 28 titik panas di Riau yang memiliki level *confidence* di atas 50% tersebar di lima kabupaten yaitu Indragiri Hilir sebanyak 10 titik, Bengkalis dan Pelalawan masing-masing sebanyak 7 titik, serta Siak dan Kepulauan Meranti masing-masing 2 titik.

Sebelumnya Kepolisian Daerah Riau resmi meluncurkan aplikasi Lancang Kuning Nusantara yang dapat mendeteksi titip api atau *hotspot*.

Aplikasi ini menampilkan data tentang kondisi kawasan gambut, potensi hujan, dan kecepatan angin, hingga level kebakaran lahan yang sedang terjadi. *(Dwi Nicken Tari)*

■ CEGAH PENYEBARAN COVID-19

Antara/Siswowidodo

Petugas mengatur arus lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo saat dilakukan seleksi pengendara yang akan memasuki wilayah di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (2/4). Petugas menolak pengendara yang bukan warga kota Madiun memasuki wilayah tersebut untuk mengurangi pergerakan masyarakat dari luar daerah di wilayah itu dan mencegah penyebaran Covid-19 atau virus corona.

| JAMINAN HIDUP WARGA MISKIN |

BANSOS DAERAH SEGERA DIBAGIKAN

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah daerah menjamin kebutuhan pangan selama penanganan wabah Covid-19 melalui bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan miskin yang segera dibagikan.

Aziz Rahardyan
redaksi@bisnis.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran Rp3,02 triliun untuk kebutuhan bantuan sosial hingga Mei 2020. Rinciannya, per 2 April 2020 sudah tersedia Rp1,032 triliun dan bakal ditambah lagi Rp2 triliun sampai bulan depan.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi warga miskin DKI Jakarta yang sudah terdata *by name, by address* dan merupakan penerima bantuan rutin. Bansos yang diberikan senilai Rp1 juta per KK per bulan selama 2 bulan berturut-turut.

"Bila ini berkepanjangan sampai sesudah bulan Mei akan kita tambah anggaran," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat *teleconference* bersama Wakil Presiden Maruf Amin, Kamis (2/4)

Dengan adanya rencana penambahan anggaran tersebut, Anies berharap pemerintah pusat segera mencairkan dana transfer daerah atau dana perimbangan agar bisa mengatur arus kas lebih baik.

Anies menyebut jumlah dana transfer untuk DKI Jakarta mencapai Rp5,1 triliun yang merupakan piutang 2019 serta dana bagi hasil untuk kuartal II/2020 sebesar Rp2,4 triliun yang dijanjikan oleh Kemenkeu.

"Kita membutuhkan kepastian atas dana bagi hasil, seperti ketika ratas dengan Bapak Presiden kemarin. Kita sampaikan ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu segera dieksekusi. Karena itu akan membantu sekali," jelasnya.

Menanggapi permintaan Anies, Ma'ruf Amin pun berjanji mengakomodasi, sebab hal yang sama juga pernah diungkapkan pemerintah lainnya.

Selain bantuan bansos kepada 1,1 juta warga miskin, Pemprov DKI Jakarta membidik 2,6 juta KK rentan miskin yang yang masih dalam proses pendataan. Mereka misalnya pengemudi ojek atau pedagang bakso, pedagang kaki lima, mereka kehilangan pendapatan saat ekonomi terkontraksi.

Anies mengungkapkan bahwa pembicaraan terakhirnya bersama kementerian terkait, menyepakati bahwa pemerintah pusat ikut menangani anggaran bantuan sebesar Rp880.000 per KK rawan miskin. Artinya, pusat akan menggelontorkan dana sebesar Rp4,567 triliun selama dua bulan.

Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) juga menyiapkan anggaran Rp1,4 triliun penanganan wabah Covid-19 yang sebagian besar akan digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan dalam waktu dekat, bantuan sosial itu akan didistribusikan kepada masyarakat. "Ada sekitar 1,8 juta masyarakat yang kami jadikan sasaran untuk program bantuan sosial itu. Anggaran Rp1,4 triliun tersebut, sebagian besar yakni Rp1 triliun kami alokasikan untuk itu," ujarnya.

Bantuan sosial dialokasikan per kepala keluarga Rp200.000 perbulan selama tiga bulan berturut-turut. Ganjar berharap bantuan dalam bentuk barang atau kebutuhan pokok.

Bansos ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin desil (kelompok rumah tangga) 3 dan 4. Sedangkan untuk desil 1 dan 2 telah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Baik dari pusat maupun Jateng, nominal bantuan sama yakni Rp200.000 per bulan.

Ganjar juga meminta bupati dan walikota terkait pendataan agar program bantuan sosial sinkron dan tepat sasaran. Dia juga meminta kepala daerah berkomunikasi intens dengan pemprov dalam rangka relokasi dan realokasi anggaran terkait bantuan sosial.

"Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan bisa saling melengkapi, agar lebih banyak masyarakat yang nasibnya tidak baik saat ini, bisa kita *rescue* dengan cepat," paparnya.

KRITERIA TERDAMPAK

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menggelontorkan anggaran Rp3 triliun hingga Rp5 triliun untuk bantuan senilai Rp500.000/bulan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak Covid-19.

> **"Kita membutuhkan kepastian atas dana bagi hasil, seperti ketika ratas dengan bapak Presiden kemarin.**

Bantuan Rp500.000 yang rencananya diberikan selama 2 bulan dan maksimal 4 bulan ini satu per tiganya berupa tunai dan mayoritas atau sisanya adalah bantuan dalam bentuk bahan pangan.

Adapun dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia melalui *video conference* di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4), Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan insentif sebesar Rp500.000 berbentuk tunai dan pangan itu merupakan upaya Pemprov Jabar dalam mendukung bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19.

"Sesuai arahan presiden, kita harus kompak. Kalau 25% terbawah ekonomi sudah diberikan kartu sembako dan Kartu PKH [oleh pusat], maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan meng-*cover* golongan 25% sampai 40% ekonomi terbawah dengan memberikan insentif sebesar Rp500.000," kata Ridwan Kamil.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja meminta bupati dan walikota untuk melakukan pemadanan data *by name by address* Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020 kepada Dinas Sosial masing-masing.

"Data *by name by address* RTM dalam DKTS Tahun 2020 ini akan disampaikan kepada pengelola DKTS 2020 kabupaten/kota secara *online*," ucap Setiawan di Kota Bandung, Kamis (2/4).

Selanjutnya, kepala daerah diminta menyampaikan *prelist* data non-DKTS *by name* by NIK (Nomor Induk Kependudukan) RTM terdampak Covid-19 dengan kriteria sebagai pekerja berpenghasilan harian baik ber-KTP Jabar maupun luar Jabar.

Ada beberapa bidang pekerja, meliputi pekerja di bidang perdagangan dan jasa; bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap; bidang pariwisata; bidang transportasi; bidang industri; pekerja berskala usaha mikro dan kecil; dan penduduk yang bekerja sebagai pemulung

"Usulan tersebut disampaikan paling lambat Senin, 6 April 2020, juga secara *online*," ucap Setiawan.

Pihaknya memastikan bahwa pemberian bantuan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak Covid-19 dilakukan secara tepat. Hal ini dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi global [Covid-19] di Jabar kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial pangan serta masyarakat rentan miskin berdasarkan DKTS 2020.

"Karena sesuai arahan gubernur, bantuan tidak diberikan bagi penerima Kartu Sembako dan PKH yang selama ini rutin mendapatkan bantuan dari APBN [pemerintah pusat," ujar Setiawan.

Pemprov Jabar melalui Dinas Sosial Provinsi Jabar memantau dengan ketat pemadanan data tersebut agar bantuan sosial pangan bisa tepat sasaran, merata, dan tidak ada warga yang menerima bantuan ganda. *(k28/k57)*

KUCURKAN JATAH HIDUP

Bantuan sosial di tingkat pemerintah daerah akan segera didistribusikan dalam rangka penanganan wabah Covid-19. Masing-masing daerah punya hitungan sendiri sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berikut skema bansos sejumlah daerah.

JAWA TENGAH

- Disiapkan anggaran Rp1,4 triliun.
- Mayoritas digunakan untuk bansos (Rp1 triliun).
- Terdapat 1,8 juta masyarakat jadi sasaran.
- Bantuan senilai Rp200.000/bulan selama 3 bulan berturut-turut.
- Bantuan dalam bentuk barang atau kebutuhan pokok.

DKI JAKARTA

- Dianggarkan Rp3 triliun sampai Mei 2020.
- Per 2 April 2020 sudah dianggarkan Rp1,02 triliun (akan ditambah lagi Rp2 triliun).
- Jika wabah terus berlangsung, anggaran ditambah lagi.
- Bantuan sosial DKI Jakarta untuk 1,1 juta warga misksin (Rp1 juta/bulan selama 2 bulan berturut-turut.
- Gubernur Anies Baswedan menagih piutang Kemenkeu tahun lalu Rp5,1 triliun dan dana bagi hasil kuartal II 2020 Rp2,4 triliun.
- Dana dari pemerintah pusat akan memperlancar *cash flow* DKI Jakarta untuk penanganan Covid-19.

JAWA BARAT

- Tahap I: Tanggap Darurat Pendapatan Warga.
- Anggaran Rp3—5 triliun.
- Diperuntukkan bagi 1 juta KK.
- Penerima bantuan adalah warga miskin baru akibat Covid-19.
- Bantuan Rp500.000 per bulan selama 2 bulan (ada opsi diperpanjang).
- Tahap II: Tanggap Darurat Padat Karya.
- Anggaran Rp13 triliun.
- Digunakan untuk kegiatan proyek padat karya pemerintah .
- Masyarakat yang kehilangan penghasilan bisa berpartisipasi.
- Investor swasta diwajibkan melakukan proyek padat karya.

Sumber: *Bisnis, diolah.*
BISNIS/TRI UTOMO

| DUTA BESAR PRANCIS UNTUK INDONESIA OLIVIER CHAMBARD |

MENJADI BAGIAN BISNIS DI RI

Bisnis, JAKARTA — Kerja sama bilateral Prancis dan Indonesia memasuki usia 70 tahun pada 2020. Bagi Prancis, Indonesia masuk sebagai mitra utama dalam berbagai sektor baik ekonomi, politik, dan budaya. Upaya memperkuat kerja sama kedua negara terus dilakukan, baik dari sisi pendidikan, kebudayaan, maupun peluang investasi. Guna mengetahui strategi yang dijalankan, Bisnis berkesempatan mewawancarai Duta Besar Prancis untuk Indonesia ***Olivier Chambard****. Berikut kutipannya:*

Nama
Olivier Roger Chambard

Tempat, tanggal lahir
Boulogne-Billancourt, 25 Mei 1962

Pendidikan
Bachelor of Arts, The National Institute of Oriental Languages and Civilizations.

Karier
- Konsul Jenderal di London, Inggris, 2012–2015.
- Sekretaris Jenderal untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Eropa, 2018.
- General Inspection, Kementerian Luar Negeri Prancis, 2018–2019.
- Duta Besar Indonesia, Timor Leste, dan Asean, 2019–sampai sekarang

Bagaimana perspektif Anda tentang Indonesia?

Pertama kali saya ke Indonesia, pada saat itu masih dalam kondisi sulit baik dari sosial, politik, dan ekonomi karena krisis moneter. Namun setelah kembali 20 tahun kemudian baik sektor sosial, politik, ekonomi mengalami perkembangan.

Menjadi negara demokrasi bukan suatu proses yang tidak mudah, apalagi ditengah permasalahan yang harus dihadapi. Namun ada transformasi. Jadi saya sangat senang bisa kembali ke Indonesia, saya sangat senang melihat kemajuan yang ada di Indonesia.

Anda berkarier sebagai diplomat?

Iya, sejak muda karier saya menjadi diplomat. Saya bergabung dengan kementerian [luar negeri Prancis] sejak 1988. Saya sangat senang melakukan pekerjaan ini. Menurut saya yang menjadi bagian penting dari diplomat adalah sering kontak dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda.

Jadi, Anda sudah keliling dunia?

Tidak banyak juga. Saya baru dua kali di Indonesia, tiga kali di London karena istri saya bekerja di sektor keuangan di London. Bagi kami berdua bekerja di London lebih mudah karena sektor finansial yang ada. Setelah itu baru menyusul ke beberapa negara seperti Asia, Asia Selatan, Afrika, dan beberapa wilayah lainnya. Tugas menjadi duta besar saat ini mencakup Indonesia, Timor Leste, dan Asia.

Bagaimana Anda melihat hubungan Indonesia-Perancis?

Hubungan bilateral memang sudah berlangsung selama 70 tahun. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia menjadi salah satu partner prioritas di kawasan Asia. Mengapa? Karena secara ekonomi, Indonesia masuk dalam mitra besar di Asia Tenggara.

Sektor ekonomi di Indonesia bisa dibilang bertumbuh, pasar sangat besar apalagi setelah Presiden Joko Widodo melakukan reformasi modern infrastruktur. Ini sangat penting. Ada perusahaan Prancis juga ambil bagian di sana.

Selain itu, Indonesia juga menjadi bagian negara Indo-Pasific, ada strategi dari Presiden Emmanuel Macron. Indonesia masuk dalam bagian dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kami memiliki pangkalan militer, kami juga menempatkan kekuatan untuk memperkuat Indo-Pasific dan dunia. Apalagi ini adalah wilayah strategis, jadi harus dilindungi.

Kemudian negara Indonesia memiliki kekuatan besar di dunia, khususnya di sektor kehutanan. Sehingga penting untuk memiliki hubungan ilmiah, kami memiliki beberapa lembaga di Indonesia, seperti perusahaan produksi makanan, dan universitas. Jadi negara Indonesia adalah mitra yang penting.

Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan?

Untuk mengembangkan hubungan ini, tentu saja tidak hanya pemerintah ke pemerintah saja. Kami sedang melakukan banyak hal untuk meningkatkan kemitraan dari berbagai sektor, baik dari pendidikan sampai dengan bisnis.

Misalnya dari sektor pendidikan, kami mencoba untuk membantu adanya pertukaran pelajar Indonesia dengan Prancis. Lebih dari 530 pelajar akan pergi ke Prancis. Di sana siswa dapat belajar mengenai manajemen perusahaan tanpa kendala Bahasa Prancis.

Dari segi bisnis, perusahaan-perusahaan besar sudah hadir di Indonesia. Kami sudah memiliki sekitar 200 perusahaan, baik perusahaan skala kecil atapun menengah di pasar Indonesia, dan mempekerjakan kurang lebih 50.000 pekerja Indonesia.

Potensi sangat besar. Investasi terbesar dari perusahaan minyak seperti PT Pertamina. Ini menjadi salah satu contoh hubungan dekat dengan investor Indonesia. Pemerintah Indonesia membutuhkan reformasi untuk menarik lebih banyak investor, karena investasi Indonesia bisa dibilang belum besar. Tetapi kami memiliki margin peningkatan yang besar. Kami sedang mengusahakan itu.

Selain itu, Indonesia juga berusaha untuk mencari kemungkinan pasar baru di Afrika. Menurut saya Indonesia masih memiliki banyak peluang.

Bagaimana persepsi investor Prancis untuk berinvestasi di Indonesia?

Bagi investor, sangat penting untuk memiliki regulasi yang lebih baik untuk iklim investasi. Pemerintah Indonesia sangat penting untuk membuat regulasi menguntungkan dan stabil dan saat ini menuju ke arah itu.

Selama ini, investasi Prancis di Indonesia harus melalui Singapura terlebih dahulu dengan pertimbangan tentu saja bisnis di Singapura lebih mudah.

> **“Kami sedang melakukan banyak hal untuk meningkatkan kemitraan dari berbagai sektor, dari pendidikan sampai dengan bisnis.**

Tujuan kami adalah untuk menjadi bagian yang baik dari bisnis di Indonesia.

Saya pikir reformasi Presiden Jokowi penting, jika melihat hubungan investasi komersial, saya pikir Indonesia lebih besar potensinya daripada yang mereka [investor Prancis] lihat.

Seperti apa peluang di sektor pariwisata?

Indonesia tidak cukup dikenal di Eropa. Orang-orang sebenarnya sudah simpatik dengan Bali Baru. Tetapi kita harus bekerja lebih untuk memberikan pengetahuan lebih terkait dengan Indonesia. Duta Besar Indonesia [di Prancis] juga melakukan yang sama.

Kami memiliki kurang dari 300.000 turis Prancis di Indonesia setiap tahun. Wisatawan itu sangat menarik bagi Indonesia karena mereka tidak hanya pergi ke Bali, tetapi di seluruh Indonesia. Apalagi, Indonesia mengembangkan pariwisata Bali Baru. Turis sangat ingin tahu dan mereka ingin pergi ke banyak tempat.

Harapan Anda dalam hubungan bilateral dengan Indonesia?

Saya pikir, kita harus mencoba untuk mempererat hubungan dengan meningkatkan kunjungan wisatawan. Jadi tujuannya adalah untuk mentransformasikan hubungan yang baik menjadi yang lebih baik.

Membuat hubungan lebih erat tentu saja baik dari sektor ekonomi, politik, dan budaya agar menjadi tahan lama.

Apakah Anda memiliki tokoh panutan?

Tidak ada yang spesifik, kehidupan sehari-hari saya banyak dipengaruhi oleh banyak tokoh baik seniman, penulis ataupun koki. Tapi saya suka membaca buku sastrawan Indonesia, Eka Kurniawan.

Hobi Anda?

Saya sudah lama menyukai memasak. Saya sangat senang Indonesia memiliki berbagai macam jenis makanan, Jadi negara ini banyak memberikan pengalaman memasak yang sangat spesial.

Pewawancara: Asteria Desi/ Stefanus Arief Setiaji

Bisnis/Himawan L. Nugraha

Business France, Jembatan Investasi Prancis

Stefanus Arief Setiaji
arief.setiaji@bisnis.com

Prancis terus melakukan upaya untuk menarik investasi dari luar negeri ke negara itu, termasuk investor Indonesia yang berniat menanamkan modalnya.

Dalam 3 tahun terakhir, Prancis menyebut bahwa daya tarik investasi asing ke negara itu meningkat. Sejumlah langkah dilakukan, salah satunya dengan membangun tim khusus untuk menjembatani minat investasi melalui Business France.

Saat menerima wawancara dari *Bisnis Indonesia*, Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard mengatakan bahwa Business France menjadi bagian dari upaya negara itu meningkatkan kemitraan ekonomi.

Melalui Business France, investor dapat menggali potensi investasi apa saja yang menarik di Prancis, termasuk memberikan informasi mengenai fasilitas pendanaan perbankan yang dapat diakses oleh calon investor.

Demikian pula sebaliknya, investor Prancis dapat menjajaki kemungkinan peluang investasi di Indonesia.

Dari informasi yang disampaikan, Prancis saat ini menjadi satu negara di benua Eropa yang menarik untuk dijadikan tempat penanaman modal, khususnya di sektor manufaktur.

Prancis disebut memiliki keunggulan di antaranya jumlah penduduk sebanyak 65 juta jiwa yang masuk sebagai terbesar kedua di benua Eropa.

Lalu, ongkos tenaga kerja yang kompetitif bahkan di sebut lebih lebih rendah dibandingkan dengan Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman.

Hal lain adalah iklim bisnis dan biaya operasional di negara itu disebut lebih kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di Eropa.

Prancis juga dikenal memiliki riset dan inovasi yang cukup baik. Data World Intellectual Property Organization (WIPO), negara itu menempati peringkat ke-6 di dunia untuk jumlah paten internasional yang diajukan.

Sejumlah rencana reformasi untuk meningkatkan ekonomi juga dilakukan oleh Pemerintah Prancis di antaranya dengan mengurangi pajak perusahaan dari 33,33% menjadi 25% pada 2022. Lalu, penerapan pajak tunggal, dan fleksibilitas tenaga kerja.

Pemerintah setempat juga berupaya meningkatkan partisipasi investasi publik untuk meningkatkan daya saing hingga 2022.

| PROSPEK SEKTORAL |

AWAN MENDUNG EMITEN BATU BARA

Bisnis, JAKARTA — Di tengah risiko volatilitas harga dan penurunan permintaan akibat ekonomi global yang loyo tersengat virus corona, emiten pertambangan batu bara harus mencari akal untuk memacu penjualan pada 2020.

Finna U. Ulfah
finna.ulfah@bisnis.com

Becermin dari realisasi kinerja 2019, mayoritas emiten batu bara membukukan penurunan laba bersih. Hal itu sejalan dengan harga batu bara yang melandai dari US$90-US$110 per ton pada 2018 ke kisaran US$70-80 per ton pada tahun lalu.

Tiga emiten yang labanya paling anjlok pada 2019, ialah PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) yang turun 96,89% *year-on-year* menjadi US$6,84 juta, PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) turun 55,89% yoy menjadi US$30,46 juta, dan PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) turun 55,36% yoy menjadi US$223,39 juta.

Awan mendung di sektor pertambangan batu bara diproyeksi berlanjut pada 2020. Salah satu yang paling diwaspadai para penambang ialah harga batu bara yang bergerak turun.

Hingga perdagangan Selasa (31/3), harga batu bara Newcastle untuk kontrak April 2020 melemah 0,85% ke level US$68,4 per ton. Padahal, pada perdagangan pekan lalu, batu bara sempat kembali menguat dan bergerak di kisaran US$70 per ton.

Direktur Keuangan PT Toba Bara Sejahtra Tbk. Pandu Sjahrir mengatakan situasi harga batu bara yang tidak menentu berimbas terhadap penghasilan emiten berkode saham TOBA itu. Pada 2020, TOBA berencana memproduksi 5 juta ton batu bara kalori 5.600-5.900.

"Dari total target penjualan pada tahun ini, TOBA sebagian besar sudah memiliki kontrak *fixed price*," kata Pandu kepada *Bisnis*, Kamis (2/4).

Selain risiko volatilitas harga, komoditas batu bara juga dibayangi oleh pandemi virus corona yang menghantam perekonomian global. Bahkan dua negara pengimpor terbesar, yaitu China dan India menerapkan *lockdown*.

Direktur & Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava mengatakan sejauh ini produksi dan penjualan berjalan normal.

Emiten bersandi saham BUMI itu menjual 14,2 juta ton batu bara pada Januari-Februari 2020, naik 7,8% secara tahunan. Pada 2020, BUMI membidik produksi batu bara sekitar 91 juta ton, naik 5% dari realisasi 2019 sebanyak 87 juta ton.

"Kami akan menjaga kinerja ini hingga Maret bahkan hingga April jika itu memungkinkan. Tetapi kami akan tetap mengkaji ulang dampak pandemi terhadap kinerja, dan akan menyesuaikan target dan panduan jika diperlukan," ujar Dileep kepada *Bisnis*.

STRATEGI PEMASARAN

Sementara itu, Investor Relations PT United Tractors Tbk. Ari Setiyawan mengatakan bahwa saat ini perseroan tengah mengkaji strategi penjualan batu bara yang akan lebih optimal untuk mendatangkan profit di tengah kondisi makro saat ini. Dalam 2 bulan pertama 2020, volume penjualan batu bara UNTR naik 13,4% yoy menjadi 1,87 juta ton.

"Kami sedang *review* apakah jual dengan kontrak atau jual di *spot*, mana yang paling optimal. Kondisinya bisa berubah, misalnya kalau proyeksi ke depan harga batu bara meningkat tentu lebih menguntungkan jual di *spot*, dan sebaliknya kalau ke depan proyeksinya turun, lebih menguntungkan melalui mekanisme kontrak," papar Ari kepada *Bisnis*.

Adapun, Direktur Utama PT Harum Energy Tbk. Ray Gunara menegaskan pihaknya selalu mempertimbangkan dinamika pasar batu bara dan keseimbangan margin operasi. Emiten berkode saham HRUM itu menargetkan produksi batu bara sekitar 4 juta ton, naik sekitar 5%-10% dari realisasi pada 2019.

Analis Samuel Sekuritas Indonesia Dessy Lapagu mengatakan bahwa sepanjang kuartal pertama tahun ini pihaknya belum melihat adanya penurunan volume permintaan secara signifikan. Namun, emiten batu bara harus lebih berhati-hati pada kuartal II/2020.
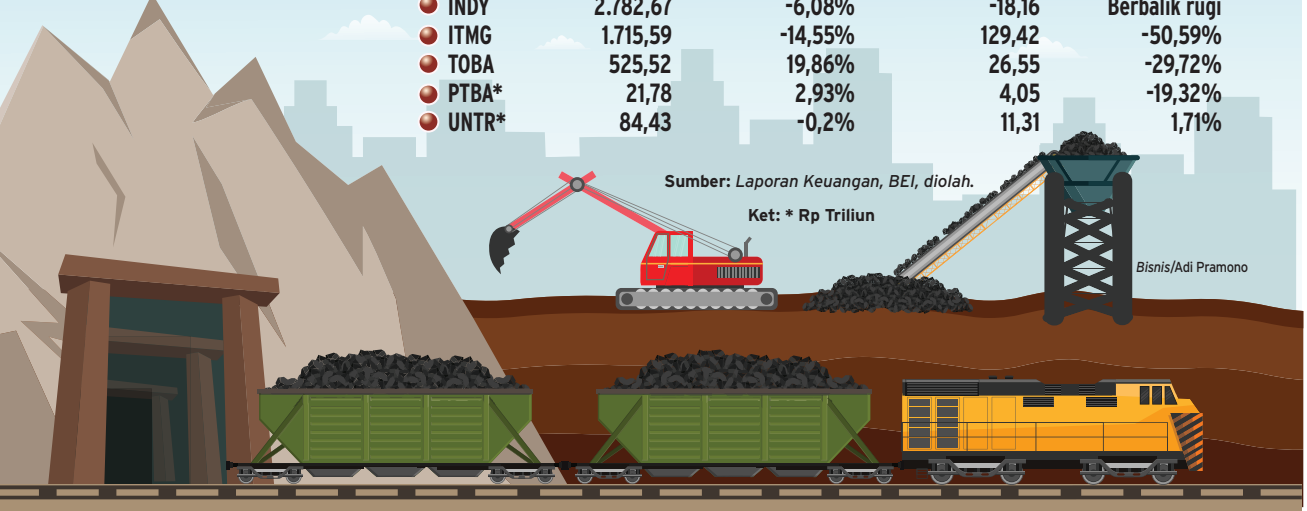
Melihat sinyal kenaikan harga batu bara dalam beberapa perdagangan terakhir, Dessy optimistis harga batu bara global mampu stabil hingga akhir tahun ini.

"Secara jangka pendek, sepanjang pandemi masih berjalan dengan negara-negara produsen dan konsumen terbesar batu bara, yaitu China, India, dan beberapa negara Asia Tenggara masih dalam kondisi waspada, maka harga masih akan fluktuatif," ujarnya.

Dessy masih cenderung netral untuk sektor batu bara. Namun, dia tetap merekomendasikan beli saham emiten dengan *dividend yield* tinggi, seperti ITMG dan PTBA. **(Pandu Gumilar)**

Kode Saham	Pendapatan 2019	Perubahan yoy	Laba Bersih 2019	Perubahan yoy
ADRO	3.457,15	-4,49%	404,19	-3,24%
BSSR	418,08	-5,72%	30,46	-55,89%
BUMI	1.112,56	0,07%	6,84	-96,89%
BYAN	1.391,58	-17,01%	223,39	-55,36%
DSSA	1.666,41	-5,79%	50,22	-43,79%
GEMS	1.107,46	5,97%	65,4	-33,79%
HRUM	262,59	-22,01%	18,5	-41,82%
INDY	2.782,67	-6,08%	-18,16	Berbalik rugi
ITMG	1.715,59	-14,55%	129,42	-50,59%
TOBA	525,52	19,86%	26,55	-29,72%
PTBA*	21,78	2,93%	4,05	-19,32%
UNTR*	84,43	-0,2%	11,31	1,71%

Sumber: *Laporan Keuangan, BEI, diolah.*
Ket: * Rp Triliun

Bisnis/Adi Pramono

| KINERJA INDEKS SEKTORAL |

BARANG KONSUMSI TETAP DICARI

Bisnis, JAKARTA — Kinerja saham-saham barang konsumsi di tengah pandemi menjadi yang paling minim koreksinya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Namun, potensi penurunan daya beli patut diwaspadai.

Dhiany Nadya Utami
dhiany.utami@bisnis.com

Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia, kinerja Indeks Sektor Barang Konsumsi turun -19,17% sepanjang Q1/2020. Di posisi kedua ada Indeks Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang terkoreksi -21,77%, diikuti Indeks Sektor Pertambangan (-23,54%), Indeks Sektor Finansial (26,94%), dan Indeks Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi (29,20%).

Adapun yang paling tertekan adalah Indeks Sektor Industri Dasar dan Kimia dengan penurunan selama triwulan pertama mencapai -40,68%.

Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan cerminan kinerja sektoral sepanjang kuartal pertama memang relevan mengingat situasi mengarah ke krisis yang terjadi sekarang.

"*Consumers goods as predicted*, yaitu sektor yang paling defensif alias yang mampu bertahan saat resesi dan krisis tetapi tidak bisa *grow* tinggi juga saat ekonomi *booming*," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (1/4).

Adapun untuk sektor industri dasar dan kimia yang menjadi sektor yang paling terkoreksi, Budi menyebut terhambatnya impor bahan baku, melonjaknya nilai tukar, dan logistik ekspor yang belum normal menjadi sentimen penekan.

Senada, Kepala Riset PT Samuel Sekuritas Suria Dharma mengatakan adanya pandemi virus corona dan imbauan untuk berkegiatan dari rumah menyebabkan konsumsi barang masyarakat meningkat, kemungkinan menjadi salah satu sentimen positif yang menyokong kinerja sektor barang konsumsi.

"Itu sepertinya yang membuat sektor konsumer lebih positif walaupun kita belum tahu [bagaimana dampaknya] karena datanya [laporan keuangan] belum keluar, tapi itu sektor yang defensif dalam kondisi sekarang," ujarnya.

Suria menilai kondisi ini tak bisa digeneralisasi dan dilihat secara sektoral saja melainkan harus dicermati kinerja masing-masing emiten karena hanya beberapa saja mencatatkan kinerja positif.

Berdasarkan data *Bloomberg*, saham PT Siantar Top Tbk. (STTP) menjadi penopang untuk sektor barang konsumsi dengan kenaikan 44,44% sepanjang Q1/2020. Ada pula saham ITIC (40,38%), INAF (24,14%) dan KAEF (4,80%).

Kehadiran dua emiten farmasi pelat merah ini tak mengherankan karena keduanya adalah produsen produk kesehatan serta obat dan vitamin yang kini banyak diburu oleh masyarakat.

Selain itu, Indofarma juga menjadi salah satu perusahaan yang bertanggung jawab akan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 di Indonesia, seperti impor 100.000 paket *rapid test* dari China dan Korea.

Di sisi lain, emiten farmasi anggota LQ45, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), malah masuk dalam kelompok yang menjadi penekan kinerja sektor. Saham KLBF tercatat anjlok -19,87% sepanjang Q1/2020.

Anggota LQ45 yang ikut jadi penekan sektor sepanjang kuartal pertama antara lain UNVR (-13,96%), HMSP (-32,14%), GGRM (-22,45%), INDF (-19,87%), dan ICBP (-8,30%).

KUARTAL KEDUA

Kepala Riset PT Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menyebut saat ini terjadi kondisi yang tak biasa, baik di Indonesia maupun di dunia, sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kondisi ini juga membuat pola anomali terjadi di pasar. "Kami dari kalangan analis juga kesulitan untuk menggambarkan," ujar Alfred.

Kuartal kedua tahun ini, kemungkinan besar akan berbeda dengan pola tahun sebelumnya. Salah satunya karena ada potensi pelaku pasar melewatkan momentum Ramadan dan Lebaran 2020. Jika pandemi ini masih berlangsung tentu pola belanja masyarakat tak akan sama.

Di sisi lain, jika kondisi seperti saat ini masih berlangsung dalam menengah, beberapa subsektor diperkirakan akan mengalami penguatan kinerja pada kuartal kedua, antara lain telekomunikasi dan rumah sakit.

Bertahan di Saat Krisis

Analis menyebut saham sektor barang konsumsi adalah sektor yang paling defensif alias yang mampu bertahan saat resesi dan krisis, walaupun tidak bisa tumbuh tinggi juga saat ekonomi *booming*. Pandemi virus corona dan imbauan untuk berkegiatan dari rumah menyebabkan konsumsi barang masyarakat meningkat, kemungkinan menjadi salah satu sentimen positif yang menyokong kinerja sektor konsumer. Data PT Bursa Efek Indonesia menunjukkan kinerja sektor konsumer turun paling kecil dibandingkan dengan indeks sektor lain.

Kinerja Indeks Sektoral Kuartal I/2020

Sektor	Perubahan	Posisi 31 Maret
Indeks Sektor Industri Barang Konsumsi	-19,17%	1659,14
Indeks Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi	-21,77%	602,27
Indeks Sektor Pertambangan	-23,54%	1184,09
Indeks Sektor Keuangan	-26,94%	989,67
Indeks Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	-29,20%	805,43
Indeks Sektor Manufaktur	-29,52%	1.027,10
Indeks Sektor Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan	-32,84%	338,41
Indeks Sektor Pertanian	-39,10%	928,46
Indeks Sektor Aneka Industri	-40,10%	733,03
Indeks Sektor Industri Dasar dan Kimia	-40,68%	580,26

Sumber: *Bursa Efek Indonesia* Bisnis/Petricia Cahya Pratiwi

| KETENTUAN MKBD |

BEI Siapkan Relaksasi untuk Anggota Bursa

Bisnis, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia tengah memantau kinerja dan menyiapkan relaksasi bagi para anggota bursa yang memiliki rata-rata modal kerja bersih disesuaikan di bawah Rp30 miliar atau mendekati batas minimum yang dipersyaratkan.

Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) sekuritas penjamin emisi (*underwriter*) dan perantara pedagang (*broker*) minimal sebesar Rp25 miliar atau 6,25% atau 1/16 dari kewajiban terperingkat perusahaan.

Dari data yang dihimpun *Bisnis* terdapat 21 sekuritas anggota bursa (AB) yang saat ini memiliki rata-rata MKBD di bawah Rp30 miliar hingga Kamis (2/4) pukul 15.15 WIB.

Direktur Perdagangan dan Penilaian Anggota Bursa Bursa Efek Indonesia (BEI) Laksono Widodo mengatakan saat ini otoritas masih memantau AB yang memiliki MKBD mendekati batas minimum yang dipersyaratkan. Pihaknya juga menyiapkan relaksasi yang akan dikeluarkan untuk menjaga kinerja sekuritas di tengah kondisi volatilitas pasar akibat penyebaran COVID-19.

"Nanti akan ada relaksasi yang akan diumumkan pada saatnya," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (2/4).

Laksono menyebut BEI sebelumnya telah mengeluarkan relaksasi berupa pelonggaran aturan *haircut* saham anggota indeks LQ45 dan non-LQ45. Menurutnya, kebijakan itu akan membantu sekuritas. "Supaya mereka bisa *trading* tanpa MKBD-nya menyentuh batas minimum," jelasnya.

Direktur CSA Institute Aria Santoso mengatakan relaksasi diberikan sebagai salah satu upaya stimulus untuk memperbesar kapasitas transaksi. Namun, relaksasi harus memperhatikan juga pengelolaan risiko sehingga tidak mudah untuk melakukan pelonggaran aturan.

"Salah satu stimulus yang paling rendah risiko adalah fasilitas atau anggaran dari BEI kepada para AB untuk mencari investor baru, baik itu melalui edukasi publik, penerbitan material sosialisasi, dan upaya sejenis sehingga akan menambah dana investasi baru untuk melakukan transaksi. Pada akhirnya, manfaat dari stimulus ini juga akan kembali kepada peningkatan total transaksi harian," paparnya.

Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menyarankan agar beberapa perusahan sekuritas kecil melakukan merger. *(M. Nurhadi Pratomo)*

| PROYEKSI KEUANGAN |

Rugi GIAA Karena Corona

Bisnis, JAKARTA — Maskapai nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. diprediksi merugi hingga US$106,6 juta pada tahun ini karena dampak penyebaran wabah virus corona baru atau COVID-19.

Analis PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Lee Young Jun mengatakan pada mulanya pembatasan rute penerbangan karena penyebaran virus corona tidak terlalu berdampak terhadap perseroan karena rute yang ditutup bukanlah rute yang menguntungkan.

Namun, sejalan dengan peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah kemudian menutup pintu masuk bagi WNA ke Indonesia. Hal ini diperkirakan akan berdampak cukup besar terhadap permintaan untuk beberapa bulan ke depan.

Dia memperkirakan kinerja rute penerbangan domestik maupun internasional akan tetap lemah sepanjang penyebaran virus ini masih meraja lela. Jika wabah ini telah usai pun, permintaan di industri penerbangan bahkan diperkirakan masih rendah karena masyarakat masih berhati-hati untuk bepergian.

Salah satu dampak jangka pendek yang akan sangat terasa oleh Garuda Indonesia adalah berkurangnya pendapatan karena pelarangan umrah, dan kemungkinan ibadah haji. Akan tetapi, di sisi lain, perseroan akan sedikit diuntungkan karena penurunan harga minyak dunia yang akan berdampak terhadap *cost of good sold* (COGS) perseroan.

Dampak penurunan aktivitas penerbangan sudah mulai terlihat dari utilisasi kapasitas rute penerbangan internasional yang hanya mencapai 50%—60% dari kapasitas yang dimiliki. Sementara itu, untuk penerbangan domestik, perseroan sudah menurunkan utilisasinya hingga 15%—20%.

Dengan proyeksi tersebut, Jun memperkirakan perseroan akan merugi sekitar US106,6 juta pada tahun ini. Proyeksi ini berubah drastis dari sebelumnya dipediksi laba US$128,4 juta.

Mirae juga mengoreksi prediksi laba GIAA pada tahun depan (2021) dari US$139,6 juta menjadi US$119,9 juta. *(Ilman A. Sudarwan)*

PT KALBE FARMA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA

Kantor Pusat : Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, Telp : (021) 42873888, Fax : (021) 42873678
Pabrik : Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Telp : (021) 89907333, Fax : (021) 89907360
Website : www.kalbe.co.id

KALBE

"The Scientific Pursuit of Health for A Better Life"

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Nilai Nominal Saham dan Lembar Saham)

ASET	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	3.040.487.104	3.153.327.558
Piutang usaha		
Pihak ketiga, neto	3.531.177.696	3.230.855.504
Pihak berelasi	41.677.083	24.689.355
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	122.554.254	116.632.910
Pihak berelasi	2.251.088	1.391.500
Aset keuangan lancar lainnya	195.618.535	178.719.216
Persediaan, neto	3.737.976.008	3.474.587.232
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	147.588.078	123.737.715
Biaya dibayar di muka	85.488.760	62.218.080
Aset lancar lainnya	317.672.372	282.129.316
Total Aset Lancar	11.222.490.978	10.648.288.386
ASET TIDAK LANCAR		
Aset keuangan tidak lancar lainnya	63.126.950	63.304.700
Investasi pada entitas asosiasi	27.936.767	22.801.731
Aset pajak tangguhan, neto	123.162.297	131.100.220
Tagihan restitusi pajak	52.685.482	54.345.382
Aset tetap, neto	7.666.314.693	6.252.801.151
Aset takberwujud, neto	662.553.056	433.440.698
Aset tidak lancar lainnya	446.456.639	540.123.877
Total Aset Tidak Lancar	9.042.235.884	7.497.917.759
TOTAL ASET	**20.264.726.862**	**18.146.206.145**

LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2019	31 Desember 2018
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	149.638.247	69.154.654
Utang usaha		
Pihak ketiga	1.118.954.747	1.214.689.608
Pihak berelasi	96.905.675	75.208.161
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	496.089.024	409.642.234
Pihak berelasi	21.080	-
Beban akrual	415.650.165	259.860.294
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	53.813.904	41.239.786
Utang pajak	226.517.164	188.121.544
Bagian jangka pendek dari:		
Utang bank	19.424.286	27.102.573
Utang sewa pembiayaan	94.513	1.148.618
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.577.108.805	2.286.167.472
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi dengan bagian jangka pendek:		
Utang bank	647.647.476	259.831.249
Utang sewa pembiayaan	40.869	170.594
Liabilitas pajak tangguhan, neto	241.581	129.249
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	334.105.655	291.592.785
Utang lain-lain jangka panjang		
Pihak ketiga	-	13.720.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	982.035.581	565.443.877
TOTAL LIABILITAS	**3.559.144.386**	**2.851.611.349**
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham		
Modal dasar - 85.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 46.875.122.110 saham	468.751.221	468.751.221
Tambahan modal disetor, neto	(34.118.674)	(34.118.674)
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali	52.932.836	46.967.626
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	225.961.421	201.390.130
Belum ditentukan penggunaannya	15.135.159.090	13.871.718.983
Penghasilan komprehensif lain		
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	57.824.662	71.460.323
Laba belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, neto	56.006.158	42.056.396
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	(69.390.323)	(44.768.029)
Sub-total	**15.893.126.391**	**14.623.457.976**
Kepentingan Non-pengendali	**812.456.085**	**671.136.820**
Total Ekuitas	**16.705.582.476**	**15.294.594.796**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**20.264.726.862**	**18.146.206.145**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Laba Per Saham)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PENJUALAN NETO	**22.633.476.361**	**21.074.306.186**
BEBAN POKOK PENJUALAN	**(12.390.008.590)**	**(11.226.380.392)**
LABA BRUTO	**10.243.467.771**	**9.847.925.794**
Beban penjualan	(5.358.032.619)	(5.199.866.626)
Beban umum dan administrasi	(1.288.558.008)	(1.191.705.459)
Beban penelitian dan pengembangan	(286.654.521)	(243.606.080)
Pendapatan operasi lainnya	66.253.835	75.482.640
Beban operasi lainnya	(76.512.416)	(75.205.073)
Penghasilan bunga	137.938.018	125.786.575
Beban bunga dan keuangan	(40.420.271)	(29.738.267)
Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi	5.135.036	(2.673.835)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**3.402.616.825**	**3.306.399.669**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN, Neto	**(865.015.001)**	**(809.137.704)**
LABA TAHUN BERJALAN	**2.537.601.824**	**2.497.261.965**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	(34.219.335)	50.950.562
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Laba belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, neto	15.174.680	6.021.165
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(13.635.661)	10.588.833
Pajak penghasilan terkait	8.320.895	(12.115.579)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak	**(24.359.421)**	**55.444.981**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.513.242.403**	**2.552.706.946**
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik entitas induk	2.506.764.572	2.457.129.032
Kepentingan non-pengendali	30.837.252	40.132.933
Total	**2.537.601.824**	**2.497.261.965**
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
Pemilik entitas induk	2.482.456.110	2.510.650.879
Kepentingan non-pengendali	30.786.293	42.056.067
Total	**2.513.242.403**	**2.552.706.946**
Laba per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**53,48**	**52,42**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	24.423.134.030	22.705.216.596
Pembayaran kas ke pemasok	(12.316.355.977)	(10.798.828.010)
Pembayaran kas ke karyawan	(2.730.058.463)	(2.606.118.248)
Kas yang dihasilkan dari operasi	9.376.719.590	9.300.270.338
Penerimaan tagihan restitusi pajak	20.914.275	2.959.086
Pembayaran pajak penghasilan	(839.509.478)	(838.106.814)
Pembayaran untuk beban operasi lainnya, neto	(6.055.155.565)	(5.694.346.660)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**2.502.968.822**	**2.770.775.950**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan penghasilan bunga	111.461.387	101.595.724
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	13.144.103	16.351.037
Penjualan saham Entitas Anak ke pihak ketiga	1.997.000	-
Penerimaan dividen kas	262.500	210.000
Pencairan aset keuangan lancar lainnya	338	14.422.877
Perolehan aset tetap	(1.733.322.992)	(1.307.327.219)
Perolehan aset takberwujud	(249.603.540)	(65.704.190)
Perolehan saham Entitas Anak dari pihak ketiga	(34.848.000)	-
Pemberian pinjaman pada entitas asosiasi	(7.500.000)	(6.500.000)
Penempatan aset keuangan tidak lancar lainnya	(2.132.250)	(9.603.700)
Pembayaran sewa tanah	-	(33.273.045)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(1.900.541.454)**	**(1.289.828.516)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang bank jangka panjang	507.000.000	143.000.000
Penerimaan setoran modal saham dari kepentingan non-pengendali entitas anak	169.988.000	38.717.000
Penerimaan utang bank jangka pendek	95.525.769	410.975.745
Pembayaran dividen kas:		
Perusahaan	(1.218.753.175)	(1.171.878.053)
Entitas anak	(34.111.006)	(18.739.213)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(126.862.060)	(3.071.336)
Pembayaran utang bank jangka pendek	(58.525.769)	(510.975.745)
Pembayaran beban bunga	(40.013.951)	(29.593.428)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(1.163.092)	(2.012.696)
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga	-	3.920.000
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(706.915.284)**	**(1.139.657.726)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(104.487.916)**	**341.289.708**
Pengaruh Neto Perubahan Kurs pada Kas dan Setara Kas yang Didenominasi dalam Mata Uang Asing	(51.836.131)	26.951.993
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**3.149.172.904**	**2.780.931.203**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN *	**2.992.848.857**	**3.149.172.904**
* Komposisi kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas dan setara kas	3.040.487.104	3.153.327.558
Cerukan	(47.638.247)	(4.154.654)
Neto	**2.992.848.857**	**3.149.172.904**

Catatan:

1. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Kalbe Farma Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret 2020 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
2. Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama tahun berjalan.
3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp13.901 untuk setiap 1 Dolar A.S.

Jakarta, 3 April 2020

DIREKSI
PT KALBE FARMA Tbk.

MAESTRO 90 Adv.

PENGUMUMAN PENUNDAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUANA FINANCE Tbk ("Perseroan")

Merujuk kepada iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana telah diumumkan di Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 23 Maret 2020, Situs Web Bursa Efek, dan Situs Web Perseroan dan sehubungan dengan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Nomor SP 16/DHMS/OJK/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri Jasa Keuangan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan bahwa RUPST Perseroan yang semula akan diselenggarakan pada hari Rabu, 29 April 2020 ditunda pelaksanaannya sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk dapat dimaklumi.

Jakarta, 3 April 2020
PT BUANA FINANCE Tbk
Direksi

| PENGENAAN PAJAK DIGITAL |

POTENSI PENERIMAAN MAKIN BESAR

Bisnis, JAKARTA — Potensi penerimaan pajak dari transaksi digital atau perdagangan melalui sistem elektronik makin besar sejalan dengan banyaknya masyarakat di Tanah Air yang menjalankan *work from home* untuk memangkas rantai penyebaran Covid-19.

Muhamad Wildan
redaksi@bisnis.com

Atas dasar itulah pemerintah bakal mengimplementasikan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan dasar hukum Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Melalui Perppu itu, pemerintah mengadopsi pasal pengenaan pajak atas PMSE dalam *Omnibus Law* Perpajakan dan berencana untuk mengenakan pajak Pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud serta jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean.

Selain itu juga mengadopsi pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) bagi subjek pajak luar negeri yang memenuhi *significant economic presence*.

Mengacu pada naskah akademik *Omnibus Law* Perpajakan, nilai transaksi digital di Tanah Air memang sangat besar. Pada 2017 misalnya, diperkirakan transaksi barang digital secara total mencapai Rp102,67 triliun. *(Lihat tabel)*

Dengan demikian, potensi penerimaan PPN dari transaksi tersebut bisa mencapai Rp10,26 triliun. Mengingat penggunaan layanan digital meningkat di tengah wabah Covid-19, potensi PPN dari PMSE berpotensi lebih tinggi dari nominal tersebut.

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan, akibat Covid-19 aktivitas perekonomian bergeser ke digital sehingga secara otomatis penggunaan penyelenggara PMSE luar negeri juga meningkat.

"Seharusnya ini juga selaras dengan kepatuhan dan pembayaran pajak kepada Indonesia sebagai negara pasar," kata Bawono kepada *Bisnis*, Rabu (1/4).

Menurutnya, pajak dari kegiatan pelaku usaha PMSE luar negeri ini bisa menjadi sumber baru di tengah prospek penerimaan pajak yang melemah.

Selama ini, pengenaan pajak atas pelaku-pelaku luar negeri tersebut belum optimal karena kendala pada ketentuan perpajakan di dalam negeri.

Bawono menambahkan, Perpu No. 1/2020 masih mengupayakan pengenaan pengenaan PPh, sedangkan PTE baru dikenakan apabila pengenaan PPh tidak memungkinkan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, pengenaan pajak atas PMSE ini cukup beralasan sejalan dengan meingkatnya pemanfaatan platform digital di tengah pandemi virus corona.

"Meski demikian, di tatatan implementasi perlu dipikirkan mekanisme yang efektif dan keselarasan dengan *global framework* OECD [The Organisation for Economic Cooperation and Development] yang akan dituntaskan," ujar Yustinus.

KEBERATAN

Sementara itu, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sudah siap dengan dinamika yang muncul apabila ada negara mitra yang keberatan dengan pengenaan pajak digital ini.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan, sengketa pajak lazimnya bisa diselesaikan melalui *mutual agreement procedure* (MAP), terutama dengan negara yang sudah terjalin perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia.

"Indonesia sudah berpengalaman menangani sengketa pajak baik *transfer pricing* maupun tidak melalui MAP dengan banyak negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, China, Belanda, Belgia, Amerika Serikat, dan Singapura," jelas John kepada *Bisnis*.

Adapun munculnya klausul mengenai pengenaan pajak atas PMSE bertujuan untuk memberikan perlakuan yang sama antara pelaku usaha PMSE lokal maupun asing serta menghasilkan tambahan penerimaan pajak.

"Perlakuan pajak atas PMSE ini mulai berlaku sejak diumumkan dan berikutnya akan diikuti dengan aturan pelaksanannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan," kata John.

BARANG DIGITAL

Secara praktis, saat ini barang digital telah masuk ke dalam daerah pabean dan dimanfaatkan, dipakai, serta dimiliki atau dikuasai oleh penduduk di dalam negeri.

Beberapa jenis barang yang termasuk dalam definisi barang digital beserta bentuk transaksi, pengiriman, dan perkiraan nilai transaksi dapat dilihat di bawah ini.

Bentuk dan Nilai Transaksi Digital

Type of Goods	Conventional/Now		Now/Future		Valuation in 2017
	Shipment	Transaction	Sale	Transaction	(Rp triliun)
Software System and Aplication	Recording Media	Express Consigment	Online Retail Marketplace	Online/Commercial	14,06
Game, Video, Music	Recording Media	Express Consigment	Online Retail Marketplace	Online/Commercial	0,88
Film Cinema	Recording Media	Express Consigment/Import Home Use	Online Retail	Bank	7,65
Software Specialis (engineering, design, etc)	Recording Media + Manual Installment	Express Consigment/Imported Together Woth The Hardware	Online Retail/ Special Subcription	Online/ Bank Instrument	1,77
Handphone Software	In Gadget	Express Consigment/Import Home Use	Imported Separately/ Electronic Transmission	Online	44,75
Pay TV/Broadcast Rights	Satelit	Bank Instrument	Internet Satelite	Bank Instrument/Commercial	16,49
Fas OTT and Social Media	Recording Media	Express Consigment/Import Home Use	Special Subcription	Online/Commercial	17,07

Sumber: *Naskah Akademik Omnibus Law Perpajakan, Kemenkeu, diolah.*

BISNIS/TRI UTOMO

150 SAHAM KAPITALISASI PASAR TERBESAR BEI, 2 APRIL 2020

Kode	Nama Saham	Kurs Sbl	Kurs Ptp	▲/▼ (Poin)	Transaksi Volume	Transaksi Nilai	Kapitalisasi Pasar	PER 2020
BBCA	Bank Central Asia Tbk.	27.400	27.050	-350	27.324.700	739.233.410.000	660.248.840.295.000	23,67
BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2.930	2.870	-60	299.882.400	854.818.660.000	350.462.449.953.000	10,30
TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	3.100	3.130	30	92.893.600	286.311.122.000	310.064.737.958.000	14,13
UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	7.150	7.225	75	11.148.700	79.765.922.500	275.633.750.000.000	37,28
BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	4.610	4.750	140	66.112.600	304.093.511.000	219.449.999.990.500	7,99
HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.	1.415	1.535	120	52.103.500	78.130.708.500	178.548.248.041.500	13,13
ASII	Astra International Tbk.	3.770	3.930	160	39.717.300	153.604.050.000	159.100.363.840.200	7,33
ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10.150	10.200	50	7.811.800	79.235.367.500	118.951.461.600.000	22,96
TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	5.250	5.725	475	4.756.900	26.621.357.500	102.096.903.488.500	171,75
GGRM	Gudang Garam Tbk.	40.050	43.975	3.925	1.328.400	56.584.935.000	84.611.769.800.000	8,76
SMMA	Sinarmas Multiartha Tbk.	12.800	12.800	-	-	-	81.506.108.377.600	10,76
CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	4.750	4.890	140	7.307.300	35.058.151.000	80.186.220.000.000	23,45
POLL	Pollux Properti Indonesia Tbk	10.150	9.450	-700	488.700	4.677.370.000	78.612.883.020.000	1.589,76
BRPT	Barito Pacific Tbk	745	830	85	131.826.400	107.249.137.500	73.883.795.172.700	313,52
BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	3.680	3.850	170	58.984.400	218.335.028.000	71.079.354.088.050	4,45
UNTR	United Tractors Tbk.	16.625	16.900	275	3.412.000	57.204.132.500	63.039.283.798.400	5,47
KLBF	Kalbe Farma Tbk.	1.165	1.285	120	63.583.600	76.987.285.000	60.234.531.911.350	25,55
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	6.350	6.800	450	12.752.200	86.135.080.000	59.706.900.200.000	12,68
DNET	Indoritel Makmur Internasional Tbk	3.500	3.500	-	6.500	22.750.000	49.644.000.000.000	140,06
BYAN	Bayan Resources Tbk.	14.500	14.500	-	-	-	48.333.335.750.000	12,20
SMGR	Semen Indonesia Tbk	7.700	7.500	-200	7.011.900	52.551.605.000	44.486.400.000.000	25,77
MEGA	Bank Mega Tbk.	6.425	6.425	-	200	1.285.000	44.294.838.108.475	22,12
INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	12.175	11.825	-350	3.080.600	36.532.965.000	43.530.564.840.675	23,72
MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk.	6.400	6.400	-	-	-	43.290.154.195.200	42,53
MYOR	Mayora Indah Tbk.	1.830	1.810	-20	2.834.900	5.031.059.000	40.469.246.502.250	27,69
TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk	655	665	10	67.787.200	44.850.563.500	33.924.725.625.000	15,93
ADRO	Adaro Energy Tbk	1.020	1.040	20	29.924.200	30.700.806.500	33.265.400.480.000	5,48
AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	755	795	40	15.900	12.420.000	33.011.978.851.500	38,08
BNLI	Bank Permata Tbk.	1.010	1.060	50	6.974.800	7.306.448.500	29.428.050.521.780	19,61
MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	2.000	2.000	-	518.300	1.039.938.500	28.492.699.000.000	40,18
EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk	5.000	5.000	-	500	2.500.000	28.211.376.210.000	-22,04
TCPI	Transcoal Pacific Tbk	4.720	4.800	80	10.781.100	51.877.291.500	24.000.000.000.000	87,77
PTBA	Bukit Asam Tbk.	2.050	2.030	-20	23.837.600	48.227.412.500	23.386.938.277.500	5,66
INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	4.000	4.210	210	5.055.500	20.482.741.000	23.032.838.181.610	5,12
MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk	1.040	1.050	10	111.642.200	117.054.794.500	22.992.471.232.500	23,81
MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.	10.850	10.850	-	20.000	217.000.000	22.860.950.000.000	18,96
INCO	Vale Indonesia Tbk	2.030	2.210	180	10.698.500	23.093.406.000	21.959.308.571.200	7.262,57
EXCL	XL Axiata Tbk	1.950	2.050	100	10.830.400	21.658.674.500	21.947.325.686.500	30,75
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	1.290	1.230	-60	16.347.800	20.170.872.500	21.094.500.000.000	21,76
CASA	Capital Financial Indonesia Tbk	400	386	-14	515.400	198.944.000	21.027.829.775.612	171,21
TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk	895	880	-15	61.953.600	54.778.228.500	19.938.159.511.600	23,20
BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	2.110	2.010	-100	9.807.200	19.456.362.500	19.448.392.855.410	5,62
PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	735	800	65	176.088.600	136.653.030.000	19.393.206.556.800	7,95
JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	2.500	2.600	100	7.541.100	19.255.840.000	18.870.465.120.000	9,16
NISP	Bank OCBC NISP Tbk.	775	775	-	1.300	1.008.000	17.604.726.424.800	5,99
SIDO	Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk	1.105	1.170	65	5.643.700	6.564.722.500	17.550.000.000.000	21,73
FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.	7.025	7.025	-	-	-	17.407.168.728.675	17,97
PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk	690	690	-	2.079.100	1.428.057.500	16.447.975.738.620	5,17
ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	1.485	1.395	-90	662.700	928.235.000	16.117.171.560.000	14,84
PWON	Pakuwon Jati Tbk.	312	328	16	34.495.900	11.074.927.200	15.796.349.587.200	6,06
BTPN	Bank BTPN Tbk.	1.850	1.900	50	28.100	53.011.500	15.325.170.975.900	5,90
DSSA	Dian Swastika Sentosa Tbk	19.750	19.750	-	-	-	15.218.408.320.000	28,63
BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk	600	610	10	1.816.100	1.100.877.500	15.176.977.372.750	16,24
IPTV	MNC Vision Networks Tbk	394	406	12	5.851.500	2.351.557.400	15.077.260.513.434	69,10
MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk	15.850	15.850	-	300	4.755.000	15.028.874.900.000	26,79
GEMS	Golden Energy Mines Tbk	2.550	2.550	-	-	-	15.000.000.150.000	16,11
BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	1.985	1.920	-65	34.093.500	64.260.446.500	14.643.192.960.000	11,25
MNCN	Media Nusantara Citra Tbk	900	1.000	100	31.561.700	30.566.595.000	14.276.103.500.000	6,39
FREN	Smartfren Telecom Tbk	59	62	3	62.304.800	3.828.611.800	13.513.782.856.440	-6,11
TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	3.880	4.180	300	5.015.000	20.020.699.000	13.013.274.522.600	4,52
BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	650	645	-5	23.678.900	15.286.071.000	12.414.119.043.840	4,03
SCMA	Surya Citra Media Tbk.	755	795	40	16.416.300	12.699.110.000	11.745.864.479.295	8,74
LIFE	Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	5.500	5.500	-	-	-	11.550.000.000.000	32,87
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	920	965	45	10.649.700	10.024.021.000	11.316.145.068.965	6,41
MPRO	Maha Properti Indonesia Tbk	925	1.135	210	200	228.500	11.284.737.500.000	-470,14
IBST	Inti Bangun Sejahtera Tbk	8.300	8.300	-	-	-	11.212.510.894.100	95,04
BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk	139	148	9	596.000	86.101.800	11.152.900.218.828	7,23
TRIO	Trikomsel Oke Tbk	426	426	-	-	-	11.079.192.718.770	-205,27
ANTM	Aneka Tambang Tbk.	436	452	16	83.577.100	37.129.358.800	10.861.905.655.700	14,52
CARE	Metro Healthcare Indonesia Tbk	340	324	-16	9.412.600	3.178.715.600	10.773.000.000.000	-486,19
STTP	Siantar Top Tbk.	7.125	8.175	1.050	500	3.900.000	10.709.250.000.000	21,29
ASMI	Asuransi Kresna Mitra Tbk	1.195	1.190	-5	800	950.000	10.660.472.747.400	341,14
AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	5.275	5.325	50	3.265.800	17.293.682.500	10.248.965.373.225	48,55
RMBA	Bentoel Internasional Investama Tbk.	252	278	26	2.800	679.400	10.119.515.877.500	674,59
LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	131	139	8	8.434.900	1.150.924.100	9.854.824.553.291	-4,28
KPIG	MNC Land Tbk	119	119	-	12.555.000	1.470.450.300	9.594.461.473.016	22,40
SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	965	1.000	35	8.871.000	8.673.344.000	9.525.000.000.000	-5.230,13
SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk	4.740	4.740	-	228.400	1.080.464.000	9.480.000.000.000	-
SILO	Siloam International Hospitals Tbk	5.825	5.800	-25	8.300	48.057.500	9.429.440.625.000	164,93
ISAT	Indosat Tbk.	1.550	1.735	185	6.129.100	10.116.787.000	9.427.874.622.500	-24,85
POWR	Cikarang Listrindo Tbk	580	585	5	577.200	337.359.500	9.410.986.260.000	6,32
DMND	Diamond Food Indonesia Tbk	990	990	-	5.400	5.299.500	9.373.675.410.000	-
DUTI	Duta Pertiwi Tbk	4.990	4.990	-	-	-	9.231.500.000.000	10,45
PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.	2.710	2.600	-110	200	520.000	9.230.000.000.000	21,06
ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	8.100	8.150	50	904.500	7.253.310.000	9.208.888.750.000	5,10
SCBD	Danayasa Arthatama Tbk.	2.700	2.700	-	-	-	8.969.648.400.000	200,76
NATO	Nusantara Properti Internasional Tbk	1.120	1.120	-	57.242.600	63.370.486.000	8.961.217.104.000	1.387,34
BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	835	845	10	43.795.300	36.588.768.500	8.859.064.500.000	42,33
BSIM	Bank Sinarmas Tbk	500	505	5	400	195.400	8.718.266.941.165	603,13
GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	1.190	1.180	-10	162.300	190.145.000	8.707.904.743.380	21,94
APIC	Pacific Strategic Financial Tbk	720	720	-	27.400	19.438.000	8.471.745.711.360	85,06
SRTG	Saratoga Investama Sedaya Tbk	3.300	3.080	-220	57.000	175.824.000	8.355.938.360.000	0,89
INPP	Indonesian Paradise Property Tbk.	705	745	40	7.200	5.270.500	8.330.568.940.340	4,11
WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	835	865	30	35.061.200	29.879.316.500	7.759.007.936.780	4,30
BJBR	BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	725	795	70	6.438.800	4.797.821.500	7.743.617.434.755	5,14
MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.	374	432	58	149.373.200	62.475.045.200	7.741.636.173.792	15,40
AKRA	AKR Corporindo Tbk.	1.930	1.920	-10	18.298.200	34.510.614.500	7.708.214.246.400	10,96
CTRA	Ciputra Development Tbk.	420	412	-8	36.181.500	14.910.776.800	7.646.844.999.564	14,01
ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	7.200	7.550	350	1.073.600	8.056.240.000	7.550.000.000.000	3,58
MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.	470	454	-16	72.961.300	32.571.003.600	7.536.400.000.000	8,79
ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk	1.200	1.210	10	1.572.600	1.897.806.500	7.485.651.554.480	26,52
TURI	Tunas Ridean Tbk.	1.300	1.300	-	-	-	7.254.000.000.000	12,57
KAEF	Kimia Farma Tbk.	1.285	1.300	15	18.349.200	24.001.017.000	7.220.200.000.000	129,45
LINK	Link Net Tbk	2.500	2.450	-50	223.800	548.543.000	7.014.828.935.800	6,81
DMAS	Puradelta Lestari Tbk	142	145	3	16.646.800	2.412.131.100	6.988.726.109.500	6,90
SMAR	Smart Tbk.	2.420	2.420	-	1.000	2.420.000	6.950.707.945.720	9,80
BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	436	466	30	5.138.800	2.333.391.800	6.927.249.885.066	5,03
JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.	414	414	-	100.000	41.400.000	6.751.727.222.040	119,74
TAMU	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk	180	180	-	-	-	6.750.000.000.000	-127,19
SMSM	Selamat Sempurna Tbk.	1.175	1.170	-5	3.006.100	3.487.121.000	6.737.650.264.800	29,10
WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	480	488	8	55.859.300	26.905.650.400	6.624.088.088.000	4,32
CITA	Cita Mineral Investindo Tbk.	1.625	1.600	-25	300	480.000	6.336.578.000.000	5,46
HEAL	Medikaloka Hermina Tbk	2.030	2.110	80	10.100	21.635.000	6.273.030.000.000	22,40
BCAP	MNC Kapital Indonesia Tbk	160	155	-5	300.800	46.622.100	6.162.932.048.685	79,77
CLAY	Citra Putra Realty Tbk	2.460	2.340	-120	60.700	149.343.000	6.013.800.000.000	-196,27
URBN	Urban Jakarta Propertindo Tbk	1.855	1.850	-5	231.400	425.848.000	5.979.426.787.800	52,35
EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk.	2.190	2.190	-	-	-	5.931.921.600.000	9,45
PNLF	Panin Financial Tbk	198	185	-13	3.434.300	635.345.500	5.924.083.559.205	2,87
BOGA	Bintang Oto Global Tbk	1.550	1.550	-	142.100	219.521.000	5.895.465.625.500	718,69
CMNP	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	1.600	1.600	-	39.800	63.680.000	5.793.331.110.400	8,49
TUGU	Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	3.240	3.240	-	200	648.000	5.760.000.072.000	15,11
BPII	Batavia Prosperindo Internasional Tbk	10.000	10.000	-	-	-	5.622.246.620.000	47,38
KOTA	DMS Propertindo Tbk	525	525	-	300	156.500	5.534.401.409.250	839,87
JRPT	Jaya Real Property Tbk.	378	400	22	6.215.600	2.419.866.400	5.500.000.000.000	5,57
KREN	Kresna Graha Investama Tbk.	300	302	2	602.800	182.690.800	5.498.957.970.200	24,60
BINA	Bank Ina Perdana Tbk	930	970	40	63.500	61.435.000	5.429.896.312.500	981,38
LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	785	785	-	10.519.100	8.111.357.500	5.355.948.212.525	21,09
PSAB	J. Resources Asia Pacifik Tbk	193	195	2	15.735.400	3.067.525.800	5.159.700.000.000	31,82
SMRA	Summarecon Agung Tbk.	372	356	-16	58.196.900	20.672.466.600	5.135.934.278.080	12,24
IMPC	Impack Pratama Industri Tbk	1.055	1.055	-	535.600	564.312.000	5.099.342.500.000	68,74
SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.	665	665	-	7.400	4.949.500	5.095.828.500.000	28,50
SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	780	780	-	-	-	5.081.791.252.980	9,04
TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.	995	1.100	105	287.500	300.792.500	4.950.000.000.000	8,91
UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk	1.250	1.190	-60	347.000	422.444.500	4.946.321.037.000	-
BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	1.880	1.880	-	-	-	4.919.020.000.000	11,58
BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk	1.230	1.210	-20	3.400	4.098.000	4.899.518.811.000	17,39
MAPA	MAP Aktif Adiperkasa Tbk	1.830	1.705	-125	62.000	105.714.500	4.859.932.000.000	6,72
GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk	182	183	1	21.195.400	3.897.804.500	4.737.243.454.482	2,05
CLEO	Sariguna Primatirta Tbk	374	388	14	8.361.600	3.215.522.600	4.656.000.000.000	37,14
SGRO	Sampoerna Agro Tbk.	2.490	2.450	-40	61.600	150.949.000	4.630.500.000.000	191,51
SUPR	Solusi Tunas Pratama Tbk	4.000	4.000	-	-	-	4.550.318.792.000	416,05
MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk.	490	492	2	1.800	883.200	4.518.009.896.940	-17,67
TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.	5.000	4.900	-100	100	490.000	4.500.614.475.000	10,74
BCIC	Bank J Trust Indonesia Tbk	450	450	-	-	-	4.460.401.465.200	-
BFIN	BFI FinanceIndonesia Tbk.	240	278	38	2.990.700	810.387.800	4.438.858.142.360	3,05
RISE	Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk	456	446	-10	110.600	50.192.400	4.437.700.000.000	715,32
ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk	180	175	-5	30.915.600	5.404.107.500	4.418.750.000.000	20,94
MYRX	Hanson International Tbk.	50	50	-	-	-	4.335.161.039.600	41,99
SURE	Super Energy Tbk	2.860	2.850	-10	200	570.000	4.268.093.797.350	742,07
SHID	Hotel Sahid Jaya International Tbk.	3.790	3.790	-	-	-	4.242.246.176.720	-150,85

Sumber: Data dari PT BEI diolah kembali oleh StockWatch *Saham yang IPO

Keuangan 971,86
YoY ▼ -23,51%
1.233,95 YtD ▼ -28,26%
6/3 20/3 2/4

20 SAHAM TERAKTIF

Kode	Emiten	Sbl	Pntp	Prb	Volume	Nilai
BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2.930	2.870	-60	299.882.400	854.818.660.000
REAL	Repower Asia Indonesia Tbk.	57	61	4	70.603.700	4.144.381.400
MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	900	1.000	100	31.561.700	30.566.595.000
PAMG	Bima Sakti Pertiwi Tbk.	114	107	-7	94.064.600	10.144.197.800
BBCA	Bank Central Asia Tbk.	27.400	27.050	-350	27.324.700	739.233.410.000
TELE	Tiphone Mobile Indonesia Tbk.	118	140	22	227.590.200	30.768.457.100
PURA	Putra Rajawali Kencana Tbk.	77	75	-2	24.748.700	1.893.718.000
ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.	148	146	-2	136.633.800	22.978.041.300
TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	3.100	3.130	30	92.893.600	286.311.122.000
BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	3.680	3.850	170	58.984.400	218.335.028.000
MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.	374	432	58	149.373.200	62.475.045.200
KLBF	Kalbe Farma Tbk.	1.165	1.285	120	63.583.600	76.987.285.000
PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	735	800	65	176.088.600	136.653.030.000
BRPT	Barito Pacific Tbk.	745	830	85	131.826.400	107.249.137.500
BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	4.610	4.750	140	66.112.600	304.093.511.000
RAJA	Rukun Raharja Tbk.	86	104	18	128.293.400	13.463.387.800
ELSA	Elnusa Tbk.	141	181	40	184.176.200	31.760.814.400
TCPI	Transcoal Pacific Tbk.	4.720	4.800	80	10.781.100	51.877.291.500
BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.	1.985	1.920	-65	34.093.500	64.260.446.500
ASII	Astra International Tbk.	3.770	3.930	160	39.717.300	153.604.050.000

20 SAHAM KENAIKAN HARGA TERTINGGI

Kode	Emiten	Sbl	Pntp	Persen	Volume	Nilai
SOCI	Soechi Lines Tbk.	85	114	34,12	45.705.400	5.017.169.700
HKMU	HK Metals Utama Tbk.	73	94	28,77	25.580.200	2.350.786.900
ELSA	Elnusa Tbk.	141	181	28,37	184.176.200	31.760.814.400
SAMF	Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.	218	272	24,77	414.100	112.635.200
ARTO	Bank Artos Indonesia Tbk.	915	1.140	24,59	288.300	328.662.000
DUCK	Jaya Bersama Indo Tbk.	442	550	24,43	2.506.000	1.205.327.000
MPRO	Maha Properti Indonesia Tbk.	925	1.135	22,70	200	228.500
RAJA	Rukun Raharja Tbk.	86	104	20,93	128.293.400	13.463.387.800
CARS	Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk.	50	60	20,00	13.852.900	793.628.500
GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk.	82	98	19,51	7.200	603.700
TELE	Tiphone Mobile Indonesia Tbk.	118	140	18,64	227.590.200	30.768.457.100
HDIT	Hensel Davest Indonesia Tbk.	575	680	18,26	700	447.000
SIPD	Sierad Produce Tbk.	720	850	18,06	600	513.000
IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk.	200	236	18,00	800	156.200
WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.	81	95	17,28	6.598.500	600.504.000
AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk.	256	298	16,41	900	268.200
BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk.	240	278	15,83	2.990.700	810.387.800
MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.	374	432	15,51	149.373.200	62.475.045.200
BBKP	Bank Bukopin Tbk.	98	113	15,31	41.031.000	4.546.827.400
STTP	Siantar Top Tbk.	7.125	8.175	14,74	500	3.900.000

20 SAHAM KOREKSI HARGA TERTINGGI

Kode	Emiten	Sbl	Pntp	Persen	Volume	Nilai
LMSH	Lionmesh Prima Tbk.	400	372	-7,00	6.200	2.306.400
AGII	Aneka Gas Industri Tbk.	505	470	-6,93	992.400	472.980.400
POLL	Pollux Properti Indonesia Tbk.	10.150	9.450	-6,90	488.700	4.677.370.000
ENVY	Envy Technologies Indonesia Tbk.	131	122	-6,87	147.700	18.019.400
GEMA	Gema Grahasarana Tbk.	350	326	-6,86	20.000	6.520.000
NASA	Ayana Land International Tbk.	234	218	-6,84	2.116.100	511.660.800
AMAN	Makmur Berkah Amanda Tbk.	234	218	-6,84	736.400	164.720.200
MAPA	Map Aktif Adiperkasa Tbk.	1.830	1.705	-6,83	62.000	105.714.500
SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk.	410	382	-6,83	24.700.800	9.450.380.000
LAND	Trimitra Propertindo Tbk.	498	464	-6,83	314.700	147.292.800
LPPF	Matahari Department Store Tbk.	1.245	1.160	-6,83	12.478.400	14.487.200.500
BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk.	118	110	-6,78	1.700	187.000
MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.	1.555	1.450	-6,75	7.100	10.429.000
SSTM	Sunson Textile Manufacture Tbk.	450	420	-6,67	2.400	1.008.000
OASA	Protech Mitra Perkasa Tbk.	300	280	-6,67	100	28.000
ESTA	Esta Multi Usaha Tbk.	120	112	-6,67	3.225.800	363.705.100
SRTG	Saratoga Investama Sedaya Tbk.	3.300	3.080	-6,67	57.000	175.824.000
SPTO	Surya Pertiwi Tbk.	605	565	-6,61	4.900	2.777.500
IDPR	Indonesia Pondasi Raya Tbk.	242	226	-6,61	75.200	16.996.600
SKBM	Sekar Bumi Tbk.	396	370	-6,57	100	37.000

20 PIALANG TERAKTIF

Kode	Emiten	Frekuensi	Volume	Nilai
ZP	Maybank Kim Eng Sekuritas	39.274	608.871.740	1.444.014.545.096
CS	Credit Suisse Sekuritas Indonesia	43.810	342.074.900	1.125.356.872.100
RX	Macquarie Sekuritas Indonesia	9.958	286.322.200	839.409.881.900
YP	Mirae Asset Sekuritas Indonesia	170.373	1.499.081.700	822.487.417.000
KI	Ciptadana Sekuritas Asia	5.084	337.507.800	784.990.140.800
KZ	CLSA Sekuritas Indonesia	45.138	317.506.900	727.060.174.800
BK	J.P. Morgan Sekuritas Indonesia	28.909	222.537.036	705.494.793.740
CC	Mandiri Sekuritas	77.270	734.155.700	653.188.840.900
MS	Morgan Stanley Sekuritas Indonesia	15.207	234.420.806	491.206.006.520
AK	UBS Sekuritas Indonesia	34.211	183.554.940	438.104.615.174
PD	Indo Premier Sekuritas	78.857	599.917.444	435.150.798.800
YU	CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	31.026	314.832.324	426.535.461.260
CG	Citigroup Sekuritas Indonesia	23.644	100.362.900	262.910.077.000
KK	Phillip Sekuritas Indonesia	35.656	355.351.326	246.738.162.980
DX	Bahana Sekuritas	9.340	131.642.200	213.983.130.000
MG	Semesta Indovest Sekuritas	11.248	193.311.800	204.846.622.600
CP	Valbury Sekuritas Indonesia	19.830	502.986.800	204.820.631.300
GR	Panin Sekuritas Tbk.	18.280	208.535.600	175.453.611.900
NI	BNI Sekuritas	38.800	341.189.800	172.235.944.800
DR	RHB Sekuritas Indonesia	19.214	189.883.800	161.033.656.300

20 SAHAM TERBESAR DIBELI INVESTOR ASING

Emiten	Volume Beli	Volume Jual	Volume Beli Bersih
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	234.111.595	332.661.295	-98.549.700
Astra International Tbk	96.594.271	91.241.771	5.352.500
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	50.252.990	33.604.690	16.648.300
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	49.099.470	73.313.970	-24.214.500
Perusahaan Gas Negara Tbk.	44.851.865	61.043.065	-16.191.200
BFI Finance Indonesia Tbk.	34.493.000	33.498.100	994.900
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	23.601.563	19.160.763	4.440.800
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.	21.452.596	24.586.196	-3.133.600
Pakuwon Jati Tbk.	17.899.434	16.255.134	1.644.300
Bank Central Asia Tbk.	16.589.277	17.144.523	-555.246
H.M. Sampoerna Tbk.	16.366.215	12.358.215	4.008.000
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	14.435.829	4.947.229	9.488.600
Media Nusantara Citra Tbk.	12.711.624	8.397.424	4.314.200
Mitra Adiperkasa Tbk.	12.710.900	42.015.200	-29.304.300
Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	10.251.900	1.265.900	8.986.000
Sarana Menara Nusantara Tbk.	10.130.800	31.050.900	-20.920.100
MNC Land Tbk	9.985.300	4.827.000	5.158.300
Ramayana Lestari Sentosa Tbk.	9.840.900	13.735.800	-3.894.900
Eagle High Plantations Tbk.	9.792.000	8.002.700	1.789.300
Kalbe Farma Tbk.	9.652.972	26.891.972	-17.239.000

20 SAHAM TERBESAR DIJUAL INVESTOR ASING

Emiten	Volume Jual	Volume Beli	Volume Jual Bersih
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	332.661.295	234.111.595	98.549.700
Astra International Tbk	91.241.771	96.594.271	-5.352.500
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	73.313.970	49.099.470	24.214.500
Perusahaan Gas Negara Tbk.	61.043.065	44.851.865	16.191.200
Mitra Adiperkasa Tbk.	42.015.200	12.710.900	29.304.300
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	33.604.690	50.252.990	-16.648.300
BFI Finance Indonesia Tbk.	33.498.100	34.493.000	-994.900
Sarana Menara Nusantara Tbk.	31.050.900	10.130.800	20.920.100
Kalbe Farma Tbk.	26.891.972	9.652.972	17.239.000
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.	24.586.196	21.452.596	3.133.600
Barito Pacific Tbk.	22.758.953	9.099.253	13.659.700
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	19.160.763	23.601.563	-4.440.800
Bank Central Asia Tbk.	17.144.523	16.589.277	555.246
Pakuwon Jati Tbk.	16.255.134	17.899.434	-1.644.300
Ciputra Development Tbk.	16.211.312	4.451.512	11.759.800
Summarecon Agung Tbk.	15.742.644	4.351.844	11.390.800
Ace Hardware Indonesia Tbk.	14.466.165	4.309.999	10.156.166
Ramayana Lestari Sentosa Tbk.	13.735.800	9.840.900	3.894.900
H.M. Sampoerna Tbk.	12.358.215	16.366.215	-4.008.000
Bumi Serpong Damai Tbk.	11.616.648	5.868.148	5.748.500

VOLUME TERBESAR TRANSAKSI WARAN

Emiten	Sbl	Pntp	Prb	Volume	Nilai
Waran Seri I Medco Energi Internasional Tbk.	27	47	20	63.224.600	2.707.996.400
Waran Seri I Diamond Citra Propertindo Tbk.	9	8	-1	26.290.800	209.776.400
Waran Seri I Putra Rajawali Kencana Tbk.	4	4	0	21.042.400	84.300.300
Waran Seri I Meta Epsi Tbk.	2	2	0	16.876.900	33.831.500
Waran Seri I Sinergi Inti Plastindo Tbk.	8	9	1	15.795.400	141.247.400
Waran Seri I Andalan Sakti Primaindo Tbk.	15	17	2	12.168.100	194.698.700
Waran Seri I Repower Asia Indonesia Tbk.	6	6	0	9.995.600	66.986.800
Waran Seri I Agro Yasa Lestari Tbk.	6	6	0	5.896.100	36.034.300
Waran Seri II Smartfren Telecom Tbk.	23	26	3	5.763.400	141.749.500
Waran Seri I MNC Vision Networks Tbk.	94	101	7	4.587.500	458.434.200
Waran Seri I Bliss Properti Indonesia Tbk.	3	4	1	2.010.100	6.064.000
Waran Seri I Trinitan Metals and Minerals Tbk.	13	15	2	1.286.700	18.004.500
Waran Seri I Lancartama Sejati Tbk.	8	9	1	1.155.800	9.247.600
Waran Seri I Cahayaputra Asa Keramik Tbk.	10	10	0	1.068.400	7.697.800
Waran Seri I Estika Tata Tiara Tbk.	17	18	1	992.400	17.488.300
Waran Seri I Bhakti Agung Propertindo Tbk.	4	4	0	911.500	3.005.400
Waran Seri I Bank Artha Graha Internasional Tbk.	4	4	0	827.600	2.503.400
Waran Seri I Eastparc Hotel Tbk.	8	8	0	656.500	4.638.600
Waran Seri I Sinergi Megah Internusa Tbk.	3	3	0	591.800	1.228.100
Waran Seri I Urban Jakarta Propertindo Tbk.	14	15	1	359.800	5.069.300

INDEKS BISNIS-27

Kode	Emiten	Sbl	Pntp	Prb	Volume	Nilai
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	1.290	1.230	-60	16.347.800	20.170.872.500
ADRO	Adaro Energy Tbk.	1.020	1.040	20	29.924.200	30.700.806.500
ASII	Astra International Tbk.	3.770	3.930	160	39.717.300	153.604.050.000
BBCA	Bank Central Asia Tbk.	27.400	27.050	-350	27.324.700	739.233.410.000
BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	3.680	3.850	170	58.984.400	218.335.028.000
BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2.930	2.870	-60	299.882.400	854.818.660.000
BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	4.610	4.750	140	66.112.600	304.093.511.000
CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	4.750	4.890	140	7.307.300	35.058.151.000
EXCL	XL Axiata Tbk.	1.950	2.050	100	10.830.400	21.658.674.500
GGRM	Gudang Garam Tbk.	40.050	43.975	3.925	1.328.400	56.584.935.000
ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	10.150	10.200	50	7.811.800	79.235.367.500
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	6.350	6.800	450	12.752.200	86.135.080.000
INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	4.000	4.210	210	5.055.500	20.482.741.000
INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	12.175	11.825	-350	3.080.600	36.532.965.000
JSMR	Jasa Marga Tbk.	2.500	2.600	100	7.541.100	19.255.840.000
KLBF	Kalbe Farma Tbk.	1.165	1.285	120	63.583.600	76.987.285.000
MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	2.000	2.000	0	518.300	1.039.938.500
MYOR	Mayora Indah Tbk.	1.830	1.810	-20	2.834.900	5.031.059.000
PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	735	800	65	176.088.600	136.653.030.000
PTBA	Bukit Asam Tbk.	2.050	2.030	-20	23.837.600	48.227.412.500
PWON	Pakuwon Jati Tbk.	312	328	16	34.495.900	11.074.927.200
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	7.700	7.500	-200	7.011.900	52.551.605.000
TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	3.880	4.180	300	5.015.000	20.020.699.000
TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	3.100	3.130	30	92.893.600	286.311.122.000
TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.	655	665	10	67.787.200	44.850.563.500
UNTR	United Tractors Tbk.	16.625	16.900	275	3.412.000	57.204.132.500
UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	7.150	7.225	75	11.148.700	79.765.922.500

Sumber: *BEI*

INDONESIA BOND PRICING AGENCY (IBPA)-IGSYC

INDONESIA GOVERNMENT SECURITIES YIELD CURVE

Indonesia Composite Bond Index (ICBI)			INDOBex Government			INDOBex Corporate		
266,8140	⇩ -1,1601	-0,43%	260,9025	⇩ -1,2263	-0,47%	298,8761	⇩ -0,4465	-0,15%

YIELD (%) — Tenor (tahun) — 2 Apr '20 / 1 Apr '20

Tenor (tahun)	Yield (%) 2 Apr '20	Yield (%) 1 Apr '20	Tenor (tahun)	Yield (%) 2 Apr '20	Yield (%) 1 Apr '20
0,1	3,7153	3,9166	16	8,4261	8,4171
1	5,7055	5,4046	17	8,4274	8,4254
2	6,4144	6,3138	18	8,4281	8,4311
3	6,8421	6,8664	19	8,4285	8,4351
4	7,2302	7,2435	20	8,4287	8,4378
5	7,5745	7,5237	21	8,4288	8,4397
6	7,8503	7,7413	22	8,4289	8,4410
7	8,0532	7,9125	23	8,4289	8,4418
8	8,1930	8,0466	24	8,4290	8,4424
9	8,2848	8,1505	25	8,4290	8,4428
10	8,3428	8,2297	26	8,4290	8,4431
11	8,3785	8,2892	27	8,4290	8,4432
12	8,3998	8,3332	28	8,4290	8,4433
13	8,4124	8,3655	29	8,4290	8,4434
14	8,4196	8,3887	30	8,4290	8,4435
15	8,4238	8,4053			

Benchmark Sun

Tenor	Seri	Fair price (%)	YTM (%)	Kupon (%)
5,21	FR0081	96,3453	7,3548	6,5000
10,46	FR0082	92,4976	8,0756	7,0000
15,21	FR0080	93,8753	8,2104	7,5000
20,05	FR0083	91,4667	8,3860	7,5000

Obligasi Negara Ritel & Sukuk Negara Ritel

Kode	Kupon (%)	Jatuh tempo	TTM (tahun)	Harga Pasar Wajar (%) 2 Apr '20	1 Apr '20	Change (bps)	YTM (%) 2 Apr '20	1 Apr '20	Change (%)
ORI014	5,8500	15-Okt-20	0,54	100,2844	100,3766	-9,22	5,3092	5,1378	0,17
ORI015	8,2500	15-Okt-21	1,54	103,8190	104,0273	-20,83	5,6465	5,5120	0,13
ORI016	6,8000	15-Okt-22	2,54	100,3353	100,3729	-3,76	6,6557	6,6397	0,02
SR010	5,9000	10-Mar-21	0,94	100,2005	100,4721	-27,16	5,6798	5,3841	0,30
SR011	8,0500	10-Mar-22	1,94	103,0073	103,1803	-17,30	6,3959	6,3046	0,09
SR012	6,3000	10-Mar-23	2,94	99,9029	99,8425	6,05	6,3362	6,3588	-0,02

Sumber: *www.ibpa.co.id*

NILAI TUKAR

SUKU BUNGA

SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) beberapa bank di Indonesia pada 2 April 2020 (% per tahun).

No	Bank	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi KPR	Kredit Konsumsi Non-KPR	Mulai Berlaku
	Bank ANZ Indonesia	8,81	-	-	-	-	07 Desember 2019
	Bank BJB	8,65	10,08	13,22	10,19	10,02	30 November 2019
	Bank BRI Tbk	9,95	9,90	17,25	9,90	12,00	06 November 2019
	Bank BTPN	7,39	11,58	16,06	-	13,32	30 November 2019
	Bank Bukopin Tbk	8,57	9,40	13,13	9,80	9,80	06 Desember 2019
	Bank Bumi Arta Tbk	10,31	10,56	15,51	9,99	14,53	01 Maret 2020
	Bank Central Asia Tbk	9,75	9,90	-	9,90	8,61	29 Februari 2020
	Bank CTBC Indonesia	10,015	9,90	-	9,90	-	31 Desember 2019
	Bank Danamon Tbk	10,00	10,50	17,00	10,25	12,00	31 Desember 2019
	Bank DBS Indonesia	7,37	8,57	-	9,27	-	31 Maret 2020
	Bank FAMA International	10,70	10,70	11,70	10,70	10,70	31 Desember 2019
	Bank HSBC Indonesia	9,50	10,25	-	10,75	-	30 September 2019
	Bank ICBC Indonesia	8,91	9,17	-	9,17	-	31 Maret 2020
	Bank Jasa Jakarta	10,70	10,70	-	10,45	10,45	30 September 2019
	Bank J Trust Indonesia Tbk	10,15	10,65	21,00	13,00	12,00	09 Desember 2019
	Bank Jateng	9,71	12,65	13,34	11,72	12,39	31 Desember 2019
	Bank Jatim	7,01	7,89	11,39	7,07	8,34	30 November 2019
	Bank Kesejahteraan Ekonomi	11,62	12,12	12,62	12,62	12,62	30 November 2019
	Bank Maluku Malut	4,88	4,88	4,88	8,45	8,45	31 Desember 2019
	Bank Mandiri Tbk	9,95	9,90	17,50	10,20	11,95	31 Desember 2019
	Bank Mayapada Internasional Tbk	9,80	11,20	13,40	11,20	11,30	31 Maret 2020
	Bank Mayora	10,20	10,88	11,88	10,38	10,38	30 September 2019
	Bank Mizuho Indonesia	6,35	-	-	-	-	31 Maret 2020
	Bank Multiarta Sentosa	10,00	11,00	-	10,00	11,00	30 November 2019
	Bank Negara Indonesia Tbk	9,95	9,95	-	10,25	12,25	31 Desember 2019
	Bank OCBC NISP Tbk	10,25	11,50	-	10,20	10,75	26 Februari 2020
	Bank of China Limited	6,71	6,71	-	-	-	28 Februari 2020
	Bank Panin Tbk	10,25	10,35	17,83	10,35	10,35	28 Februari 2020
	Bank Permata Tbk	9,85	10,25	-	10,25	10,25	31 Maret 2020
	Bank Riau Kepri	8,34	8,08	8,17	7,71	7,96	30 November 2019
	Bank Sinarmas Tbk	10,50	11,50	16,00	-	10,50	31 Desember 2019
	Bank Sulselbar	8,78	8,41	8,51	8,42	10,70	31 Oktober 2019
	Bank Sulutgo	11,29	11,59	11,59	11,29	11,59	31 Desember 2019
	Bank Sumut	9,77	10,17	13,27	10,50	12,35	17 Desember 2019
	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11,50	11,50	-	10,75	11,50	30 November 2019
	Bank UOB Indonesia	10,25	11,00	-	10,25	-	01 Maret 2020
	BPD Kalimantan Barat	8,64	9,14	10,64	9,64	10,39	30 November 2019
	BPD Kalimantan Timur dan Utara	10,89	10,45	10,45	10,89	10,01	31 Desember 2019
	BPD Nusa Tenggara Timur	10,38	11,16	10,28	10,26	13,39	30 September 2019
	Citibank	7,25	7,35	-	-	-	31 Januari 2020
	Commonwealth Bank	-	10,75	-	10,75	11,25	09 Maret 2020
	Rabobank	11,25	13,00	-	13,00	14,00	31 Maret 2020
	Standard Chartered Bank Indonesia	8,90	-	-	9,30	-	29 Februari 2020

Keterangan:

1. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantun dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
2. Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).
3 Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank.

Bagi bank yang ingin menampilkan SBDK dapat mengirimkan data ke : Email: datatabel@bisnis.com, datatabel@gmail.com, dan datatabel@yahoo.com.

SUKU BUNGA DEPOSITO

Tingkat suku bunga deposito berjangka Rp/US$ pada 2 April 2020 (% per tahun).

Nama bank	Saldo	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	Tgl Berlaku
Bank Mandiri	< Rp 100jt	4,25	5,25	4,25	4,25	01/04/20
	≥ Rp 100jt s/d < 1M / < USD 100ribu	4,25/0,80	5,25/0,80	4,75/0,90	4,25/0,95	01/04/20
	≥ Rp 1M s/d < 2M / ≥ USD 100ribu s/d < 1 jt	4,50/0,80	5,25/0,80	4,75/0,95	4,25/1,00	01/04/20
	≥ Rp 2M s/d < 5M / ≥ USD 1 jt s/d < 10 jt	4,50/0,90	5,25/0,90	4,75/1,00	4,75/1,00	01/04/20
	≥ Rp 5M / ≥ USD 10 jt	4,50/0,90	5,25/0,90	4,75/1,00	4,75/1,00	01/04/20
Bank Central Asia Tbk	< Rp 2M	4,25	4,25	4,25	4,25	02/03/20
	≥ Rp 2M s/d < Rp 5M	4,25	4,25	4,25	4,25	02/03/20
	≥ Rp 5M s/d < Rp 10M	4,25	4,25	4,25	4,25	02/03/20
Bank BNI Tbk	< Rp 100jt	4,25	5,50	5,00	4,50	05/12/19
	≥ Rp 100jt s/d < 1M	4,25	5,50	5,25	4,75	05/12/19
	≥ Rp 1M s/d < 5M	4,50	5,50	5,25	4,75	05/12/19
	≥ Rp 5M	4,50	5,50	5,25	5,00	05/12/19
Bank Panin	-	5,25	5,25	5,25	5,25	23/09/19
Bank Jatim	-	4,75	5,50	5,25	5,25	29/04/19
Bank CIMB Niaga Tbk	≥ Rp 8jt	4,50	5,00	5,25	5,50	01/09/18
Bank Bukopin	< Rp 100jt	5,25/0,75	5,50/0,75	5,50/0,75	5,50/0,75	28/11/17
Bank Bjb	-	5,25	5,25	5,50	5,50	14/11/17

bankjatim yang terbaik untuk anda

Suku Bunga Deposito 1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	Berlaku
4,75	5,75	5,50	5,25	5,25	29/04/2019

* Berlaku nominal dan bunga progresif

Nama bank	Valuta	Saldo	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	Tgl Berlaku
Bank Central Asia	SGD	-	0,10	0,10	0,10	0,10	-
	AUD	-	0,10	0,10	0,10	0,10	10/03/2020
	GBP	-	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Bank Bjb	USD	-	0,50	0,50	0,50	0,50	14/11/2017
Bank BRI	EUR	-	0,15	0,25	0,25	0,25	01/05/2014
Bank Kesawan	SGD	-	0,50	0,50	0,50	0,50	-
Bank Mandiri	SGD	≤ SGD 10rb	0,25	0,25	0,25	0,50	18/06/2014
Bank Chinatrust	EUR	-	2,00	2,00	1,75	1,75	-
Bank CIMB Niaga	SGD	-	0,05	0,10	0,25	0,25	-
	EUR	-	0,25	0,25	0,35	0,45	-
	AUD	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-
Bank Int'l Indonesia	Yen	-	0,00	0,10	0,10	0,10	-
	Pound	-	0,30	0,30	0,50	0,75	-
	AUD	-	1,75	1,75	1,75	1,75	-
	SGD	-	0,50	0,50	0,50	0,75	-
	EUR	-	0,25	0,25	0,35	0,45	-
Bank Mutiara	SGD	-	0,25	0,25	0,25	0,25	-
	EUR	-	0,25	0,50	0,50	0,50	-
	Yen	-	0,10	0,10	0,10	0,10	-
	AUD	-	2,25	2,25	2,25	2,25	-

Penjaminan LPS 25 Januari s/d 29 Mei 2020 (Dalam %)

Rupiah	6,00
Dolar AS	1,75
BPR (Rp)	8,50

SUKU BUNGA ANTARBANK

Sukubunga antarbank di Jakarta (*Jakarta Interbank Offered Rate*) pada 2 April 2020.

JIBOR Rp (Ringkasan)	7 Hari	1 Bln	3 Bln	6 Bln	12 Bln
Suku Bunga Rata-Rata (%)	4,58215	4,78477	4,87931	5,09792	5,29600
Suku Bunga Tertinggi (%)	4,60000	4,80000	4,92500	5,15000	5,35000
Suku Bunga Terendah (%)	4,55000	4,75000	4,85000	5,05000	5,25000

JIBOR Rp (Kuotasi Individu Offer Rate)	7 Hari	1 Bln	3 Bln	6 Bln	12 Bln
B.P.D. DKI Jakarta	4,58000	4,75000	4,90000	5,09000	5,28000
B.P.D. Jawa Barat Banten	4,57800	4,79200	4,86600	5,07800	5,27800
Bank Central Asia Tbk	4,55000	4,80000	4,85000	5,10000	5,30000
Bank CTBC Indonesia	4,60000	4,80000	4,90000	5,15000	5,35000
Bank Danamon Indonesia	4,60000	4,80000	4,90000	5,10000	5,30000
Bank Keb Hana Indonesia	4,55000	4,75000	4,85000	5,10000	5,30000
Bank Mandiri	4,56000	4,76000	4,86000	5,06000	5,26000
Bank Negara Indonesia 1946	4,60000	4,80000	4,85000	5,05000	5,25000
Bank OCBC NISP Tbk	4,60000	4,80000	4,90000	5,10000	5,30000
Bank Panin Indonesia	4,58000	4,80000	4,88000	5,10000	5,30000
Bank Permata Tbk	4,55000	4,75000	4,85000	5,05000	5,25000
Bank Rakyat Indonesia	4,57000	4,76000	4,86000	5,08000	5,28000
Bank Tabungan Negara	4,55000	4,75000	4,85000	5,05000	5,25000
Citibank	4,60000	4,79000	4,89000	5,14000	5,35000
Deutsche Bank AG	4,63000	4,88000	4,99000	5,17000	5,37000
MUFG Bank, Ltd	4,60000	4,80000	4,95000	5,15000	5,35000
Standard Chartered Bank	4,60000	4,80000	4,92500	5,12500	5,30000

JIBID Rp (Kuotasi Individu Bid Rate)	7 Hari	1 Bln	3 Bln	6 Bln	12 Bln
B.P.D. DKI Jakarta	4,48000	4,55000	4,70000	4,89000	5,08000
B.P.D. Jawa Barat Banten	4,47800	4,59200	4,66600	4,87800	5,07800
Bank Central Asia Tbk	4,45000	4,60000	4,65000	4,90000	5,10000
Bank CTBC Indonesia	4,50000	4,60000	4,70000	4,95000	5,15000
Bank Danamon Indonesia	4,50000	4,60000	4,70000	4,90000	5,10000
Bank Keb Hana Indonesia	4,45000	4,55000	4,65000	4,90000	5,10000
Bank Mandiri	4,46000	4,56000	4,66000	4,86000	5,06000
Bank Negara Indonesia 1946	4,50000	4,60000	4,65000	4,85000	5,05000
Bank OCBC NISP Tbk	4,50000	4,60000	4,70000	4,90000	5,10000
Bank Panin Indonesia	4,48000	4,60000	4,68000	4,90000	5,10000
Bank Permata Tbk	4,45000	4,55000	4,65000	4,85000	5,05000
Bank Rakyat Indonesia	4,47000	4,56000	4,66000	4,88000	5,08000
Bank Tabungan Negara	4,45000	4,55000	4,65000	4,85000	5,05000
Citibank	4,57000	4,63000	4,83000	5,09000	5,24000
Deutsche Bank AG	4,53000	4,68000	4,79000	4,97000	5,17000
MUFG Bank, Ltd	4,50000	4,60000	4,75000	4,95000	5,15000
Standard Chartered Bank	4,50000	4,60000	4,72500	4,92500	5,10000

EURIBOR	1 MG	2 MG	1 Bln	2 Bln	3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln
Euribor (27 Mar'20)	-0,480	-0,371	-0,438	-0,336	-0,353	-0,281	-0,194	-0,153
Euribor (30 Mar'20)	-0,472	-0,371	-0,436	-0,336	-0,353	-0,280	-0,194	-0,163
Euribor (31 Mar'20)	-0,511	-0,371	-0,423	-0,336	-0,363	-0,287	-0,194	-0,171

KOMODITAS

KUALA LUMPUR

Harga *crude palm oil* (CPO) di *Kuala Lumpur Commodity Exchange* (KLCE) pada penutupan 2 April 2020 (beli/jual):

Bln	Ttp	Prb	Ttg	Trd	Vol.	Pntp Sbl
CPO (RM/ton):						
Apr 20	2.398,00	-95,00	2.490,00	2.400,00	151	2.493,00
Mei 20	2.374,00	-39,00	2.438,00	2.362,00	2.734	2.413,00
Jun 20	2.311,00	-28,00	2.368,00	2.298,00	26.360	2.339,00
Jul 20	2.274,00	-18,00	2.314,00	2.261,00	9.411	2.292,00
Agu 20	2.255,00	-13,00	2.282,00	2.243,00	5.938	2.268,00
Sep 20	2.245,00	-5,00	2.265,00	2.232,00	5.834	2.250,00
Okt 20	2.243,00	+3,00	2.262,00	2.228,00	3.303	2.240,00
Nov 20	2.251,00	+7,00	2.269,00	2.236,00	2.498	2.244,00
Des 20	2.266,00	+13,00	2.285,00	2.254,00	1.246	2.253,00
Jan 21	2.293,00	+16,00	2.315,00	2.281,00	1.417	2.277,00
Feb 21	2.316,00	+13,00	2.338,00	2.308,00	191	2.303,00
Mar 21	2.346,00	+13,00	2.366,00	2.330,00	409	2.333,00
Mei 21	2.350,00	+8,00	2.365,00	2.344,00	69	2.342,00
Jul 21	2.364,00	+8,00	2.365,00	2.360,00	22	2.356,00
Sep 21	2.368,00	+8,00	-	-	-	2.360,00

Sumber: *Bloomberg*

SINGAPURA

Harga karet di *Singapore Commodity Exchange* (Sicom) pada penutupan 2 April 2020 sebagai berikut:

Bln	Ttp	Prb	Ttg	Trd	Vol.	Pntp Sbl
RSS3 (US$cent/kg):						
Mei 20	128,00	+0,90	128,40	126,00	38	127,10
Jun 20	127,80	+1,10	128,00	127,00	35	126,70
Jul 20	128,10	+1,20	128,40	126,00	11	126,90
Agu 20	128,50	+1,90	-	-	-	126,60
Sep 20	129,10	+2,30	-	-	-	126,80
Okt 20	129,70	+2,50	-	-	-	127,20
Nov 20	130,70	+2,50	-	-	-	128,20
Des 20	130,70	+2,50	-	-	-	128,20
Jan 21	130,70	+2,50	-	-	-	128,20
Feb 21	130,70	+2,50	-	-	-	128,20
Mar 21	130,70	+2,50	-	-	-	128,20
Apr 21	131,70	+2,50	-	-	-	129,20
TSR20 (US$cent/kg):						
Mei 20	105,90	+2,50	106,50	102,90	2.474	103,40
Jun 20	106,90	+2,30	107,50	103,60	1.935	104,60
Jul 20	108,00	+2,50	108,50	104,10	1.502	105,50
Agu 20	109,10	+2,70	109,70	105,60	1.676	106,40
Sep 20	110,00	+2,50	110,50	106,90	585	107,50
Okt 20	110,70	+2,40	111,40	107,50	448	108,30
Nov 20	111,50	+2,70	112,00	108,30	297	108,80
Des 20	112,70	+2,80	113,10	109,30	178	109,90
Jan 21	113,90	+2,80	114,50	110,00	41	111,10
Feb 21	115,50	+2,90	115,80	112,20	4	112,60
Mar 21	117,00	+2,90	117,50	113,80	15	114,10
Apr 21	118,10	+3,00	-	-	-	115,10

Sumber: *Bloomberg*

TOKYO

Harga beberapa komoditas di bursa berjangka Tokyo pada penutupan 2 April 2020 sebagai berikut:

Bln	Ttp	Prb	Ttg	Trd	Vol.	Pntp Sbl
Karet (jpy/kg) :						
Apr 20	129,80	-1,40	132,10	128,80	63	131,20
Mei 20	130,90	-1,20	132,10	129,00	59	132,10
Jun 20	133,40	-1,00	133,90	131,00	86	134,40
Jul 20	137,70	-0,40	138,10	134,80	106	138,10
Agu 20	139,50	-0,60	140,50	136,80	1.600	140,10
Sep 20	140,60	-0,90	142,40	138,30	2.522	141,50
Jagung (jpy/1000 kg):						
Mei 20	19.000,00	-1.100,00	19.550,00	18.600,00	17	20.100,00
Jul 20	20.390,00	-	-	-	-	20.390,00
Sep 20	22.430,00	-860,00	22.610,00	22.430,00	4	23.290,00
Nov 20	23.150,00	-530,00	23.200,00	22.900,00	7	23.680,00
Jan 21	22.500,00	-500,00	22.750,00	22.500,00	9	23.000,00
Mar 21	22.570,00	-250,00	22.820,00	22.480,00	144	22.820,00
Kedele (jpy/1000 kg):						
Apr 20	46.000,00	-	-	-	-	46.000,00
Jun 20	46.000,00	-	-	-	-	46.000,00
Agu 20	46.000,00	-	-	-	-	46.000,00
Okt 20	46.000,00	-	-	-	-	46.000,00
Des 20	46.000,00	-	-	-	-	46.000,00
Feb 21	46.000,00	-	-	-	-	46.000,00
Emas (jpy/gr)						
Apr 20	5.468,00	-4,00	5.518,00	5.452,00	126	5.472,00
Jun 20	5.469,00	+4,00	5.503,00	5.403,00	118	5.465,00
Agu 20	5.458,00	+3,00	5.479,00	5.390,00	23	5.455,00
Okt 20	5.447,00	-4,00	5.490,00	5.401,00	153	5.451,00
Des 20	5.438,00	-22,00	5.482,00	5.371,00	902	5.460,00
Feb 21	5.432,00	-18,00	5.483,00	5.367,00	15.543	5.450,00
Perak (jpy/gr)						
Apr 20	49,00	-	-	-	-	49,00
Jun 20	50,10	-	-	-	-	50,10
Agu 20	51,20	-	-	-	-	51,20
Okt 20	50,90	-	-	-	-	50,90
Des 20	48,40	-	48,60	48,40	2	48,40
Feb 21	49,00	+0,60	49,00	47,90	43	48,40
Platinum (jpy/gr)						
Apr 20	2.474,00	-35,00	2.517,00	2.470,00	5	2.509,00
Jun 20	2.469,00	-14,00	2.499,00	2.450,00	22	2.483,00
Agu 20	2.465,00	-55,00	2.470,00	2.418,00	35	2.520,00
Okt 20	2.462,00	+2,00	2.484,00	2.383,00	195	2.460,00
Des 20	2.454,00	+5,00	2.478,00	2.385,00	439	2.449,00
Feb 21	2.455,00	+5,00	2.472,00	2.382,00	4.064	2.450,00
Gasoline (jpy/kl):						
Mei 20	26.500,00	-400,00	26.600,00	26.500,00	8	26.900,00
Jun 20	29.400,00	-300,00	29.400,00	29.400,00	11	29.700,00
Jul 20	30.500,00	-90,00	30.500,00	30.500,00	1	30.590,00
Agu 20	31.710,00	+110,00	32.520,00	31.710,00	2	31.600,00
Sep 20	33.610,00	+840,00	33.830,00	31.940,00	90	32.770,00
Okt 20	34.970,00	+1.450,00	34.970,00	32.900,00	202	33.520,00
Minyak Mentah (jpy/kl):						
Apr 20	16.160,00	-540,00	16.600,00	15.400,00	323	16.700,00
Mei 20	19.120,00	+390,00	19.250,00	17.620,00	346	18.730,00
Jun 20	21.130,00	+500,00	21.140,00	19.530,00	394	20.630,00
Jul 20	22.610,00	+510,00	22.610,00	21.000,00	1.227	22.100,00
Agu 20	23.850,00	+850,00	23.850,00	22.150,00	26.291	23.000,00
Sep 20	24.310,00	+710,00	24.520,00	22.910,00	3.983	23.600,00

Sumber: *Bloomberg*

ICDX

Harga beberapa komoditas di ICDX :

Bulan	Pntp	Vol.
CPO - CPOTR (Rp/Kg) pada penutupan : Kamis, 2 April 2020		
April, 2020	9.455	19
Mei, 2020	9.340	21
Juni, 2020	9.270	20
Juli, 2020	9.160	18
Agustus, 2020	9.155	-
RBD PALM OLEIN - OLEINTR (Rp/Kg) pada penutupan : Kamis, 2 April 2020		
April, 2020	9.275	-
Mei, 2020	9.160	-
Juni, 2020	9.140	100
Juli, 2020	9.030	-
Agustus, 2020	9.075	100
Timah - INA TIN (US$/Metric Ton) pada penutupan : Kamis, 2 April 2020		
TINPB300	14.390	-
TINPB200	14.440	-
TINPB100	14.490	-
TINPB050	14.640	-
TIN4NINE	14.890	-
Emas - GOLDGR (Rp/gr) pada penutupan : Rabu, 1 April 2020		
April, 2020	852.100	-
Mei, 2020	855.500	60
Juni, 2020	858.900	102
Juli, 2020	862.400	-
Agustus, 2020	866.000	-
September, 2020	869.800	-
Oktober, 2020	873.600	-
November, 2020	877.300	-
Desember, 2020	881.100	-
Januari, 2021	885.000	-
Februari, 2021	888.900	-
Maret, 2021	892.800	-
Emas - GOLDUD (US$/Troy Ounce) pada penutupan : Rabu, 1 April 2020		
GOLDUD Des 30	1.589,00	390

Sumber: *ICDX*
Keterangan: **Harga tidak termasuk PPn 10%*

HARGA EMAS & PERAK

Harga logam mulia di Aneka Tambang Jakarta pada 2 April 2020 :

Emas:

Ukuran	Harga (Rp/gram)
500 gram	867.600
250 gram	868.000
100 gram	869.000
50 gram	869.700
25 gram	871.200
10 gram	875.500
5 gram	882.000
Harga Beli Kembali	822.000

Perak:

Ukuran	Harga (Rp/gram)
1000 gram	-
500 gram	10.500
250 gram	11.300

Sumber: *Antam*

JAKARTA–BBJ

Harga beberapa komoditas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 1 April 2020 :

Komoditas	Bulan	Harga Penyelesaian	Perubahan	Volume
OLE	Apr 20	9.790	25	5
OLE	Mei 20	9.630	30	5
OLE	Jun 20	9.630	30	5
OLE	Jul 20	9.630	30	5
OLE	Agu 20	9.630	30	5
OLE	Sep 20	9.630	30	2.015
OLE10	Apr 20	9.950	80	0
OLE10	Mei 20	9.240	0	0
OLE10	Jun 20	9.130	0	0
OLE10	Jul 20	9.105	0	0
OLE10	Agu 20	9.130	0	0
OLE10	Sep 20	9.395	100	4
GOL	Apr 20	847.950	3.400	0
GOL	Mei 20	704.100	0	0
GOL	Jun 20	704.100	0	0
GOL100	Apr 20	848.950	3.400	0
GOL100	Mei 20	843.050	-15.650	188
GOL100	Jun 20	843.800	-13.600	0
GOL250	Apr 20	848.450	3.400	0
GOL250	Mei 20	842.500	-13.500	120
GOL250	Jun 20	841.450	-14.050	88
GG10	-	721.500	0	89
GG100	-	737.500	0	0
GG25	-	773.500	0	15
GG5	-	744.500	0	412
GG50	-	751.500	0	9
KGE	-	842.908	3.400	0
KIE	-	16.450	140	0

Harga beberapa komoditas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 1 April 2020 :

Komoditas	Bulan	Harga Penyelesaian	Perubahan	Volume
GU1H10	-	1.591,35	1,15	0
GU1TF	-	1.591,35	1,15	0
KGEUSD	-	1.591,35	1,15	0
ACF	Mei 20	74.700,00	-1.000	0
ACF	Jul 20	75.200,00	50	0
ACF	Sep 20	75.650,00	200	0
ACF	Des 20	76.050,00	250	0
ACF	Mar 21	76.450,00	50	0
RCF	Mei 20	19.650,00	60	0
RCF	Jul 20	20.140,00	-40	0
RCF	Sep 20	20.450,00	-100	0
RCF	Nov 20	20.800,00	-50	0
RCF	Jan 21	21.080,00	-30	0
RCF	Mar 21	21.290,00	180	0
CC5	Mei 20	29.780,00	270	0
CC5	Jul 20	29.890,00	170	0
CC5	Sep 20	30.040,00	160	0
CC5	Des 20	29.660,00	20	0
CC5	Mar 21	29.300,00	-80	0

Harga Indeks JBA 25:

27/03/20	30/03/20	31/03/20	01/04/20	02/04/20
14.518,42	13.805,02	14.231,64	14.008,45	14.367,15

Sumber: *BBJ*

■ RUSIA BERENCANA *LOCKDOWN*

Andrey Rudakov/Bloomberg

Pengunjung berswafoto di kawasan Lapangan Merah, Moscow, Rusia, belum lama ini. Rusia berencana menerapkan karantina atau *lockdown* wilayah guna menekan laju penyebaran COVID-19. Kebijakan itu akan diterapkan pertama-tama untuk ibu kota Moskow yang mencatat dua per tiga kasus nasional.

| *LOCKDOWN* MALAYSIA |

Pengusaha Sawit Protes

Bisnis, JAKARTA — Perusahaan kelapa sawit Malaysia mengingatkan penutupan aktivitas perkebunan akan memperparah penyebaran virus corona melalui migrasi pekerja migran, di samping memperketat pasokan pangan.

Alih-alih menghentikan penyebaran virus, Asosiasi Pemilik Perkebunan Malaysia menilai penutupan perkebunan akan berdampak sebaliknya. Menurut Presiden Asosiasi, Jeffrey Ong, pekebun dan petani kecil yang tidak mampu membayar pekerja mungkin terpaksa eksodus ke kota tetangga atau ke luar negeri untuk mencari penghidupan.

Pemerintah Negara Bagian Sabah memerintahkan penutupan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit di enam distrik hingga 14 April 2020. Keputusan itu diambil setelah sejumlah pekerja di wilayah dengan 1,54 juta hektare perkebunan sawit –lebih dari 21 kali luas Singapura– itu dinyatakan positif mengidap virus corona. Menurut kelompok pekebun, penutupan ini memengaruhi sekitar 75% produksi sawit Negara Bagian Sabah dan sekitar 100.000 pekerja.

Joseph Tek, CEO IJM Plantations Bhd., salah satu perusahaan sawit di Sabah, mengatakan para petani khawatir tentang dampak sosial penutupan itu. Menurutnya, risiko akan lebih besar dibandingkan dengan membiarkan para pekerja tetap berada di dalam perkebunan yang telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat.

"Puluhan ribu pekerja asing yang akan menganggur mungkin akhirnya meninggalkan perkebunan dan mencari peluang kerja di tempat lain atau keluar untuk tujuan lain," kata Tek, dilansir *Bloomberg*, Kamis (2/4).

Para pekerja ini mungkin kembali ke keluarganya di desa. Jika para pekerja membawa virus, maka penyebarannya akan berlangsung cepat.

Selain itu, dampak ekonominya juga bisa besar. Menutup keenam distrik dapat berdampak 9% terhadap produksi bulanan Malaysia dan memangkas cadangan April.

FGV dan pekebun terkemuka Sime Darby Plantation Bhd. telah mengajukan banding atas keputusan tersebut. Adapun Wilmar International Ltd, perusahaan penyulingan minyak kelapa sawit terbesar di dunia, mengatakan penutupan akan berdampak pada barang pokok. *(Reni Lestari)*

| PANDEMI COVID-19 |

UE TAK KOMPAK SOAL CORONABOND

Bisnis, JAKARTA — Negara-negara Uni Eropa berselisih tentang respons yang tepat atas dampak ekonomi akibat pandemi virus corona di kawasan tersebut.

Reni Lestari
reni.lestari@bisnis.com

Sepekan setelah *video conference* yang diikuti 27 pemimpin negara anggota UE berakhir sengit dan saling tuding, pemerintah kawasan euro masih bersilang pendapat.

Prancis dan Belanda berada di pihak yang berlawanan. Dilansir *Bloomberg*, Kamis (2/4), menurut sebuah memo, Prancis mengusulkan pembentukan dana pemulihan ekonomi untuk mendukung negara-negara yang paling terpukul akibat pandemi ini, seperti Italia dan Spanyol. Usul ini didasarkan pada gagasan penerbitan surat utang bersama yang dikenal sebagai coronabond untuk membiayai penanganan krisis.

Prancis juga menginginkan European Stability Mechanism (ESM), dana talangan kawasan euro yang diciptakan saat krisis utang, untuk menetapkan batas kredit untuk pandemi.

Di sisi lain, negara-negara garis keras, seperti Jerman dan Belanda, menentang pembicaraan tentang mutualisasi utang. Setelah mendapat kritik karena kurangnya solidaritas terhadap negara-negara yang paling terpukul, Belanda mengusulkan dana darurat sebanyak 20 miliar euro (US$ 22 miliar). Dana itu hanya akan digunakan untuk bantuan darurat penanganan pandemi ketimbang untuk menyelamatkan ekonomi, seperti mendanai ketenagakerjaan. Bantuan darurat akan dibiayai oleh kontribusi bilateral negara-negara anggota.

Pejabat senior Kementerian Keuangan Belanda sedang membahas dua proposal itu, menjelang pertemuan para menteri keuangan pekan depan.

Sejauh ini belum ada kesepakatan mengenai penerbitan surat utang bersama, langkah yang berpusat pada penggunaan fasilitas kredit ESM. Italia berpendapat fasilitas kredit itu akan membawa stigma dan bukan alat yang tepat untuk mengatasi guncangan terhadap ekonomi semua negara anggota tanpa pandang bulu.

Para pejabat kawasan Euro mengatakan sulit untuk melihat bagaimana Jerman dan Belanda dapat mendukung proposal Prancis.

Kondisi yang menempatkan kawasan euro pada risiko resesi terbesar dalam sejarah ini mengingatkan kembali pada krisis utang satu dekade lalu yang juga dibumbui perdebatan sengit yang mengadu pemerintah Eropa utara dan selatan di tengah ketidaksepakatan atas mutualisasi utang.

PENGANGGURAN

Di sisi lain, Komisi Eropa meluncurkan rencana pinjaman untuk mencegah pengangguran. Sebelumnya, Komisi Eropa mengungkap rencana 100 miliar euro untuk membantu pemerintah anggota UE agar perusahaan mempertahankan pekerja.

Langkah ini akan menggunakan skema pinjaman yang didukung oleh jaminan dari negara-negara anggota UE.

"Ini dimaksudkan untuk membantu Italia, Spanyol, dan semua negara lain yang lain yang terpukul," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam video unggahan di akun Twitternya.

Dia melanjutkan, bantuan ini penting agar setelah permintaan kembali meningkat, tidak terjadi penurunan produksi. Von der Leyen tidak memberikan perincian lengkap tentang proyek itu. Dia berjanji akan mengumumkan instrumen baru tersebut pekan ini.

Menurut rancangan rencana komisi, pemerintah anggota UE akan dapat meminta bantuan keuangan jika belanja pemerintah tiba-tiba naik signifikan karena mengadopsi langkah-langkah nasional untuk merespons wabah virus corona.

Von der Leyen mengakui masa krisis ini tidak mudah untuk dilewati. Namun, langkah untuk tidak melakukan PHK besar-besaran penting bagi perusahaan untuk menjaga ekonomi, selain memastikan perusahaan cepat bangkit ketika kebijakan *lockdown* di banyak negara dihentikan. "Jika perusahaan tidak beroperasi karena guncangan temporer corona, perusahaan seharusnya tetap mempekerjakan karyawannya walaupun hanya ada sedikit pekerjaan," ujarnya.

Von der Leyen menggarisbawahi Italia dan Spanyol sebagai dua negara yang paling terpukul di Eropa selama masa pandemi ini. Meskipun demikian, instrumen pinjaman akan tersedia bagi seluruh negara anggota.

Dia menyatakan UE sudah pernah melakukan upaya serupa saat krisis keuangan menerpa dunia pada 2008-2009. Dengan pengalaman itu, dia optimistis negara-negara kawasan euro dapat melalui krisis ini.

Sementara itu, European Central Bank (ECB) meningkatkan pembelian aset pekan ini untuk menenangkan pasar keuangan dari dampak pandemi virus corona.

Dilansir *Bloomberg*, pembelian meningkat sekitar 40 miliar euro atau US$44 miliar karena bank sentral meningkatkan pelonggaran kuantitatif dan memulai Program Pembelian Darurat atau Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP).

Pembelian di bawah program pembelian aset yang terdiri atas utang negara, obligasi korporasi, obligasi tertutup, dan sekuritas yang didukung aset, naik 24 miliar euro.

ECB juga menghabiskan 15,6 miliar euro di bawah PEPP pekan lalu. ECB berupaya menekan kesenjangan imbal hasil antara utang yang lebih aman, seperti obligasi pemerintah Jerman dan Italia, yang dipandang oleh investor lebih berisiko.

Presiden ECB Christine Lagarde secara tidak sengaja memperburuk situasi ketika mengatakan bukan tugas bank sentral untuk menutup kesenjangan tersebut.

"Intinya adalah bahwa mereka [ECB] harus turun tangan dengan beberapa pembelian untuk mengarahkan *spread* kembali lebih rendah," kata Martin van Vliet, ahli strategi di Robeco.

ECB berencana untuk memompa lebih dari 1 triliun euro ke dalam perekonomian tahun ini karena serikat mata uang 19 negara itu menghadapi resesi terdalam dalam sejarahnya. ■

> **"Jika perusahaan tidak beroperasi karena guncangan temporer corona, perusahaan seharusnya tetap mempekerjakan karyawannya walaupun hanya ada sedikit pekerjaan.**

Negara-negara Uni Eropa terpecah soal penerbitan obligasi bersama untuk membiayai dampak virus corona (coronabond).

Apa itu coronabond? Sebelum virus corona muncul, obligasi ini dikenal sebagai euro bonds –obligasi yang diperdebatkan sejak kawasan euro terbentuk 1999. Euro bond merupakan instrumen utang 'tanggung renteng' untuk membiayai pinjaman, di mana uang dapat diarahkan pada negara-negara yang sangat membutuhkan. Saat ini setiap anggota UE menjual obligasi sendiri-sendiri untuk mendanai proyek dan APBN dengan biaya yang sangat bervariasi.

Kendati tidak memperoleh dukungan yang memadai, coronabond memungkinkan berbagi risiko di antara anggota UE sehingga dapat memangkas biaya dana.

| PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |

PEMERINTAH DIDESAK TURUNKAN KEMBALI IURAN

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah didesak untuk segera menerbitkan peraturan presiden guna menurunkan besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Wibi Pangestu Pratama
redaksi@bisnis.com

Timboel Siregar, Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch, menjelaskan bahwa penyebaran virus corona akan menekan tingkat perekonomian masyarakat sehingga bakal berpengaruh terhadap kemampuan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam membayar iuran. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi pendapatan iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Timboel, dalam kondisi seperti saat ini BPJS Kesehatan tidak boleh mengalami penurunan pendapatan iuran. Selain karena masih mencatatkan defisit sekitar Rp5 triliun pada pertengahan Maret 2020, dia pun menilai bahwa BPJS Kesehatan harus dalam kondisi prima saat pandemi seperti saat ini.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pengganti Perpres 75/2019 Pasal 34 yang telah dibatalkan MA. Turunnya besaran iuran peserta mandiri dinilai akan menjaga kemampuan membayar iuran di tengah-tengah kondisi pandemi yang diliputi ketidakpastian.

"Covid-19 ini berdampak kepada ekonomi, operasionalisasi pabrik, perusahaan, ini juga nanti akan berdampak kepada pembayaran iuran dari pemberi kerja, juga pekerjanya, harus diantisipasi," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (2/4).

Berdasarkan kalkulasi BPJS Watch, besaran iuran yang diperoleh dari segmen peserta Pekerja Penerima Upah Swasta berkisar Rp30 triliun–Rp32 triliun per tahun dalam kondisi normal. Timboel menilai bahwa kondisi yang tidak normal saat ini berpotensi menurunkan kemampuan pemberi kerja dalam membayarkan iuran.

Penurunan besaran iuran dengan segera dapat mencegah menurunnya pendapatan iuran dari segmen peserta tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan bahwa putusan MA soal pembatalan kenaikan iuran sudah disampaikan secara terbuka melalui situs resmi MA pada Selasa (31/3). Oleh karena itu, BPJS Kesehatan dan pemerintah dapat menindaklanjuti putusan tersebut.

Iqbal pun menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan MA No. 1/2011 Pasal 8, pemerintah memiliki waktu untuk memenuhi putusan tersebut maksimal 90 hari setelah putusan tersebut dikirimkan kepada pihak bersangkutan.

"BPJS Kesehatan telah mempelajari dan siap menjalankan putusan MA tersebut. Saat ini pemerintah dan kementerian terkait dalam proses menindaklanjuti putusan MA tersebut dan sedang disusun Peraturan Presiden [Perpres] pengganti," ujar Iqbal.

Lebih jauh, dia mengakui bahwa penyebaran virus corona memang berpotensi menekan tingkat pendapatan masyarakat sehingga dapat berpengaruh terhadap kemampuan membayar iuran program JKN. Namun, Iqbal optimistis pendapatan iuran BPJS Kesehatan tidak akan terganggu.

"Potensi [penurunan pendapatan iuran] mungkin saja terjadi, cuma kewajiban pembayaran iuran kan tidak cuma bulan per bulan. Artinya iuran tetap bisa ditagih [saat kondisi perekonomian sudah mulai membaik]," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menetapkan untuk menambah subsidi Rp3 triliun bagi BPJS Kesehatan sebagai upaya untuk menekan dampak penyebaran virus corona. Subsidi tersebut merupakan bagian dari tambahan anggaran kesehatan senilai Rp75 triliun untuk menghadapi Covid-19.

Dengan subsidi tersebut, BPJS Kesehatan dapat segera membayarkan utang klaim terhadap rumah sakit yang saat ini menjadi garda terdepan penanganan Covid-19. Dengan demikian, defisit yang dialami oleh badan tersebut juga akan turut menyusut.

EFISIENSI

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Hotbonar Sinaga menilai BPJS Kesehatan perlu melakukan efisiensi untuk menghadapi potensi risiko dari penyebaran virus corona.

Subsidi pemerintah senilai Rp3 triliun bagi badan tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi defisit badan tersebut. Terlebih, pandemi Covid-19 juga berpotensi menekan keuangan BPJS Kesehatan.

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan berpotensi terganggu karena kemampuan peserta untuk membayar iuran dapat menurun seiring kondisi perekonomian yang menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, Hotbonar menilai bahwa BPJS Kesehatan perlu melakukan langkah-langkah untuk menjaga keuangannya. ■

BALADA PROGRAM JKN

BPJS Kesehatan bersama pemerintah mengaku siap menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan kenaikan iuran peserta Pekerja Bukan Penerimah Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Namun untuk itu, pemerintah perlu menyusun Peraturan Presiden untuk menurunkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sesuai putusan MA.

Putusan MA yang Membatalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

(1) Menyatakan pasal 34 (1) dan (2) Perpres 75/2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, yakni UUD 1945, UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.

2) Pasal di atas tidak lagi memiliki ketentuan hukum yang mengikat.

Putusan Dibacakan pada : 27 Februari 2020
Perkara : No. 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil.
Latar belakang perkara : Permohonan uji materi terhadap Perpres No. 75/2019 oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia.

Jumlah Peserta BPJS Kesehatan (per 29 februari 2020)

- BP (5)
- PBPU (30,39)
- PPU BU (36,41)
- PPU PN (17,69)
- PBI APBD (36,96)
- PBI APBN (96,54)

Total peserta 223,00 Juta Jiwa

Dasar Kenaikan Iuran Peserta Mandiri

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Poin Perubahan (Pasal 34)

a. Rp42.000 per orang per bulan (untuk perawatan kelas III)
b Rp110.000 per orang per bulan (untuk perawatan kelas II)
c. Rp160.000 per orang per bulan (untuk perawatan kelas I)

Sebelumnya :

a. Rp25.500 per orang per bulan (untuk perawatan kelas III)
b. Rp51.000 per orang per bulan (untuk perawatan kelas II)
c. Rp80.000 per orang per bulan (untuk perawatan kelas I)

Efektif Berlaku : **Mulai 1 Januari 2020**

Kenaikan lain untuk peserta PBI dari APBD dan APBN*

Rp23.000 per bulan per orang ► Rp42.000 per orang per bulan

Efektif Berlaku : **1 Agustus 2019**

*Ket: *) Dibayarkan oleh pemerintah* *Sumber: Berbagai sumber, diolah*

BISNIS/YAYAN INDRAYANA

| PERINGKAT SURAT UTANG BANK |

POTENSI KOREKSI KIAN TERBUKA

Bisnis, JAKARTA — Peringkat dan *outlook* surat utang perbankan berpotensi terkoreksi tahun ini seiring dengan tingginya dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

M. Richard & Lorenzo Anugrah Mahardhika
redaksi@bisnis.com

Fungsi intermediasi perbankan akan terganggu, sekalipun pemerintah berupaya mengeluarkan sejumlah stimulus untuk menahan laju pelemahan bisnis bank

Senior Vice President PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Hendro Utomo mengatakan pihaknya masih melakukan analisa terhadap semua emiten, termasuk perbankan.

Meski koreksi peringkat dan *outlook* (prospek peringkat) akan berbeda-beda sesuai kondisi dan kemampuan modal masing-masing bank, tetapi dampak Covid-19 tergolong cukup dalam ke semua individu bank.

Hendro menjelaskan kondisi yang mempengaruhi peringkat utang tahun ini adalah ekspansi kredit yang sangat terbatas. Pefindo memandang pertumbuhan kredit bahkan cukup sulit untuk dapat mencapai 6% secara tahunan (*year-on-year*/yoy) tahun ini.

Terlebih, Hendro memandang perbankan akan lebih fokus pada penjagaan kualitas kredit, yang pada akhirnya membuat peningkatan restrukturisasi cukup tinggi pada tahun ini.

"Restrukturisasi ini tentunya berpotensi mengganggu arus kas sekaligus pendapatan bank," katanya, Kamis (2/4).

Direktur Pemeringkatan PT Fitch Ratings Indonesia Eddy Handali juga mengaku tengah mengkaji ulang *outlook* tiap sektor dengan memperhitungkan dampak Covid-19. Hasilnya, sebagian besar *outlook* dari sektor-sektor utama menjadi negatif.

Namun, menurutnya, di antara semua sektor, sektor yang paling terdampak dari ketidakpastian ini berasal dari bidang perbankan. Tekanan terhadap *outlook* industri perbankan terutama disebabkan oleh kemungkinan penurunan penyaluran kredit.

Senada, dalam laporan terbarunya kemarin, Moody's Investors Service bahkan telah menurunkan *outlook* sistem perbankan Indonesia untuk 12-18 bulan ke depan dari semula stabil menjadi negatif. Artinya, ada potensi penurunan peringkat dalam waktu dekat.

"Wabah *coronavirus* telah melemahkan permintaan global dan semakin mengganggu aktivitas ekonomi domestik, yang akan merusak kualitas aset bank-bank Indonesia," ungkap analis Moody's Tengfu Li dalam laporan tersebut.

Secara umum, Moody's memandang ada potensi pemburukan kinerja pada sejumlah indikator utama penopang sistem perbankan di Indonesia, terutama pada bidang lingkungan operasi, risiko aset, serta profitabilitas dan efisiensi. (*Lihat infografis*)

Meskipun demikian, Moody's memperkirakan kondisi permodalan perbankan di Indonesia akan relatif stabil. Hal ini terutama ditopang oleh cadangan kerugian yang cukup tinggi yang telah dimiliki oleh kebanyakan bank.

Lagipula, dukungan pemerintah sangat tinggi terhadap industri perbankan domestik, untuk memastikan kinerja perbankan tetap solid guna menopang perekonomian nasional. Hanya saja, tantangannya akan semakin besar bila pemburukan kinerja akibat Covid-19 berkepanjangan.

"Jika virus corona menyebar secara substansial di Indonesia, menyebabkan perlambatan ekonomi yang lebih dalam, lebih lama, maka dampak negatif kredit bagi bank akan meningkat," kata Tengfu Li.

TEKANAN TAK TERHINDARKAN

Perbankan menghadapi tantangan yang cukup serius menghadapi dampak pandemi COVID-19. Kendati pemerintah tidak tinggal diam dan memberikan sejumlah stimulus, tetapi tekanan bisnis pada industri perbankan tahun ini tetap tidak terhindarkan. Alhasil, Moody's pun menurunkan outlook sistem perbankan Indonesia menjadi negatif.
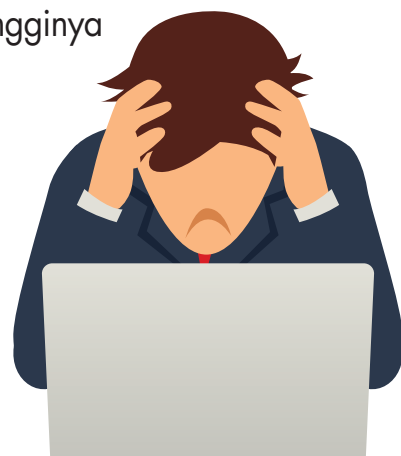
Pendorong Utama *Outlook* Negatif pada Sistem Perbankan Indonesia

Indikator	Status		Faktor Kunci
Lingkungan Operasi	Memburuk	(-)	Pertumbuhan GDP akan menurun tajam karena pelemahan pertumbuhan pada konsumsi domestik dan investasi swasta.
		(-)	Permintaan global terhadap komoditas akan melemah, sedangkan arus keluar modal asing akan semakin memperketat likuiditas dolar di dalam negeri.
Risiko Aset	Memburuk	(-)	Risiko aset bagi pinjaman terhadap industri yang terkait komoditas akan meningkat, sedangkan pelemahan mata uang rupiah akan memukul debitur dengan pinjaman dolar tanpa instrumen lindung nilai.
		(-)	Kredit pada UKM dan kredit ritel kepada pekerja informal akan sangat berisiko seiring dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat, sebab para debitur ini cenderung memiliki likuiditas yang lemah.
Permodalan	Stabil	(=)	Cadangan kerugian pinjaman dan kapitalisasi yang kuat akan menjadi bantalan yang solid bagi bank untuk menghadapi tekanan kerugian.
		(=)	Peningkatan modal kemungkinan akan tetap mengimbangi konsumsi karena margin bunga bersih akan tetap cukup tinggi untuk menyerap kerugian kredit.
Profitabilitas dan Efisiensi	Memburuk	(-)	Pemangkasan suku bunga acuan yang agresif oleh Bank Indonesia akan memperketat margin bunga bersih.
		(-)	Pemburukan pada kualitas aset akan mendorong peningkatan biaya kredit, meskipun restrukturisasi kredit akan mencegah lonjakan yang terlalu tinggi.
Pendanaan dan Likuiditas	Stabil	(=)	Pertumbuhan deposito akan tetap mengimbangi pertumbuhan kredit, seiring permintaan kredit yang melemah.
		(-)	Likuiditas dolar AS akan mengetat selama terus berlanjutnya arus modal keluar.
		(+)	Injeksi likuiditas yang agresif oleh Bank Indonesia akan menolong bank untuk mempertahankan likuiditasnya.
Dukungan Pemerintah	Stabil	(=)	Pemerintah Indonesia kemungkinan akan tetap sangat mendukung bank-bank besar, tetapi sedikit kurang terhadap yang lain.

Sumber: Moody's Investors Service

Keterangan: *(-) Faktor Negatif (+) Faktor Positif (=) Faktor Netral*

BISNIS/YAYAN INDRAYANA

> **"Jika virus corona menyebar secara substansial di Indonesia, menyebabkan perlambatan ekonomi yang lebih dalam, lebih lama, maka dampak negatif kredit bagi bank akan meningkat.**

PERNAH HADAPI

Sementara itu, ekonom senior Fauzi Ichsan menilai mekanisme fungsi intermediasi bank-bank di Indonesia saat ini masih cukup mumpuni, meskipun potensi perlambatan pertumbuhan kredit memang tidak terhindarkan.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2015-2020 ini mengatakan perbankan pernah menghadapi kondisi yang lebih buruk dari ini dan tetap mampu pulih dengan cepat.

"Dulu masalah yang paling berat pernah terjadi pada 1998 dan 2008, tetapi masih dapat tetap dikendalikan. Saat ini pun juga sama, kami bahkan lebih optimistis. Kredit masih dapat tumbuh di kisaran 6% hingga 7%. Momentum perbaikan fungsi intermediasi semester kedua tahun ini sangat penting," katanya.

Dirinya mengakui bahwa bank saat ini menghadapi kondisi penurunan kualitas kredit yang cukup berat. Meski rasio kredit bermasalah dapat diminimalisir pada kisaran 3%, tetapi rasio kredit dalam pantauan dapat naik tinggi.

"Otoritas memberi relaksasi perhitungan kolektibilitas menjadi satu pilar, tetapi *loan at risk* masih bisa naik dari saat ini sudah 11% menjadi 15%," katanya.

Fauzi juga menilai bank saat ini tidak memiliki kecenderungan mengambil langkah gegabah dengan meminta sebagian debitur yang baik untuk melunasi kreditnya, sehingga menimbulkan risiko kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) yang lebih tinggi.

"Jika langkah ini dapat dilakukan konsisten, debitur yang masih memiliki performa baik masih dapat melanjutkan penyerapan kreditnya," katanya. ■

■ BANTUAN BANK MANDIRI

Vice President Government Business Head Bank Mandiri Yoga Sulistijono (*ketiga kiri*) berfoto bersama Direktur Utama RSUP Persahabatan dr Rita Rogayah Sp.(K) MARS (*ketiga kanan*) dan Jajaran Direksi RSUP Persahabatan saat penyerahan bantuan APD dan Ventilator di Jakarta, Kamis (2/4). Bank Mandiri menyerahkan bantuan satu unit ventilator dan 200 unit Alat Pelindung Diri (APD) senilai Rp805 juta kepada RSUP Persahabatan yang menjadi salah satu RS Rujukan COVID-19.

Bisnis/Arief Hermawan P